

Haji Sasak

Antara Dahaga Spiritualitas,
Kapital Simbolik, dan Fetishisme

Kajian haji pada buku ini lebih difokuskan pada sisi historis genealogi gelar haji yang dimapankan dalam masyarakat dan bagaimana hal itu turut membentuk kelas sosial baru dalam masyarakat. Sajian selanjutnya yakni bagaimana kapital simbolik yang muncul dari gelar haji tersebut turut dimapankan oleh subyek haji ataupun legitimasi dari masyarakat.

Kapital simbolik di balik gelar haji menjadi legitimasi posisi subyek haji dalam masyarakat yang dibedakan ataupun ada hasrat untuk membedakan diri (*sense of distinction*), terutama kaitannya dengan sisi-sisi religiusitas yang ditampilkan. Begitu juga dengan kapital simbolik pada subyek haji perempuan yang tidak se-mapan pada haji laki-laki masih didominasi kultur patriarki atau sudut pandang laki-laki (*male gaze*) yang menunjukkan bahwa posisi kedua subyek haji berbeda perlakuan dalam masyarakat.



UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTER LT.1 KAMPUS II UIN MATARAM
JI. GAJAH MADA NO. 100 JEMPONG BARU KOTA MATARAM



ABDUL RAHIM, M.A.

Haji Sasak

Antara Dahaga Spiritualitas,
Kapital Simbolik, dan Fetishisme



ABDUL RAHIM, M.A.

Haji Sasak

Antara Dahaga Spiritualitas,
Kapital Simbolik, dan Fetishisme

Abdul Rahim.M.A.

HAJI SASAK

ANTARA DAHAGA SPIRITUALITAS, KAPITAL
SIMBOLIK, DAN *FETISHISME*



HAJI SASAK
ANTARA DAHAGA SPIRITUALITAS, KAPITAL
SIMBOLIK, DAN FETISHISME

Penulis:

Abdul Rahim, M.A.

ISBN 978-623-8497-11-9

Editor:

Dr. Nikmatullah, S.Ag., M.A.

Layout:

Tim UIN Mataram Press

Desain Sampul:

Tim Creative UIN Mataram Press

Penerbit:

UIN Mataram Press

Redaksi:

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru

Kota Mataram – NTB 83116

Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499

Email: uinmatarampress@gmail.com

Distribusi:

CV. Pustaka Egaliter (Penerbit & Percetakan)

Anggota IKAPI (No. 184/DIY/2023)

E-mail: pustakaegaliter@gmail.com

<https://pustakaegaliter.com/>

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Prakata Penulis

Puji syukur senantiasa terpanjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan naskah ini. Shalawat serta salam tak lupa selalu dihaturkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW. yang dengan tuntunannya nikmat Islam sampai saat ini masih kita rasakan.

Kajian tentang haji dalam konteks lokal Sasak cukup banyak yang sudah tersaji di meja-meja akademik. Terutama terkait dengan ritual, tradisi, hingga sisi sosiologis-antropologis terkait pelaksanaannya di masyarakat. Salah satunya juga yang pernah penulis lakukan sebelum buku ini diterbitkan yakni kajian haji dilihat dari sisi solidaritas masyarakat Sasak menyambut calon haji. Pada kajian yang lain haji ditinjau dari sisi antropologis terkait kebudayaan antara *behaji* sebagai kebudayaan kecil dalam masyarakat Sasak dan ritual ibadah haji di Makkah sebagai Kebudayaan besar yang dilegitimasi dalil agama dan bernilai teologis dalam Islam.

Sementara kajian haji pada buku ini lebih difokuskan pada sisi historis genealogi gelar haji yang dimapankan dalam masyarakat dan bagaimana hal itu turut membentuk kelas sosial baru dalam masyarakat. Sajian selanjutnya yakni bagaimana kapital simbolik yang muncul dari gelar haji tersebut turut dimapankan oleh subyek haji ataupun legitimasi dari masyarakat. Kapital simbolik di balik gelar haji menjadi legitimasi posisi subyek haji dalam masyarakat yang dibedakan ataupun ada hasrat untuk membedakan diri (*sense of distinction*), terutama kaitannya dengan sisi-sisi religiusitas yang ditampilkan. Begitu juga dengan kapital simbolik pada subyek haji

perempuan yang tidak se-mapan pada haji laki-laki masih didominasi kultur patriarki atau sudut pandang laki-laki (*male gaze*) yang menunjukkan bahwa posisi kedua subyek haji berbeda perlakuan dalam masyarakat.

Pembahasan lainnya juga disajikan terkait komersialisasi ibadah haji dengan jargon semakin mudah jalan menuju makkah juga bisa disimpulkan sebagai bentuk komodifikasi agama yang terjadi pada ibadah haji. *Trend* Umrah yang meningkat turut menyuburkan komodifikasi agama yang terjadi dengan menjamurnya biro travel haji plus dan umrah, yang juga turut menyumbang pembedaan kelas sosial terkait pelaksanaan haji dan umrah. Pembedaan gelar haji di dunia Melayu antara Malaysia, Singapore, dan Indonesia juga menjadi cakupan kajian yang disajikan secara sekilas terkait sisi historis pelaksanaan haji oleh orang nusantara yang termasuk di dalamnya Melayu.

Pembahasan terakhir disajikan yakni terkait peran-peran subyek haji dalam masyarakat sebagai pelopor perubahan sisi teologis, sosial, ekonomi dalam masyarakat yang direfleksikan dari proses ritual ibadah haji baik pra- pelaksanaan haji, ketika berhaji, dan pasca kembali ke masyarakat. Peran-peran tersebut juga sebagai upaya mengukuhkan posisi subyek haji dalam masyarakat yang dipandang sebagai manusia baru yang sudah sempurna keislamannya. Pada bagian penutup penulis merefleksikan kajian haji ini dalam konteks realitas yang terjadi dalam masyarakat saat ini.

Tak ada yang benar-benar selesai dalam kajian-kajian akademis terkait masyarakat dan kebudayaannya, begitu juga dalam konteks *behaji* dalam masyarakat Sasak. Cukup banyak cakupan lain

yang masih bisa ditelisik lebih dalam. Setidaknya kajian ini menjadi awal (*preliminary*) untuk mencoba menggali sisi-sisi yang lebih praktis dalam kajian tentang haji di masyarakat Sasak.

Mataram, 5 Agustus 2023

Penulis

Abdul Rahim, M.A

Daftar Isi

BAB I	1
Haji Dan Imajinasi Spiritualitas Masyarakat Sasak	1
A. Pertanyaan-pertanyaan Dasar Terkait Pengkajian Haji	12
B. Ekspektasi Sajian dalam Kajian Haji	13
C. Beberapa Rujukan Pengkajian Haji	14
D. Konsep Praxis Sosial Pierre Bourdieu Sebagai Pisau Analisis Pengkajian	22
E. Konsep Metodologis Pengkajian Haji dalam Buku ini	26
BAB II.....	31
HAJI DI MASA-MASA AWAL ISLAM PADA MASYARAKAT SASAK	31
A. Haji Sebagai Perjalanan Spiritualitas.....	34
B. Perubahan Nama dan Gelar Sebagai Identitas Subyek Haji.....	37
C. Haji Sebagai Upaya Pencarian Atas Makna Kepasrahan....	40
D. Ritus Tradisi Pra-Pelaksanaan Haji di Lombok	43
1. <i>Mban Kayuq</i> dan Membuat Teratak.....	44
2. Ziarah Makam.....	45
2.1. Ziarah Jamaah NW	47
2.2. Ziarah Jamaah Maraqitta'limat	48
2.3. Ziarah Jamaah Al Mukhtariyah	49
3. Ziarah Untuk Memperkokoh Persaudaraan.....	50
4. Acara Begawe.....	51
5. Berame-rame.....	52

BAB III	55
GELAR HAJI DALAM PUSARAN KAPITAL	
SIMBOLIK	55
A. Gelar sebagai Bentuk Pemaparan Kapital Simbolik	55
B. Legitimasi Kapital Seorang Haji.....	59
C. Gelar Haji Sebagai Bentuk Kontrol Individu Pada masa Kolonial	61
D. Gelar Haji Sebagai Konstruksi Citra Diri Dan Kelas Sosial	64
E. Haji Sebagai Kesatuan Umat	70
F. Meningkatnya Tren Umrah pasca panjangnya Antrian Haji.....	75
G. Kapital Simbolik Haji perempuan.....	80
H. Haji dalam Konteks Dunia Melayu	82
BAB IV	87
PERAN SUBYEK HAJI DALAM MASYARAKAT	
SASAK	87
A. Peran Haji Dalam Tindakan Sosial	89
B. Haji dan Proses Menemukan Fethisism	91
C. Haji dan Transformasi Nilai Pada Diri Subyek Haji.....	93
D. Status dan Nama Baru Sebagai Tradisi	107
E. Pembaharuan Islam di Nusantara Melalui Haji.....	112
BAB V.....	125
Haji Sebagai Sebuah Tinjauan Reflektif	125
Refleksi Kritis pengkajian Haji.....	125
Refleksi Sosial Pada Fenomena Haji.....	131

BAB I

Haji Dan Imajinasi Spiritualitas Masyarakat Sasak

Haji selain sebagai ibadah penyempurna keislaman, terdapat juga ritus-ritus tradisi dalam masyarakat yang menjadi sebuah habitus. Kajian-kajian dari sisi antropologis ritus-ritus tradisi tersebut menjadikan haji sebagai ibadah yang kompleks dan persyaratan khusus yang berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Letak geografis pelaksanaannya juga menjadi kekhususan ibadah haji, di samping persyaratan mampu yang harus dipenuhi.

Pandemi Covid-19 (2020-2022) sempat membuat tertunda pelaksanaan haji dan umrah yang kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraannya pun ikut berubah. Hasrat pelaksanaan haji dan umrah di masa Pandemi tidak menyurutkan minat masyarakat untuk berlomba-lomba menjajaki pasar turisme dunia di balik selubung ritual ibadah. Begitu juga dalam konteks lokalitas masyarakat Sasak, hasrat untuk berhaji menjadi tujuan yang diiringi upaya-upaya pengumpulan basis ekonomi selama bertahun-tahun. Haji menjadi kelas sosial dalam masyarakat Sasak, dengan kapital simbolik yang melekat padanya menjadikan pemilik gelar juga berupaya mengkonstruksi strategi hasrat membedakan diri (*distinction*) baik melalui kostum, sikap sehari-hari, dan apa yang dikonsumsi.

Genealogi gelar haji yang membentuk kelas sosial akan dikaji melalui konsep Praksis Sosial Pierre Bourdieu terkait kapital simbolik dan *distinction*. Selanjutnya persepsi masyarakat atas gelar haji yang menjadi kelas sosial juga menjadi bagian dari pertanyaan dalam upaya penyusunan buku ini. Rumusan masalah terakhir yaitu terkait peran

seorang haji sebagai kelas sosial dan kapital simbolik yang mengiringi dalam upaya pembangunan sosial keumatan di masyarakatnya. Mengkaji Haji dalam masyarakat Sasak Lombok tidak terlepas dari mengkaji ritus-ritus tradisi sebagai sebuah kebudayaan. Akan tetapi sisi kritis pengkajian haji dan umrah tidak bisa menapikan komersialisasi perjalanan haji atau umrah yang semakin menegaskan komodifikasi agama juga semakin masif menyelubungi kita dalam kesadaran semu.

Karena ibadah haji merupakan ibadah kolektif, kesatuan kemanusiaan, bukan semata-mata harus dari persetujuan kuasa negara memutuskan umat muslim mana yang boleh datang. Seperti yang pernah dilakukan atas muslim Iran dan Yaman karena persetujuan kedua negara dengan Arab Saudi. Iran juga pernah melontarkan kritik terhadap negara tersebut tentang pengelolaan keuntungan yang didapatkan dari jamaah yang beribadah Haji, semestinya dikelola secara kolektif oleh negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI), termasuk Indonesia. Tetapi Arab Saudi tetap bergeming. Kapitalisme neoliberal sudah cukup akut di Arab Saudi, yang didukung ideologi Wahabisme yang ironis di balik misi puritanisme tetapi tak berdaya di bawah kapitalisme itu sendiri.

Penundaan haji akibat Pandemi tentu saja menjadi kekecewaan juga bagi jamaah yang sudah menunggu sekian tahun. Panggilan ibadah yang mereka yakini benar-benar undangan dari Tuhan, tertunda hanya karena makhluk-Nya yang begitu kecil, tak kasat mata. Penundaan haji ini mestinya menjadi evaluasi bagi semua pihak, tak terkecuali pemerintah Indonesia dan semua Umat Muslim. Apakah

ibadah haji itu semata-mata memenuhi panggilan Tuhan ataukah menjadi ajang gengsi untuk mendapatkan gelar di antara manusia.

Makna perjalanan ibadah haji dari jamaah Indonesia tentunya juga sudah bergeser. Pada masa kolonial seorang haji menjadi penggerak untuk melawan ketidakadilan yang dialami sebuah bangsa yang besar ini. Maka tak heran seorang yang pergi ke Makkah tidak sekedar melaksanakan ibadah haji, tetapi menetap selama beberapa tahun untuk menimba ilmu. Moda transportasi juga cukup berpengaruh atas hal itu. Seorang pribumi yang berangkat ke Makkah menempuh perjalanan berbulan-bulan, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan selama berada di Makkah. Mereka pun ada juga yang menjadi ulama besar di Makkah, seperti, Syaikh Yusuf, Syaikh Yasin Al Fadani, Syaikh Salim Al Falimbani, Syaikh Nawawi al Bantani, dan lainnya (Putuhena, 2007).

Sementara mereka yang pulang ke tanah air tentunya dengan semangat cinta tanah air menggerakkan masyarakatnya untuk melawan, paling tidak melawan kebodohan dan ketertindasan oleh bangsa kolonial. Gerakan-gerakan pribumi yang berhaji itu kemudian mendapat pengawasan juga dari pemerintah kolonial, hingga mereka mengutus salah seorang sarjana kolonial menyelidiki gerakan-gerakan para haji tersebut. Snouck Hurgronje yang menjadi muallaf di Makkah, merubah nama menjadi Abdul Ghofur bertugas untuk menyelidiki itu. Ia pun banyak menggali Bahasa Arab, belajar Islam, di samping tugas utamanya untuk mengawasi gerakan-gerakan para pribumi yang datang ke Makkah. Selain menuntut ilmu di Makkah, pribumi yang berhaji itu ada juga yang berdagang, membangun

jaringan dagang antara Arab dan Pribumi hingga masyarakat Arab pun banyak yang datang ke Hindia-Belanda waktu itu (Madjid, 2008).

Pergeseran makna ibadah haji sekarang dengan moda transportasi yang serba cepat, jarak bukan lagi perbandingan geografis, tetapi hanya waktu tempuh, juga menjadi penyebab hal itu terjadi. Apakah ibadah haji sekarang benar-benar untuk memenuhi dahaga spiritualitas membangun kedekatan dengan Tuhan, ataukah semata mengejar *fetish* (kepuasan), karena Makkah sudah menjadi pasar turisme spiritual terbesar dunia di balik kemegahan-kemegahan yang disajikan di dua kota suci tersebut.

Konsep egalitarianisme, kesamarataan, ketidakberbedaan dengan semua memakai pakaian putih sudah tidak lagi menjadi esensi dalam pelaksanaan ibadah haji. Ka'bah tidak lagi menjadi sentral, bahkan hanya menjadi titik hitam di antara hotel-hotel pencakar langit melebihi ketinggian menara-menara di masjidil Haram. Hal inilah yang menjadi kritik dari Mirza Tirta Kusuma, nama pena dari Prof. Syafaatun Al Mirzanah dalam buku *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas* (2014)

Haji boleh jadi kita katakan sebagai arena panjat sosial (*social climb*), karena dengan gelar itu seolah orang yang pernah berhaji merasa perlu untuk lebih dihormati dan dianggap memiliki kompetensi keagamaan yang lebih. Hal ini masih terjadi di beberapa masyarakat awam kita. Selain itu, haji juga menjadi arena untuk menunjukkan eksistensi diri, hasrat untuk membedakan diri (Bourdieu, *La Distinction*, 1979) dengan ketika seseorang berada di Makkah, hasrat untuk pamer di media sosial itu pun seolah tak tertahankan. Baru sampai di Bandara Jeddah pun sudah pamer foto

dibumbui ungkapan-ungkapan yang seolah menunjukkan religiusitas diri.

Ibadah haji yang sarat nilai kesederhanaan justru menjadi ajang kapitalisme untuk semakin mengeruk profit. Ketidaksadaran umat muslim terutama di Indonesia akan spiritualitas Haji bahkan telah menjadi arena memupuk kapital bagi pelaku-pelaku bisnis perjalanan (travel) haji yang menyajikan kemewahan, ataupun kemudahan untuk melakukan perjalanan wisata ke Makkah. Beberapa kasus travel Haji dan Umrah yang tak jadi memberangkatkan jamaah dan malah bangkrut mestinya menjadi pelajaran, benarkah ibadah haji kita untuk mengejar nilai ibadah, atautkah hanya mengejar kepuasan untuk berwisata dibungkus kesan-kesan spiritual. Pemerintah juga harus hadir secara tegas mengatur pemisahan antara bisnis traveling dan misi ibadah di balik pelaksanaan haji dan umrah. Komersialisasi atas haji ini membutuhkan kesadaran kritis masyarakat muslim yang selama ini menjadi sasaran empuk kapitalisme dengan *false fetishisme* (kepuasan semu) atas legitimasi agama.

Selain kritik atas kapitalisme neoliberal yang mengungkungi penguasa Saudi, Prof. Almirzanah juga memfokuskan kritik atas ideologi Wahabi yang menjadi landasan negara. Persekongkolan antara penguasa dan ulama-ulama Wahabisme menjadi legitimasi bagi negara untuk menghancurkan ratusan situs-situs penting dari Sejarah Islam yang mereka anggap bisa menjadi pemicu syirk. Dunia pun gempar dengan kejadian penghancuran ratusan situs-situs bersejarah itu, dan menganggap kesewenang-wenangan Saudi didukung ulama-ulama Wahabisme tersebut lebih sensitif pada *cultural icon* daripada *religious icon*, meminjam istilah Prof. Almirzanah.

Kemudian atas nama perkembangan, mereka pun melakukan perluasan di atas situs-situs tersebut. Rumah tempat Nabi lahir dan menjadi awal persebaran Islam dihancurkan untuk perluasan masjid, tak terkecuali rumah-rumah Sahabat Nabi lainnya. Bahkan Rumah Siti Khadijah, ummul mu'minin dibangun toilet megah di atasnya. Makam-makam sahabat yang lainnya tak luput dari penghancuran, dan diratakan supaya tidak dianggap mengkultuskan mereka.

Apa yang terjadi di dua kota suci itu dengan ideologi Wahabisme yang didukung negara justru menjadi arena kapitalisme neoliberal menancapkan kuasanya. Mereka menghancurkan ratusan situs-situs bersejarah yang sudah berusia ribuan tahun dengan alasan bisa memunculkan kesyirikan. Sementara tawaran investasi dengan pembangunan gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel mewah yang berjejer dan jauh lebih tinggi di sekitar masjidil haram dengan sewa yang mahal pun dibangun. Hal itu menjadi pembeda, kelas mana seorang yang datang ke makkah. Hotel yang berhadapan langsung dengan masjidil haram tentu sewanya sangat mahal dibandingkan dengan yang agak jauh.

Begitu pun dengan pembedaan biaya haji, orang yang dengan ONH Plus akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan yang ONH biasa. Pembedaan-pembedaan ini semakin menegaskan bahwa sebelum berhaji pun sudah terbentuk kelas-kelas sosial yang distandarisasi kuasa negara. Kelas-kelas itu pun menjadi penanda sosial, ibadah yang dikejar ke tempat sejauh itu, malah menampakkan keringnya spiritualitas yang seharusnya lebih mapan dari keduniawian yang ditawarkan kapitalisme neoliberal di dua kota suci tersebut.

Lamanya daftar tunggu haji mestinya juga menjadi evaluasi pribadi masing-masing. Apakah ibadah yang ditunggu sekian tahun baru bisa berangkat itu semata-mata menunggu panggilan Tuhan, atautkah menunggu panggilan negara untuk berangkat berwisata dengan balutan spiritualitas. Pun jika menunggu haji terlalu lama, ibadah umrah menjadi pilihan yang cukup digandrungi masyarakat kita dengan tawaran-tawaran tambahan jalan-jalan ke negara lainnya, Ke Turki misalnya.

Sesampainya di Makkah pun jamaah kita lebih dominan memamerkan kemegahan-kemegahan gedung yang ditemui melalui media sosial. Bisa saja karena memang larangan berfoto ria di masjidil haram ataupun Ka'bah jika diketahui petugas. Setidaknya itu menunjukkan bahwa euforia atas kemegahan, kemewahan yang disediakan kota suci itu lebih menarik perhatian jamaah daripada nilai-nilai ibadah yang seharusnya melahirkan kesederhanaan, kezuhudan.

Tak heran istilah *Las Vegasisasi* kota suci semakin menampakkan kekeringan spiritualitas, dan ketidaknyamanan, yang ada semua kaca dan semen, sebagaimana yang diungkap Ali al-Ahmed, direktur *The Institute for Gulf Affairs* di Washington kepada *The New York Times* (2007). Masyarakat yang terkotak-kotak (*gated communities*) adalah akibat dari semua itu. Padahal misi ibadah haji adalah egalitarianisme, yang terjadi justru sebaliknya, para jamaah terpisah dari jamaah lain, karena perbedaan status. Apa yang asalnya dimaksudkan sebagai suatu masa yang menjadi simbol kesatuan kemanusiaan, berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dalam pakaian yang paling sederhana, oleh penguasa Saudi, dibalik atau diubah

menjadi suatu masa untuk menciptakan pasar turisme spiritual terbesar di dunia (Kusuma, 2014:17).

Berhaji di masa-masa ini dan ke depannya mestinya membangunkan kita dari kesadaran semu (*false consciousness*), apakah kita mengejar dahaga spiritualitas atautkah mengejar kepuasan (*fetish*), yang bisa saja itu kepuasan semu (*false fetishisme*) meski dibalut nuansa-nuansa ibadah. Kapitalisme neoliberal yang dianut penguasa dua kota suci justru semakin memanjakan jamaah dengan sajian-sajian kemewahan, dan bisa dikatakan jauh dari kesederhanaan yang semestinya menjadi spirit dari penghambaan di hadapan Tuhan.

Nabi pun mencontohkan semasa hidup beliau hanya sekali berhaji. Ini semestinya menjadi perhatian bagi seorang muslim di balik gairah-gairah untuk selalu berkeinginan berhaji, sementara banyak jamaah lainnya yang menunggu sekian tahun belum juga berangkat. Ketika di Makkah pun, apakah hasrat terpaut untuk kedekatan dengan Tuhan, atautkah pasar turisme itu yang lebih dominan ingin dinikmati.

Ini menjadi evaluasi kita bersama di masa pandemi Covid-19. Tuhan menunda keberangkatan haji tahun ini, menguji kepasrahan berserah diri calon jamaah, apakah akan menerima atautkah malah banyak menyalahkan keadaan yang terjadi. Jika mereka menyalahkan keadaan, pun menyalahkan makhluk Tuhan, maka seseorang itu mungkin lebih pantas untuk menyiapkan hati, daripada niat lahirnya seolah ingin beribadah, tetapi yang dikejar justru berwisata di pasar turisme spiritual dua kota suci itu.

Refleksi yang bisa dipetik dari kejadian tahun ini dan di masa yang akan datang menjadi pemikiran kita bersama untuk membangun

kesadaran kritis. Jangan sampai menjadi teguran seperti yang disabdakan Nabi SAW ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Musa AS "Aku sakit, mengapa engkau tak menengokku". Hal ini menjadi isyarat kepada Nabi Musa AS yang diperintah menengok tetangganya, maka ia akan menemui Tuhan di sana. Bisa jadi mungkin ini isyarat Tuhan menegur kita di balik penundaan-penundaan ibadah haji tahun ini, banyak yang sakit, kelaparan, terlilit rentenir, tetapi kita hanya cuek dan malah sibuk berhaji, menikmati kemewahan-kemewahan pasar turisme spiritualitas terbesar di dunia ini.

Permasalahan yang dihadapi calon jamaah haji dan umrah tahun ini karena covid-19 menyebabkan hampir tidak ada pemberangkatan. Belakangan setelah dibuka kuota haji ataupun umrah untuk beberapa negara, Indonesia termasuk yang mendapatkan jatah untuk umrah. Permasalahan yang muncul kemudian yaitu biaya-biaya yang semakin besar yang harus disiapkan. Baik itu terkait tes usap (*swab*) sebelum pemberangkatan sampai biaya-biaya untuk karantina mandiri setelah sampai di Arab Saudi. Karantina mandiri selama 7 hari lebih menjadi tanggungan calon jamaah sebelum melaksanakan ibadah umrah, tentu ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Belum tentu pihak travel mau meng-cover biaya-biaya tersebut untuk calon jamaah yang sudah mendaftar sebelum masa pandemi, dan sedang menunggu pemberangkatan.

Pergi haji atau umrah adalah hal prestisius di masyarakat pinggiran dengan kultur religiusitas yang tinggi. Di Lombok misalnya, gelar haji kemudian menjadi sebuah modal sosial yang menjadikan seseorang seolah mendapat pengakuan untuk kelas sosial yang

berbeda di masyarakatnya. Haji harus berpeci putih dan bersorban setiap keluar rumah ataupun ketika berada di rumah, dan itu sebagai simbol kelas sosial itu sendiri.

Haji di masyarakat pinggiran selain sebagai penanda kelas sosial juga membentuk persepsi dalam masyarakatnya bahwa seseorang yang sudah berhaji tentu mempunyai kapital ekonomi yang mapan. Bagaimana tidak, biaya-biaya yang harus dikeluarkan ketika selamatan haji bahkan bisa 3 kali lipat dari ongkos berhaji (ONH) itu sendiri. Tak jarang masyarakat Lombok mengadakan acara selamatan (begawe) haji secara besar-besaran. Pelepasan jamaah calon haji seolah-olah akan melepas seseorang yang pergi berjuang dengan taruhan nyawa.

Lamanya daftar tunggu haji sejak beberapa dekade terakhir juga menjadi masalah bagi masyarakat muslim yang masih memegang persepsi haji sebagai pembeda kelas sosial. Di masyarakat Sasak Lombok, ketika di satu kampung tidak ada yang berangkat haji di tahun itu akan dicap sebagai kampung yang tertinggal, selain akan sepi dari euforia persiapan sebelum pemberangkatan calon haji. Karena setiap tahun di kampung-kampung yang ada calon haji yang akan berangkat pasti akan ramai dengan persiapan itu yang menjadi tanggung jawab calon haji.

Imajinasi tentang Makkah menjadikan masyarakat kita yang rindu untuk beribadah haji membentuk mitos-mitos yang dimapankan di masyarakat, salah satunya terkait mitos teleportasi di salah satu titik di gunung Rinjani yang langsung bisa tembus ke Makkah. Mitos itu cukup mapan di masyarakat Lombok, sehingga memunculkan cerita-cerita mistis lainnya. Misalnya tentang gua susu

di dalam kolam air panas Segara Anak, danau di gunung Rinjani. Siapa yang bisa mencapai tempat tersebut dan berendam di sana dengan amalan-amalan tertentu, nantinya akan bisa sampai ke Makkah secara gaib. Sakralitas gunung Rinjani disandingkan dengan Mekah yang menjadi tujuan untuk pensucian diri. Bahkan Imajinasi tentang Makkah lainnya yaitu di masyarakat Goa Sulawesi Selatan juga membangun mitos sendiri terkait haji, yaitu dengan ziarah ke gunung Bawakaraeng (Khadafi, 2017).

Karena motif ekonomi yang kemudian lebih dominan dalam penyelenggaraan haji, masyarakat pun mengkonstruksi ritus-ritus terkait haji di salah satu tempat yang dikeramatkan. Masyarakat meyakini bahwa dengan menjalani ritus-ritus di tempat tersebut disamakan dengan berhaji seperti halnya di Makkah. Mereka pun diberikan gelar haji oleh tokoh-tokoh adat yang memapankan ritus tersebut. Ini kemudian menjadi semacam resistensi di balik penyelenggaraan ibadah haji ataupun umrah yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai kapital ekonomi yang mapan.

Definisi mampu sebagai syarat pelaksanaan haji menjadi hal yang ambivalen ketika dibenturkan dengan motif ekonomi. Yang terjadi selanjutnya adalah bermunculannya pengelola travel haji dan umrah yang menyasar masyarakat muslim dengan gaya hidup yang sudah berbeda dengan muslim pinggiran. Upaya meraup profit di balik penyelenggaraan haji dan umrah adalah hal yang tidak bisa dipungkiri dengan geliat pasar turisme terbesar dunia tersebut yang diselubungi legitimasi agama.

Mengkaji tentang haji dalam konteks lokalitas dengan kultur religiusitas yang tinggi dalam masyarakat Sasak tidak terlepas dari

upaya membangun kesadaran bahwa berhaji pada masa-masa ini dengan tawaran pasar turisme terbesar dunia semakin membuat kabur batas-batas antara religiusitas dan upaya mengejar *fetishisme* (kepuasan), yang bisa saja itu adalah kepuasan semu. Komodifikasi ibadah haji dengan tawaran-tawaran kapitalisme tentang kemudahan berhaji dan umrah semakin mengukuhkan bahwa masyarakat muslim adalah sasaran empuk kapitalisme menjejalkan produk mereka. Dalam konteks lokalitas Sasak, haji tak ubahnya upaya mengejar capital simbolik untuk semakin mempertegas posisi individu dalam masyarakatnya.

A. Pertanyaan-pertanyaan Dasar Terkait Pengkajian Haji

Berkaca dari sajian yang sudah diuraikan terdahulu dapat dikerucutkan untuk fokus bahasan dalam buku ini yaitu, Bagaimana genealogi haji dan umrah menjadi pembeda kelas sosial dalam masyarakat Sasak, yang dalam hal ini masyarakat yang menjadi lokus penelitian adalah masyarakat Lombok secara keseluruhan yang menjadi representasi di 5 kabupaten/kota yang berbeda persepsi terkait haji sebagai modal sosial tersebut.

Fokus kajian lainnya yaitu, bagaimana persepsi masyarakat terkait motif ekonomi di balik penyelenggaraan ibadah haji atau umrah yang semakin tinggi. Dengan daftar tunggu yang semakin lama tetapi juga semakin masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi daftar tunggu pemberangkatan haji ataupun umrah. Fokus kajian yang kedua ini akan dikaitkan dengan yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara modal sosial dan modal ekonomi ataupun materi yang harus dikeluarkan untuk mencapai kapital simbolik tersebut.

Rumusan ketiga yang menjadi fokus dalam buku ini yaitu bagaimana kemudian peran-peran para haji yang telah mendapatkan kapital simbolik dalam pergaulan di masyarakat dan dukungan untuk membangun sosial keumatan. Hal yang melatarbelakangi pertanyaan ini yaitu banyak fenomena di masyarakat yang terjadi, ketika seorang haji baru pulang dari Arab Saudi seolah ingin menjadi yang terdepan di dalam masyarakatnya, ingin disegani, dan ketika ada acara-acara kemasyarakatan malah lebih banyak menjadi penonton daripada turun tangan langsung. Ini menjadi hal yang ironi, di satu sisi ingin popularitas dengan kapital simboliknya yang menuntut diakui, di sisi lainnya tak banyak berperan aktif turun tangan di masyarakatnya.

B. Ekspektasi Sajian dalam Kajian Haji

Secara umum tujuan kajian buku ini dalam upaya menggali genealogi penyematan gelar haji yang dikukuhkan sebagai kelas sosial, lalu keterkaitan antara gelar tersebut dengan persepsi masyarakat atas motif ekonomi di balik penyelenggaraan haji atau umrah yang semakin tinggi. Tujuan praktis yaitu menggali secara kritis fenomena-fenomena haji yang kompleks dalam masyarakat Sasak, dalam upaya penyadaran kritis melihat manipulasi dari kapitalisme yang menyasar masyarakat muslim dengan legitimasi agama di balik ritual ibadah.

Tujuan akademis dalam kajian buku ini sebagai upaya dialektis dalam pengkajian fenomena agama yang terkomersialisasi secara massif, dan perlunya penyadaran kritis melihat fenomena keagamaan di baliknya. Penelitian ini juga bertujuan sebagai kritik budaya dalam masyarakat yang masih mempersepsikan haji sebagai kelas sosial yang perlu pengakuan dalam masyarakatnya. Haji dalam hal ini juga akan

dikaji dari sisi keterlibatan individu dalam pembangunan sosial keumatan, yang diikuti dengan modal sosial yang diakui di masyarakatnya.

C. Beberapa Rujukan Pengkajian Haji

Haji dalam masyarakat Sasak Lombok atau mungkin juga hampir semua masyarakat di Indonesia sejak dulu sampai saat ini masih menjadi hal yang paling diidam-idamkan untuk bisa tercapai. Haji selain sebagai penyempurna keislaman seseorang juga sebagai wisata yang bernilai ritual ibadah. Sejak dua dekade terakhir hasrat wisata itu yang lebih dominan daripada tujuan ibadahnya. Terlebih di masa pandemi, pelaksanaan haji dan umrah sempat ditutup, kini setelah dibuka lagi tentu lebih besar lagi gairah masyarakat yang tidak jadi berangkat tahun lalu.

Kajian tentang Haji di masyarakat Sasak ada beberapa yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu lebih melihat tradisi haji dari sisi antropologis mengeksplorasi ritual-ritual yang diselenggarakan sebelum keberangkatan haji ataupun setelah kembali dari Mekah.

L. Muhammad Ariadi, dalam penelitiannya *Haji Sasak: Sebuah Potret Dialektika Haji dan Kebudayaan Lokal* (2013), ia menyajikan sisi-sisi antropologis dari tradisi haji yang berkaitan dengan ritus di masyarakat Sasak. Ia membahas Haji sebagai salah satu ibadah inti dalam islam, menjadi ibadah yang mengaitkan islam dengan sejarah pemaknaan ajaran-ajaran tauhid pada tataran sosial sejak masa Nabi Ibrahim As. Hingga masa Nabi Muhammad SAW. Karena keterkaitan ini haji mensinergikan eksistensi kehajian secara individu,

dengan eksistensi sosial yang terkandung di dalam runutan ibadah haji.

Di Indonesia, sinergi kedua hal tersebut melahirkan pemahaman dan praktik keberislaman yang khas diantara berbagai komunitas kebudayaan di Indonesia. Makna-makna dan simbol haji sebagai kontrol sosial dan kebudayaan orang-orang Sasak yang menganut islam di Lombok, menjadi bukti nyata dari kekhasan tersebut. Begitu juga figur haji yang lahir dari konsistensi pelaksanaan makna-makna dan ajaran-ajaran haji, baik secara individu maupun sosial di masyarakat, telah menambah unik kekhasan tersebut.

Ritual haji berisi prosesi ritual yang pelaksanaannya berdasar pada runtunan syariat dan spiritual haji sebagai makna dan pesan yang terkandung di dalam ibadah haji, baik makna historis, sosial, keteladanan tokoh, ataupun keterkaitan dengan alam. Ritual ziarah melekat dalam haji karena haji merupakan hasil hubungan antara agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan merupakan hal yang melekat pada seorang penganut agama dan pada keduanya terdapat peran akal pikiran. Baik pada aspek keyakinan maupun aspek ibadahnya. Praktik agama akan selalu berinteraksi dengan budaya.

Melihat fakta tersebut, maka dapat dikatakan makna-makna spiritual dalam haji tidak selalu berkutat dengan pemaknaannya yang subyektif dan individual, melainkan pula terhubung secara nyata dengan dinamisasi pergerakan sosial dan kebudayaan. Dengan kata lain, memahami haji berarti pula memahami kebudayaan itu sendiri.

Penelitian tentang haji lainnya dalam konteks masyarakat Sasak dituliskan oleh Moh. Soehadha berjudul *Ritus Tuan Berpeci Putih : Haji dan Lokalitas Orang Sasak Di Tanah Merah* (2016). Soehadha

menuliskan dalam studinya tentang haji di kalangan muslim Sasak bahwa Haji sebagai ajaran Islam telah membangkitkan etos ekonomi orang Sasak, karena kolaborasi antara ajaran tersebut dengan tradisi ritus yang menyertai haji. Haji menjadi kelas sosial, yang dalam beberapa aspek menunjukkan sisi positifnya, yaitu telah membentuk cara berinteraksi, dimana orang-orang yang telah berhaji dituntut untuk memperkuat pemahaman agama dan juga melakukan mobilitas sosial ekonomi dalam lingkungannya.

Soehadha memfokuskan kajian tentang ritus-ritus dalam tradisi haji yang menyertai nilai-nilai agama yang menjadi tujuan. Hal itu juga ia kaitkan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat yang menuntut para haji untuk lebih menguatkan legitimasi melalui keilmuan agama. Sementara dalam penelitian ini fokus yang akan digali yaitu genealogi gelar haji sebagai kelas sosial yang diikuti dengan kapital simbolik di baliknya, Persepsi masyarakat tentang kapital simbolik dari gelar haji sebagai kelas sosial tersebut, lalu peran-peran seorang haji dalam masyarakatnya setelah adanya kapital simbolik dalam upaya pembangunan sosial keumatan.

Penelitian Fahrurrozi yang berjudul *Ritual Haji Masyarakat Sasak Lombok: Ranah Sosiologis-Antropologis* (2015), ia menyajikan ritus-ritus yang menjadi tradisi ketika ada yang berhaji dalam masyarakat Sasak. Ritus-ritus tersebut kaitannya dengan lokalitas masyarakat Sasak yang lekat dengan keislaman. Sebelum seseorang menunaikan ibadah haji, mereka harus melatih hatinya dengan perbuatan yang baik, terpuji, dan sikap ikhlas. Begitupun setelah mereka kembali seseorang tetap menjaga hatinya dengan memanifestasikan perbuatan-perbuatannya dalam wilayah sosial. Istilah “Ritual Behaji”

bukan sekedar orang yang telah mengunjungi Ka'bah di Mekah, tetapi proses pensucian diri melalui ibadah dan pemaknaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Fahrurrozi menyajikan data-data antropologis terkait ritus tradisi berhaji, sementara dalam penelitian ini lebih melihat pada terbentuknya stratifikasi sosial setelah seorang berhaji. Kajian yang dilakukan Fahrurrozi merupakan bentuk tulisan arsip budaya yang mungkin saja tradisi-tradisi tersebut sudah jarang dilaksanakan. Sementara dalam penelitian ini mencoba mengkaji relasi antara gelar haji tersebut dengan peran dari seorang haji di masyarakatnya. Begitu juga dengan persepsi masyarakat terkait gelar haji sebagai pembentuk kelas sosial akan digali secara genealogis prosesnya dengan menelusuri data-data sejarah.

Haji sebelum masa kolonial Belanda menjadi kelas sosial yang memiliki pengaruh dan kuasa dalam masyarakat. Ketika kolonialisme Karang Asem Bali masih bercokol, para Haji juga termasuk yang melakukan penggemblengan kepada masyarakat Sasak dengan ilmu-ilmu kebathinan yang disarikan dari Al Qur'an. Masa pemerintahan kedatuan (kerajaan) Selaparang Islam, para tokoh agama juga mempunyai andil besar melawan kolonialisme Bali.

Perjalanan haji yang mereka tempuh bukan perjalanan 8 jam di pesawat seperti saat ini. Tetapi membutuhkan waktu berbulan-bulan dan bahkan banyak yang meninggal sebelum sampai ke Makkah. Maka tak heran ketika masyarakat dulu pergi dengan niat berhaji maka akan menetap lama di Makkah sekaligus untuk belajar ilmu agama. Jadi haji mereka pun bukan sekedar gelar, tetapi keilmuan

agama yang juga menjadi legitimasi kapital simbolik yang melekat pada gelar haji tersebut.

Dalam konteks masyarakat Sasak pada awalnya, seorang haji yang baru pulang dari Makah akan mengajar agama (membuka pengajian) di rumahnya, atau di Mushalla, langgar di kampungnya. Ia kemudian akan disebut "Guru", sebagai bentuk penghormatan. Belakangan gelar Guru itu pun bertambah kata "Tuan" di depannya dan secara lengkap disebutkan juga gelar haji-nya sehingga menjadi Tuan Guru Haji (TGH). Haji yang disebut sebagai Guru merupakan representasi keilmuan agama yang secara rutin diajarkan di masyarakatnya.

Pada masa kolonial Belanda, seorang Haji menjadi tokoh sentral dalam melakukan perlawanan dengan mengorganisir massa dengan slogan jihad melawan penjajah. Selain merepresentasikan keilmuan agama, haji juga merupakan tokoh publik yang disegani di dalam masyarakatnya. Terlebih yang mengajarkan ilmu agama. Seorang haji juga akan dipersepsikan sebagai kelas sosial yang mempunyai kapital ekonomi yang mapan. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan melakukan perjalanan ke tanah suci Makkah dengan biaya yang tidak sedikit.

Seorang Haji akan diawasi betul oleh pemerintah kolonial Belanda terkait agitasi-agitasi yang sering dilancarkan dan merepotkan mereka. Haji-haji yang menjadi tokoh Nasional ada Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Misbach, Haji Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim dan masih banyak haji-haji yang lain yang tidak semuanya diulas sejarah perlawanan mereka.

Di konteks lokalitas di Lombok, ada Haji Umar Kelayu, Haji Saleh Sungkar, Haji Saleh Lopan, Haji Ali Batu, dan Haji-haji yang belakangan gelarnya berubah menjadi Tuan Guru. Haji Umar Kelayu dari sejarah yang banyak ditulis merupakan Guru yang melahirkan banyak Tuan Guru di kemudian hari, termasuk yang menjadi Pahlawan Nasional Tuan Guru Haji M. Zainuddin Abd. Madjid (Lombokbaratkab.go.id/tokob-islam-sasak-pada-masa-penjajahan-2/amp/)

Pada awal abad 20, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mempermudah kaum pribumi pergi ke tanah Suci demi melunturkan wibawa "haji" (Vredenburg, 1997 :6). Bahkan lebih jauh lagi Jacob Vredenburg menuliskan, Herman Willem Daendels mengeluarkan keputusan agar seorang haji (ia menyebutnya "pendeta Islam") yang menghasut rakyat diberi paspor "untuk bepergian dari satu tempat di Jawa ke tempat lain guna menghindari gangguan. Strategi pemerintah kolonial tersebut sebagai upaya membungkam gerakan-gerakan para haji untuk mengumpulkan massa yang akan melawan pemerintah kolonial.

Haji mulai menjadi perhatian pemerintah kolonial jika terjadi gejolak karena faktor agama, seperti yang diungkap F. de Haan dalam bukunya *Priangan : De Preanger-Regentschappen onder Het Nederlandsch Bestuur tot 1811, jilid II (1912)*. Ketika VOC masih bercokol, pegawai-pegawai kongsi dagang itu tidak pernah melihat ibadah haji dari sudut pandang politik. Makna politis ibadah haji baru dirasakan secara serius tatkala negara Hindia Belanda berdiri sebagai penerus kekuasaan VOC. Kekhawatiran tersebut dituangkan dalam ordonansi haji tahun 1825 yang berisi pembatasan jumlah haji yang berangkat

dengan pengetatan yang direalisasikan dengan menaikkan biaya haji (Ahsan, 2017).

Latar belakang Ordonansi itu terkait dengan lonjakan pengajuan paspor haji ke kantor imigrasi pada tahun 1824. Sebanyak 200 lebih penduduk pribumi mendaftar, hal ini dianggap oleh pemerintah kolonial sebagai potensi pemberontakan ketika mereka sudah menjadi haji dan membawa pikiran baru, yang jika diedarkan bisa memicu perlawanan. Beberapa pemberontakan-pemberontakan petani di paruh kedua abad 19 dipelopori oleh pemuka agama dan haji, sehingga membuat pemerintah kolonial menganggap haji sebagai urusan penting dan penuh kewaspadaan. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya *The History of Java* (2014) menyebut setiap orang Arab dari Makkah, maupun setiap orang Jawa yang kembali dari ibadah haji, di Jawa berlagak sebagai orang suci. Karena mereka (para haji) begitu dihormati, maka tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat agar berontak dan menjadi alat paling berbahaya di tangan penguasa-penguasa pribumi (hal. 3).

Beberapa dekade kemudian pada tahun 1859, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi baru yang memuat pemberlakuan semacam "ujian haji" bagi mereka yang baru pulang dari tanah suci. Mereka harus membuktikan benar-benar telah mengunjungi Makkah. Jika seseorang sudah dianggap lulus, maka ia berhak menyandang gelar haji dan diwajibkan menggunakan atribut atau pakaian khusus berupa peci putih, serban putih, atau jubah (Loir, 2013).

Dalam konteks lokalitas masyarakat Sasak, ujian haji itu masih berlaku sebagai bentuk uji publik atas seorang haji. Misalnya dengan

diminta menjadi imam shalat jamaah di masjid, Menjadi pimpinan acara tahlilan, zikiran, ataupun menjadi pembaca doa, *talqin* mayit. Uji publik itu berlaku dengan dalih mengambil berkah dari seseorang yang baru pulang dari Makkah.

Di Indonesia pun bukti sebagai haji itu dilegitimasi dalam bentuk sertifikat pernah melakukan ibadah haji. Bahkan seorang yang sudah meninggal dan dibadalkan haji berhak pula di depan namanya disebutkan gelar haji setelah kata Almarhum, dibuktikan dengan sertifikat badal haji.

Penyematan gelar haji itu juga berlaku untuk mempermudah kontrol terhadap para haji. Jika terjadi pemberontakan di suatu daerah dengan dalih agama, maka pemerintah kolonial tinggal mencomot haji-haji di daerah tersebut. Kekhawatiran atas haji-haji itu menurut Snouck Hurgronje perlu dilihat melalui sudut pandang statistik, bukan politik. Jemaah haji yang politis bukan mereka yang sekedar pergi haji kemudian pulang, melainkan orang-orang yang menetap lama di Makkah. Snouck juga menyarankan ada pemisahan dalam memandang Islam yang dianggap oleh pemerintah kolonial menaungi segalanya, baik politik, Spiritual, ritual, dan kultural. Pemerintah kolonial mengikuti gagasan Snouck dan mengimplementasikannya dalam bentuk Ordonansi haji yang baru. Pemerintah kolonial kemudian membuka kuota seluas-luasnya bagi pribumi yang ingin berhaji.

D. Konsep Praxis Sosial Pierre Bourdieu Sebagai Pisau

Analisis Pengkajian

Konsep praksis sosial yang dikemukakan Pierre Bourdieu meliputi *Habitus*, *field* (arena), modal (kapital), *Daxa* (dominasi simbolik), dan *distinction* (hasrat membedakan diri). Akan tetapi dalam buku ini yang dijadikan sebagai pisau analisis yaitu konsep kapital simbolik dan *distinction* karena lebih memudahkan penulis menarik benang merah dari konteks realitas yang akan dikaji.

Haji sebagai kelas sosial di masyarakat pinggiran dengan tingkat religiusitas yang tinggi tentunya menjadi kapital simbolik bagi siapa yang mendapatkan sematan gelar itu. Konsep kapital simbolik di sini dipinjam dari pemikiran Pierre Bourdieu (1990), seorang sosiolog dan filsuf neo-marxis Prancis. Konsep Kapital yang dikemukakan Bourdieu dirangkum dalam satu garis besar yang ia sebut Praksis Sosial (*social practice*). Praksis sosial ini meliputi *Habitus*, *Field* (arena), Modal (kapital), dan *Distinction*.

Konsep kapital dan *distinction* akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menelusuri rumusan-rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Kapital simbolik bisa diartikan sebagai sebuah kondisi atau pemosisian (*positioning*) seseorang di masyarakatnya menduduki kelas sosial yang berbeda karena adanya modal tertentu yang ada pada diri seseorang tersebut (Haryatmoko, 2016: 42). Modal (kapital) simbolik yang ada pada seorang haji adalah mereka yang dianggap sebagai orang yang sudah sempurna keislamannya merujuk pada rukun Islam yang 5 menempatkan haji menjadi urutan terakhir.

Selain kapital simbolik yang ada pada seorang haji, kapital ekonomi juga merupakan hal yang lebih dulu ada atau diakui di

masyarakatnya. Seperti yang diuraikan pada bagian latar belakang, biaya-biaya untuk penyelenggaraan haji ataupun pra penyelenggaraan haji bisa lebih besar dari ongkos naik haji itu sendiri. Kapital ekonomi untuk menyelenggarakan ibadah haji, lalu yang dihasilkan adalah kapital simbolik pada sematan gelar haji itu sendiri, yang seolah menjadikan seseorang menempati posisi kelas sosial yang lebih dari masyarakat biasanya.

Kapital simbolik dari gelar haji itu adalah hal yang tidak secara tiba-tiba muncul. Tetapi ini menjadi habitus dalam masyarakat, setiap orang yang baru pulang dari Arab Saudi dan memakai peci putih adalah haji yang kemudian mendapat pengakuan dalam masyarakatnya. Tetapi pengakuan atas haji ataupun kapital simbolik yang melekat padanya ada mekanisme yang berlaku di masyarakat terkait itu. Terkadang, tidak serta merta kapital simbolik di balik gelar haji itu langsung melekat pada seseorang. Ada yang dites dahulu di masyarakatnya, salah satunya menjadi imam shalat di masjid, ataupun menjadi pemimpin acara-acara tahlilan di tengah masyarakat.

Ketika mekanisme tes-tes yang dijadikan sebagai ajang uji publik untuk seorang haji bisa dilalui, tentu kapital simbolik itu akan mengikuti. Tetapi jika tidak bisa dilalui, misal tidak bisa menjadi imam shalat di masjid, ataupun tidak bisa menjadi pemimpin acara tahlilan di masyarakat, maka cemoohan yang akan muncul. Bahwa hajinya sekedar jalan-jalan, atau bisa juga dicap bukan haji mabrur. Kapital simbolik dalam gelar haji itu juga menjadi hal yang memapankan kelas sosial. Hal ini bisa kita telusuri melalui perilaku yang menjadi habitus dalam masyarakat, misalnya dalam shaf shalat jamaah di masjid, peci putih seorang haji mendapat porsi pada shaf terdepan. Begitu juga

ketika ada acara-acara di masyarakat, kelompok haji akan menduduki tempat yang berbeda dengan yang tidak haji.

Kapital simbolik di balik gelar haji ini awalnya menjadi strategi kolonial belanda untuk mengelompokkan masyarakat. Seorang Haji pada masa kolonial menjadi ikon perlawanan yang menggerakkan massa untuk menggulingkan kezhaliman. Haji-haji yang menjadi pelopor perlawanan tidak hanya fisik, tetapi juga intelektual. Mereka membangun strategi-strategi untuk melawan pemerintah kolonial dengan mendirikan tempat-tempat pengajian awalnya, kemudian berkembang menjadi pesantren.

Tetapi strategi para haji itu pun tercium oleh pemerintah kolonial sehingga mereka mengutus salah seorang antropolog, Snouck Hurgronje untuk menyelidiki gerakan-gerakan para haji baik semasa di Makkah ataupun di wilayah Nusantara (Ivan Aulia Ahsan, 2017). Di Lombok pun terjadi hal serupa, ketika Kolonialisme Karang Asem Bali masih berkuasa, para haji juga mengambil peran dengan menjadikan kolonialisme Belanda sebagai aliansi untuk menyingkirkan Bali (Laffan, 2011).

Haji kemudian menjadi hal yang prestisius karena tidak semua orang memiliki kapital ekonomi untuk melaksanakan itu. Lebih jauh, kapital simbolik pada gelar haji adalah hal yang masih perlu penelusuran untuk membuktikan bahwa gelar haji pada masa lampau dan saat ini apakah masih melekat kapital simbolik itu sendiri, ataukah sudah terbentuk habitus baru di balik ekspansi kapitalisme menyasar masyarakat muslim dengan tawaran-tawaran pasar turisme pelaksanaan haji dan umrah.

Konsep kedua dari Bourdieu untuk menelusuri pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yaitu *Distinction* (hasrat untuk membedakan diri). *Distinction* yang dikemukakan Bourdieu yaitu terkait pilihan, termasuk gaya hidup untuk membedakan diri dari orang lain (1984). Gelar haji yang diperoleh melalui rangkaian pengorbanan kapital ekonomi, kemudian menjadi kapital simbolik adalah bagian dari agenda untuk membedakan diri dan menunjukkan kelas sosial mana seorang yang telah berhaji. Tentu hal ini tidak bisa digeneralisir pada semua yang pernah berhaji. Tetapi penelusuran atas fenomena ekspansi kapitalisme yang masif dalam penyelenggaraan haji dan umrah menjadi penanda bahwa strategi *distinction* dalam gelar haji yang ingin ditunjukkan adalah upaya untuk membedakan diri.

Strategi *distinction* ini bukan saja dalam bentuk simbolik berupa sematan gelar, ataupun apa yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dikonsumsi, di mana bertempat tinggal, membeli barang bermerk juga menjadi bagian dari strategi tersebut (Sjams, 2005). Dalam konteks haji dan umrah hasrat untuk membedakan diri terlihat dari pilihan-pilihan travel yang dijadikan preferensi, termasuk juga pilihan menggunakan ONH biasa atau ONH Plus. Pilihan-pilihan travel ataupun badan penyelenggara ibadah haji (BPIH) terkait dengan titik-titik lokasi kedekatan dengan masjidil Haram. Semakin dekat dengan masjidil Haram, semakin besar biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

Kedua konsep dari praksis sosial tersebut menjadikan haji ataupun umrah memiliki nilai gengsi dan seakan menjadi legitimasi atas konstruksi kelas sosial ataupun strategi *distinction* dalam masyarakat. Kapital simbolik haji juga menjadi legitimasi atas

ketokohan keagamaan. Bahkan dalam satu masyarakat seperti yang sudah diulas sebelumnya, shaf jamaah pun bisa terkavling dengan kapital gelar haji tersebut. Begitu juga ketika acara-acara selamatan atau hajatan masyarakat seorang haji lebih didahulukan dibanding yang belum berhaji. Penyebutan dalam masyarakat pun menjadi lebih tinggi dengan sebutan "*Tuan Haji*", di masyarakat Sasak Lombok misalnya.

Sementara *distinction* yang lebih menonjol dari gelar haji bisa dilihat dari kostum sehari-hari. Semula seorang yang belum berhaji berpakaian apa adanya, ketika sudah menjadi haji akan dikonstruksi sedemikian berwibawa. *Distinction* adalah strategi kelas sosial untuk menunjukkan posisi mereka dalam masyarakat dan keinginan untuk menempatkan diri dalam tangga kekuasaan (Bourdieu, 1979).

E. Konsep Metodologis Pengkajian Haji dalam Buku ini

Paula Saukko dalam bukunya *Doing Research in Cultural Studies* (2003) mengemukakan konsep etnografi baru (*New ethnography*) yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan penelitian dalam kajian budaya, masyarakat terpinggirkan (subaltern), ataupun masyarakat beragama. Konsep etnografi baru Sauko dalam hal ini yang bisa dijadikan sebagai metode penelitian ini di antaranya konsep *self reflexivity* (refleksi diri), *self & other* (diri dan yang liyan), dan *Polivocality* (polivokalitas) (Saukko, 2003: 55-73). Konsep refleksi diri berkaitan dengan pengamatan dalam masyarakat peneliti sendiri yang masih menjadikan gelar haji sebagai kapital simbolik untuk membedakan diri sebagai kelas sosial yang berbeda.

Refleksi diri ini juga menjadi semacam konsep untuk mengukur posisi peneliti dalam melihat fenomena dalam masyarakat terkait kapital budaya pada gelar haji, dan hasrat untuk membedakan diri dari para pelakunya yang lebih ditonjolkan dengan pilihan-pilihan gaya hidup ataupun pengakuan dalam masyarakatnya sebagai legitimasi kelas sosial yang lebih tinggi.

Konsep *Being self & other*, antara diri dan yang Liyan ditelusuri melalui strategi-strategi pembedaan diri antara haji sebagai self, dan orang yang tidak berhaji sebagai *the other* (Liyan). Dalam hal ini diri pada seorang haji menjadi kelas sosial dominan yang juga mempunyai kuasa dalam masyarakatnya dengan kapital simbolik yang mengiringi. Sementara *the other* (Liyan) masyarakat biasa menjadi pihak yang melegitimasi atas kapital simbolik pada gelar haji, dan merekapun menerima itu secara *taken for granted* sebagai sebuah habitus dalam masyarakat.

Konsep selanjutnya yaitu polivokalitas yang dimaknai sebagai keragaman suara. Keragaman suara dalam hal ini menjadi acuan dalam menggali informasi terkait masyarakat yang menjadi objek penelitian ataupun informan yang beragam. Suara-suara dari kelompok haji yang menganggap *taken for granted* gelar haji sebagai kapital simbolik, dan wajar adanya ada pembedaan (*distinction*) dalam masyarakat, tentu akan berbeda dengan suara-suara yang non-haji melihat itu sebagai sebuah hasrat untuk berkuasa.

Keragaman suara ini kaitannya dengan penyajian secara berimbang antara pandangan-pandangan tentang hal yang menjadi permasalahan penelitian yang digali dari sumber-sumber yang mewakili suara-suara tersebut. Penyajian atas suara-suara yang

beragam dari yang dianggap pusat sampai kepada yang dianggap pinggirannya adalah untuk menunjukkan posisi peneliti yang menyajikan secara objektif suara-suara tersebut. Atkinson & Hammersly (2007:3) berpendapat bahwa adanya beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam etnografi, masyarakat yang menjadi subjek kajian, dipelajari dalam konteks sehari-hari, tanpa adanya tekanan atau pengkondisian oleh peneliti.

Sedangkan metode yang lebih teknis dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan pemilihan-pemilihan narasumber yang menjadi tokoh sentral yang mewakili pihak haji, pihak non-haji maupun pengusaha-pengusaha travel atau KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Wawancara dilakukan dengan menggali secara mendalam pandangan tentang haji dan umrah yang menjadi kapital simbolik, ataupun ada hasrat untuk membedakan diri dari seorang haji di masyarakatnya.

Sementara wawancara dengan informan non-haji yakni menggali pandangan terkait haji yang menjadi representasi kelas dominan dalam masyarakat dengan kapital simboliknya, apakah pengakuan dari masyarakat itu sesuatu yang dikonstruksi dan diterima secara *taken for granted*, ataukah ada resistensi atas itu. Termasuk di dalamnya resistensi atas motif ekonomi yang lebih dominan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Metode observasi dilakukan dengan mengikuti acara-acara di masyarakat terkait asumsi dasar perbedaan antara haji dan non-haji, juga untuk mengamati strategi-strategi dari distinction yang ditonjolkan oleh haji. Observasi juga dilakukan dengan membaur dan

menjadi bagian dari masyarakat dengan berpegang pada konsep refleksi diri, bahwa tugas utama peneliti yaitu menyajikan keragaman suara (polivokalitas) terkait pembedaan diri antara haji sebagai Self, dan masyarakat biasa sebagai the other.

Metode observasi dan wawancara juga dilakukan dengan menelusuri pilihan-pilihan travel yang dijadikan sebagai preferensi dalam melaksanakan haji atau umrah. Wawancara dilakukan dengan pengusaha-pengusaha travel yang juga semakin menjamur saat ini terkait apakah motif ekonomi mengejar profit yang lebih dominan tersebut justru menunjukkan ekspansi kapitalisme menyasar masyarakat Islam.

Teknik studi pustaka dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber publikasi atau dokumentasi terkait haji dan umrah yang bisa diakses baik secara online ataupun offline untuk mengembangkan pemikiran terkait konteks penelitian. Pustaka-pustaka tentang haji dari masa kolonial bisa menjadi referensi untuk menambah wawasan dan keluasan eksplorasi dalam penelitian ini.

F. Sistematika Sajian Buku

Bab II membahas Tradisi Haji Masyarakat Sasak beserta ritus-ritus yang menyertainya. Bab III membahas genealogi haji dan umrah yang menjadi pembeda kelas sosial dalam masyarakat, dalam hal ini masyarakat Sasak yang menjadi lokus penelitian secara keseluruhan menjadi representasi di 5 kabupaten/kota di Lombok yang berbeda persepsi terkait haji sebagai modal sosial tersebut.

Bab IV membahas pertanyaan penelitian terkait persepsi masyarakat tentang motif ekonomi di balik penyelenggaraan ibadah

haji atau umrah yang semakin tinggi. Dengan daftar tunggu yang semakin lama tetapi juga semakin masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi daftar tunggu pemberangkatan haji ataupun umrah. Pembahasan pada bab ini dikaitkan dengan pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu hubungan antara modal sosial dan modal ekonomi ataupun materi yang harus dikeluarkan untuk mencapai kapital simbolik tersebut.

Pada Bab IV juga disajikan pembahasan terkait peran-peran subyek haji yang telah mendapatkan kapital simbolik dalam pergaulan di masyarakat dan dukungan untuk membangun sosial keumatan. Pembahasan ini terkait dengan banyaknya fenomena di masyarakat yang terjadi, ketika seorang haji baru pulang dari Arab Saudi seolah ingin menjadi yang terdepan di dalam masyarakatnya, ingin disegani, dan ketika ada acara-acara kemasyarakatan malah lebih banyak menjadi penonton daripada turun tangan langsung. Ini menjadi hal yang ironi, di satu sisi ingin popularitas dengan kapital simboliknya yang menuntut diakui, di sisi lainnya tak banyak berperan aktif turun tangan di masyarakatnya. Dan terakhir bab V sebagai penutup dan simpulan.

BAB II

HAJI DI MASA-MASA AWAL ISLAM PADA MASYARAKAT SASAK

Siapa yang pertama kali berangkat Haji dalam masyarakat Sasak belum ada penelitian secara historis yang komprehensif menunjukkan itu. Tetapi dari beberapa literatur terkait jaringan ulama ataupun tuan guru dinyatakan bahwa para Tuan Guru awal di Lombok yang mempunyai jaringan di Haramain ketika berangkat Haji menjadi referensi bahwa mereka ke Makkah bukan sekedar berhaji, tetapi juga belajar di sana, termasuk di Madrasah Shaulatiyah, ataupun madrasah yang dikelola oleh ulama-ulama Nusantara yang ada di Makkah. Istilah Martin Van Bruinessen menyebut Makkah sebagai sumber ngelmu (Bruinessen, 1993). Tuan Guru Abdul Ghafur, Tuan Guru Umar Kelayu misalnya yang disebut-sebut sebagai Tuan Guru awal, dalam buku Michael Laffan menyebut jaringan intelektualnya di Makkah juga dibawa oleh intelektual yang disebut Amaq Baok, atau Datoq Baok yang dalam gambar sketsa juga menjadi sampul buku Laffan. Datoq Baok ini bahkan dalam tulisan Said menyebut ia lebih dulu dari Tuan Guru Umar sebagai pengajar ilmu agama di Lombok bagian Timur (Said, 2021).

Begitu juga dengan Tuan Guru Amin Sesela, Tuan Guru Rais Sekarbela, dan Tuan Guru Saleh Hambali merupakan frontier-frontier awal keberangkatan Haji masyarakat Lombok yang dianggap juga membangun jaringan untuk meng-hajikan murid-muridnya untuk belajar di Makkah (Lukman, 2004). Termasuk juga H. Abd. Madjid, ayah dari TGKH. M. Zainuddin Abd. Madjid, pendiri

organisasi Nahdhatul Wathan juga bisa dikatakan sebagai rombongan-rombongan awal para Haji yang menetap dan sempat belajar di Makkah.

Bisa jadi juga ketika Islam pertama kali diterima oleh Raja dari kedatuan Selaparang sehingga menjadi agama yang dianut semua masyarakat di bawah kekuasaan Selaparang, cukup memungkinkan keturunan elit-elit kedatuan Selaparang diberangkatkan ber-haji dan menetap untuk belajar di Makkah. Tuan Guru Zainuddin Arsyad yang menjadi pendiri Yayasan Perguruan Maraqitta'limat di Mamben Lauq juga banyak yang merujuk sebagai keturunan raja Selaparang, Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abd. Madjid juga dirunut dari silsilah ke atas banyak yang menyebut sebagai keturunan raja Selaparang. Artinya, tidak menutup kemungkinan di masa-masa awal Islam diterima oleh masyarakat Sasak ada keturunan elit-elit Selaparang yang dikirim ke Makkah untuk menimba Ilmu agama dan sepulangnya juga menjadi penyebar Islam. Keturunan-keturunan Tuan Guru ataupun murid-murid Tuan Guru yang dianggap memiliki potensi secara tidak langsung akan menjadi tuan guru selanjutnya, kemudian dilegitimasi oleh gelar haji setelah berangkat berhaji dan belajar di Makkah.

Haji dalam keyakinan masyarakat Sasak secara umum adalah ibadah yang bukan saja sebagai penyempurna rukun Islam, tetapi juga kaitannya dengan ritual-ritual yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang benar-benar mendapatkan panggilan sebagai tamu Tuhan. Oleh karena itu kepasrahan dan keyakinan masyarakat Sasak bahwa seorang tamu itu diundang, maka yang bukan tamu tak perlu memaksakan diri menjadi tamu. Akan tetapi upaya-upaya agar bisa

menjadi tamu Tuhan melalui panggilan haji menjadi tujuan di balik motif-motif ekonomi yang dikumpulkan oleh masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak lebih dominan menjadi petani, dan hasil-hasil pendapatan dari bertani itu dikumpulkan untuk menjadi biaya-biaya memenuhi panggilan Tuhan sebagai tamu.

Masyarakat Sasak yang berprofesi lain pun juga menjadikan tujuan dari kerja-kerja ekonomi mereka mengumpulkan kekayaan untuk dijadikan sebagai biaya untuk berhaji. Bahkan dalam salah satu lirik lagu qasidah yang cukup populer sering diputar di rumah calon haji sebelum keberangkatan yaitu "Sungguh mulia, pedagang kaki lima, yang menanggung hidup, istri dan anak-anaknya, berpenghasilan tak seberapa, tapi ternyata bisa naik haji, memenuhi panggilan Ilahi". Pedagang-pedagang asongan, kusir becak, tukang bangunan ataupun amaq-amaq yang memelihara ternak, mereka mengumpulkan uang selalu diselipkan niat untuk berangkat ber-haji.

Haji Idin misalnya, seorang kusir becak yang masih mangkal di pasar Apitaik, Lombok Timur, ia bercerita pergi berhaji tahun 1996, dari hasil menjadi kusir becak yang ia kumpulkan cukup lama. Panggilan itu datang ketika ia tergerak untuk pergi berhaji sewaktu ada tetangga dekat rumahnya yang akan berangkat, dan seperti biasanya masyarakat juga membantu segala persiapannya, termasuk menghadiri zikir-zikir doa untuk keberangkatan calon haji, dari situlah ia semacam merasakan keharuan sekiranya ia juga bisa berangkat haji. Di tahun berikutnya, ia pun mendaftar dari hasil tabungannya menjadi kusir, dan tak disangka ia berangkat juga di tahun itu. Ketika akan berangkat berhaji ia juga dibantu oleh para tetangga untuk mempersiapkan semua keperluan, termasuk persiapan

begawe (hajatan), zikir malam sebelum keberangkatan, dan ziarah ke makam-makam wali atau yang dianggap keramat di Pulau Lombok.

Haji Idin bercerita, tahun sebelum ia berangkat selalu paling awal datang ke acara zikiran di rumah calon haji, dan ia terus mengingatkan tetangganya yang akan berangkat haji tersebut agar bersedia mendoakannya sesampainya di depan Ka'bah nantinya. Bahkan bukan hanya dirinya, tetangga-tetangga yang datang zikir juga berharap yang sama, dengan doa yang tulus mereka mendoakan calon haji agar mendapatkan haji mabrur, selamat dalam perjalanan ketika pergi dan kembali (Wawancara dengan Haji Idin, Apitaik, 2022).

Setiap kali ada anggota masyarakat di kampung mereka yang akan berangkat haji, masyarakat Sasak bisa dipastikan akan selalu antusias untuk menyambut dan membantu persiapan-persiapan sebelum keberangkatan. Dengan harapan yang sama supaya mereka juga bisa berangkat haji, minimal akan mendapatkan doa dari calon haji ketika sampai di Makkah. Solidaritas sosial yang terbangun dalam tradisi menyambut keberangkatan calon haji ini lebih kepada sisi emosional yang muncul dengan bayangan-bayangan ke depannya mereka juga bisa bernasib sama seperti calon haji saat itu.

A. Haji Sebagai Perjalanan Spiritualitas

Seperti yang diulas pada bagian awal tulisan ini bahwa perjalanan haji bagi orang nusantara dahulu seperti halnya perjalanan antara hidup dan mati. Bahkan mengantar jamaah haji yang dulunya menggunakan kapal tak ubahnya seperti mengantar orang yang seolah tak kembali. Maka persiapan perbekalan dibawa sebanyak-banyaknya mampu ditampung, karena kondisi yang ditemui juga tak ada yang pasti. Bahkan bisa saja mereka sampai di Makkah sudah lewat musim

haji, yang artinya mereka harus menetap di Makkah sembari menunggu musim haji berikutnya.

Salah seorang tokoh di Mamben Daya bernama Haji Kholil pernah mengungkapkan bahwa perjalanan haji seolah mengantar orang mengarungi kematian karena beratnya perjalanan yang akan ditempuh. Diceritakan bahwa jamaah yang akan berhaji membawa tidak hanya membawa perbekalan, bahkan juga kain kafan dan peti yang cukup besar berukuran 3 X 3 meter sebagai tempat menyimpan perbekalan, istilah Sasaknya menyebutnya "*sabre*". Peti besar itu juga bisa menjadi peti jenazah, jika sewaktu-waktu hal-hal buruk terjadi di tengah lautan, mereka sudah menyiapkan itu sekiranya tidak bisa kembali kempung halamannya. Bekal pisang hijau yang mentah dan besar-besar bahkan menjadi analogi hingga dinamakan *puntiq kapal* (pisang kapal) pada masyarakat Sasak. Perjalanan haji bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan di atas kapal sebelum bisa sampai di tanah suci. Maka tak heran mereka juga memanfaatkan waktu untuk berdiam di Makkah dan menuntut ilmu. Pemaparan keilmuan agama sembari menunggu waktu menunaikan haji menjadikan orang-orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini di kemudian hari menjadi pelopor penyebar-penyebar Islam di tingkat lokal (Wawancara dengan Akwan, 17 Juli 2022).

Misalnya haji Umar di Kelayu sebelum populer dengan sebutan Tuan Guru Haji Umar Kelayu merupakan jamaah haji yang berkesempatan menimba ilmu di Makkah cukup lama sebelum kembali ke kampung halaman dan menjadi pelopor untuk membangun intelektual keagamaan di masyarakatnya. Begitu juga dengan Haji Abdul Madjid, bapak dari TGH. Muhammad Zainuddin

Abd. Madjid juga merupakan haji pelopor yang mengajar ilmu agama di kalangan masyarakat bawah, sampai Tuan Guru Muhammad Zainuddin atau yang populer kemudian disebut Maulanasyaikh juga seorang haji di awal abad 20 yang secara kemampuan ekonomi orang tuanya cukup mapan untuk memberangkatkan haji sekaligus menyekolahkan beliau di Madrasah Shaulatiyyah di Makkah.

Masyarakat Sasak awal mengimajinasikan Makkah selalu sebagai tujuan di balik kerja-kerja ekonomi yang dilakoni. Hasil tani yang dijual uangnya disimpan untuk persiapan berangkat haji. Di wilayah Mamben dan sekitarnya mayoritas masyarakat sebagai petani, kerja-kerja mereka di sawah atau ladang hasilnya dikumpulkan untuk tabungan haji, setelah disisihkan dari biaya kebutuhan sehari-hari.

Berangkat Haji pada masa-masa dahulu di masyarakat Sasak bukan sekedar mampu secara ekonomi menyiapkan kebutuhan dan biaya perjalanan, tetapi juga mampu secara mental dan intelektual keagamaan untuk menjalankan ritual haji. Definisi mampu kemudian direduksi menjadi mampu membayar ongkos haji pada masa sekarang. Tak heran haji-haji pada masa dahulu selain kaya dalam hal ekonomi juga sebagai elit agama dengan sebutan tuan guru, tuan haji, atau sebutan-sebutan lainnya yang identik sebagai pemimpin agama, atau istilah Azyumardi Azra menyebutnya fungsionaris agama (Azra, 1999).

Istilah Tuan Haji bukan semata-mata legitimasi karena sudah pernah berangkat haji, tetapi terminologi tuan itupun terdapat kapital ekonomi di dalamnya untuk menyebut orang kaya oleh buruh atau pekerja yang bekerja di tempat-tempat orang kaya. Karena itu haji juga mempunyai motif ekonomi untuk meneguhkan posisi seseorang

dalam hal ekonomi (Ariadi, 2013). Terminologi tuan haji untuk menyebut orang yang sudah berhaji juga menjadi kapital simbolik atas intelektualitas keagamaan yang dianggap mapan pada mereka. Untuk haji pada masa dahulu bisa jadi seorang haji cukup mapan dengan keilmuan agama, disebabkan mereka bisa cukup lama berada di Makkah sembari menunggu masa ibadah haji ataupun masa menunggu kepulangan diisi dengan belajar ilmu agama di majelis-majelis yang ada di Masjidil Haram.

B. Perubahan Nama dan Gelar Sebagai Identitas Subyek Haji.

Sesampainya di kampung halaman para haji biasanya akan mendapatkan nama baru tergantung pada nama yang mereka inginkan sebagai sematan di belakang gelar haji. Misalnya seorang laki-laki atau perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan amaq/inaq (bapak/ibu) lalu diikuti dengan nama anak pertama itulah yang disebut nama "per-ame" atau ada juga yang menyebut "per-aman" artinya nama sematan ketika menjadi seorang bapak diikuti dengan nama anak pertama. Contohnya, Husnul mempunyai anak pertama bernama Ahmad, maka ia akan dipanggil amaq Ahmad, atau dalam bahasa Indonesia menjadi Bapak Ahmad. Akan tetapi cukup jarang seorang laki-laki akan dipanggil nama "perame-nya" jika anak pertama perempuan, ia akan tetap dipanggil dengan nama aslinya. Lalu nama-nama itu bisa berubah ketika selesai melaksanakan ibadah haji. Atau ada juga yang menanyakan ke orang-orang alim di Makkah untuk pergantian namanya menjadi lebih baik.

Misalnya H. Syahrul Haq nama aslinya Ritanom, kemudian ia mempunyai anak pertama bernama Rizki sehingga dipanggil Amaq

Rizki lalu setelah berhaji ia mengubah nama menjadi haji Syahrul Haq, konon nama itu ia dapatkan di Makkah setelah meminta pertimbangan orang alim yang ada di sana untuk perubahan namanya. Perubahan nama setelah menunaikan ibadah haji juga cukup mapan terjadi pada masyarakat Sasak Wetu Telu yang ada di Lombok Utara. Nama-nama Sasak yang lekat dengan mereka seolah tidak cukup seimbang jika disandingkan dengan gelar Haji di depan. Tak jarang juga legitimasi bahwa nama juga sekaligus doa menjadi hal yang sering dijadikan dalih untuk pergantian nama tersebut.

Haji zaman dulu pada masyarakat Sasak juga biasanya diberangkatkan oleh guru mereka, artinya Guru mereka yang sudah pernah berhaji akan memerintahkan muridnya untuk melanjutkan pelajaran di Makkah dengan modal dan persiapan keberangkatan akan ditanggung oleh sang guru. Guru dalam hal ini adalah orang-orang yang mapan dengan intelektualitas keagamaan sehingga menjadi pembimbing di masyarakat untuk urusan agama. Akan tetapi bisa juga seorang guru belum berhaji tetapi karena keilmuan keagamaan yang dikuasai menjadikannya tokoh agama.

Sebelum berangkat berhaji orang-orang Sasak dahulu biasanya akan mematangkan lebih dulu ilmu agama sebagai bekal menjalankan ibadah haji nantinya. Mereka belajar atau bahkan bisa disebut privat ke guru-guru agama yang kemudian juga menjadi mentor mereka dalam memahami ritual-ritual ibadah haji. Guru saleh misalnya di Mamben dengan keilmuan agama yang cukup mapan menjadi pembimbing bagi orang-orang yang belajar agama kepadanya sebelum berangkat berhaji meski ia belum berhaji. Tetapi karena pemahaman keagamaannya dengan akses referensi-referensi primer

seperti kitab kuning, bahasa Arab yang baik, bahkan kitab-kitab Nahwu, matan jurumiyah sudah dihapal, sehingga ia sebenarnya sudah layak disematkan gelar tuan guru. Akan tetapi legitimasi gelar Tuan Guru pada masyarakat Sasak dahulu cukup sulit didapatkan karena salah satu syaratnya yaitu minimal pernah belajar di Makkah ataupun pernah melaksanakan Ibadah Haji, maka gelar guru pada Guru Saleh hampir sama sebenarnya dengan gelar ustadz (Wawancara dengan H. Zulhalqi Amin, 15 Mei 2022).

Karena tidak sembarang orang bisa menunaikan ibadah haji disebabkan mahalannya biaya-biaya perjalanan haji, maka menjadi tradisi dalam masyarakat untuk memuliakan calon haji dengan sebutan tamu Allah SWT. Mereka menaruh harapan besar pada calon haji seperti halnya supaya mereka didoakan agar bisa menjadi Tamu Allah juga di tahun-tahun berikutnya. Berangkat haji pada masyarakat Sasak dulunya terdapat dua pelabuhan yang menjadi akses untuk kapal laut membawa jamaah haji. Salah satunya di Lombok Timur di bagian selatan Kota Selong sebagai ibu kota distrik dulunya terdapat pelabuhan yang juga sekaligus menjadi nama desa yakni Labuan Haji. Pelabuhan yang ada di wilayah tersebut lautnya semakin ke selatan akan semakin dekat dengan laut lepas yakni laut samudra Hindia. Pelabuhan lainnya yaitu di Ampenan yang memang menjadi kota perdagangan pada masa lampau, bahkan pedagang-pedagang Arab di Makkah cukup mengenal pelabuhan Ampenan hingga sering disematkan pada nama orang-orang yang berasal dari Lombok, salah satunya Maulanasyaikh M. Zanuddin Abd. Madjid yang digelar al ampanani di belakang nama beliau.

Mode pelayaran menuju Makkah dalam pelaksanaan ibadah haji memakan waktu 3 hingga 4 bulan lamanya berada di kapal. Tak heran bekal yang dibawa menggunakan Sahre' atau peti berukuran besar sebagai tempat menyimpan logistik dikhususkan ada satu orang yang bertugas menjaga. Perjalanan spiritual sebelum sampai di Makkah di atas kapal juga biasanya akan dilanjutkan dengan pendalaman rukun-rukun dan amalan selama menjalani ibadah haji nantinya. Sementara di rumah calon haji, selama perjalanan akan diadakan doa bersama untuk kelancaran dan keselamatan para rombongan yang berangkat haji. Istilah zikir pelayaran juga berlaku dalam hal ini bagi calon haji.

C. Haji Sebagai Upaya Pencarian Atas Makna Kepasrahan.

Berhaji pada masa dahulu di masyarakat Sasak juga sebagai bentuk kepasrahan, penyerahan diri menuju Baitullah sebagai tamu Allah yang benar-benar dilandasi iman. Sebab perjalanan yang ditempuh bukan hal mudah, dan harus benar-benar persiapan mental dan tekad yang kuat untuk menjalankan ibadah semata-mata karena Allah SWT. Maka prosesi melepas calon haji seolah memasrahkan juga kepada kehendak Allah SWT yang Maha segalanya pada diri si calon haji. Artinya, keluarga si calon haji juga sudah menyiapkan mental menghadapi kondisi apapun yang dialami calon Haji, terutama hal ini dilegitimasi dalil-dalil agama bahwa seorang yang hajinya mabrur, tiada lain balasannya kecuali surga. Hal ini juga menjadi keistimewaan bagi orang yang pernah berhaji bahwa keislaman mereka sudah sempurna dengan terpenuhinya semua rukun Islam dan haji sebagai rukun pamungkas.

Seperti halnya Rasulullah SAW melaksanakan haji hanya sekali selama beliau hayat, maka masyarakat Sasak dahulu cukup meyakini haji sebagai puncak ibadah sekali seumur hidup. Hal ini cukup wajar karena akses perjalanan yang tidak mudah, butuh waktu dan tenaga yang kuat, begitu juga dengan modal ekonomi yang tidak sedikit yang harus disiapkan. Maka haji-nya seorang di masyarakat Sasak cukup berterima jika di balik gelar haji tersebut juga terdapat kapital simbolik. Kapital simbolik dalam hal ini kaitannya dengan posisi seorang haji dalam masyarakat yang dianggap memiliki hal yang lebih pada dirinya, baik itu keilmuan agama, keshalihan, kedermawanan maupun sisi-sisi sosial lainnya yang dianggap mapan.

Secara umum genealogi haji dalam masyarakat Sasak seperti halnya pada masyarakat muslim di daerah lainnya di Indonesia belum ada catatan resmi yang menjadi bukti otentik siapa yang pertama kali pergi berhaji. Para tuan guru awal yang menyebarkan Islam di Lombok pada awal abad 19 beberapa memang bergelar Tuan Guru Haji, dan mereka juga rata-rata pernah menetap di Makkah untuk belajar agama. Akan tetapi beberapa masyarakat yang bisa disebut Awam dan juga pernah berhaji meski tidak bergelar Tuan Guru, juga menjadi pelopor di masyarakat untuk mengajarkan agama. Artinya legitimasi gelar haji juga menjadi kapital sosial untuk seseorang diakui dalam masyarakatnya sebagai elit.

Catatan-catatan tentang perjalanan haji di masa dahulu beberapa sudah disajikan di bagian pendahuluan merujuk karya-karya peneliti terdahulu. Dalam konteks masyarakat Sasak secara historis belum ada riset yang komprehensif menyajikan siapa dan kapan orang Sasak pertama kali berhaji, akan tetapi merujuk cerita-cerita lisan

orang-orang tua dahulu bahwa secara turun-temurun seorang haji akan menghajikan juga anaknya minimal satu di antara semua anak yang dimiliki jika tidak bisa semuanya. Karena itu privilege seorang haji dalam masyarakat Sasak juga diwariskan secara tidak langsung dengan ia menjadi elit dalam masyarakat, termasuk secara ekonomi yang mapan hingga ia bisa berhaji beberapa kali atau juga dengan memberangkatkan haji anggota keluarganya (Haji Dua kali)

Genealogi haji dalam masyarakat Sasak merujuk sumber-sumber lisan lebih banyak mengungkap tentang sisi ritual sebelum keberangkatan dan dinamika perjalanan haji. Lalu sepulang dari Makkah seorang haji akan menjadi fublik figur di masyarakatnya, dan selama beberapa hari akan terus dikunjungi oleh tetangga-tetangga baik yang dekat maupun jauh untuk menggali pengalaman selama menunaikan ibadah haji. Tradisi-tradisi ini setidaknya masih mapan hari ini menjadi bagian dari ritus haji. Jadi, dalam konteks Sasak, behaji bukan hanya ritus ibadah selama di Makkah yang ditandai dengan Wukuf di Arafah sebagai inti ibadah Haji, tetapi juga meliputi ritual-ritual lainnya yang menandakan bahwa ibadah haji juga sarat nilai sosial. Termasuk juga sebelum keberangkatan diadakan begawe, doa bersama atau yang disebut Walimatussafar. Begitu juga sekembali dari kampung halaman diadakan syukuran lagi dengan mengundang para tetangga. Tahun-tahun belakangan acara syukuran hajatan sekembali dari tanah suci dibarengi juga dengan acara menyimak cerita-cerita perjalanan haji seorang yang baru kembali, ada juga yang membagi-bagikan oleh-oleh baik air Zam-zam, atau barang-barang yang menjadi khas oleh-oleh jamaah haji, tergantung tingkat ekonomi sang Haji.

Haji sebagai ibadah yang khusus waktu dan tempatnya bisa dimaknai sebagai ibadah tidak saja berdimensi vertikal hablun minnallah, tetapi juga di dalamnya cukup mapan dimensi horizontal hablun minannas yang dicerminkan melalui ritual-ritual kebersamaan dalam tradisi Sasak pada setiap prosesinya. Maka, dalam hal ini haji dalam tradisi masyarakat Sasak juga merupakan ibadah Sosial yang ditandai dengan sedekah-sedekah yang dilakukan calon jamaah haji sebelum keberangkatan maupun sekembali dari tanah suci.

D. Ritus Tradisi Pra-Pelaksanaan Haji di Lombok

Ibadah Haji merupakan ibadah sebagai penyempurna keislaman hamba yang benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Maka pantas saja salah satu syarat dari ibadah Haji yaitu mampu. Berbicara tentang konsep mampu dalam tataran masyarakat Lombok, hal yang pertama berkaitan pasti mampu secara ekonomi. Karena memang biaya untuk pelaksanaan Haji dapat dikatakan cukup besar bagi masyarakat yang sehari-hari biasa hidup di kalangan menengah ke bawah. Tak kalah pentingnya yaitu mampu secara mental, mental yang benar-benar ingin menyempurnakan Rukun Islam melalui ibadah Haji. Karena Haji dilakukan dengan melakukan perjalanan panjang ke tanah suci Makkah dan tempat-tempat bersejarah dalam Islam lainnya. Jadi kesiapan mental dan semangat untuk mendapatkan Ridha Tuhan harus benar-benar dipersiapkan dari awal.

Selain itu paradigma yang tertanam dalam masyarakat Lombok bahwa melaksanakan Haji sebagai panggilan resmi dari Allah SWT untuk berkunjung ke Baitullah. Banyak orang yang mempunyai kelebihan harta tetapi belum dapat melaksanakan ibadah

Haji. Persepsi masyarakat kita merujuk karena mereka belum mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk berhaji. Lebih-lebih di saat sekarang kuota haji yang dari Indonesia mendapatkan pengurangan dari pihak pemerintah Arab Saudi, jadi jika ingin melaksanakan ibadah Haji harus menunggu 15 sampai 20 tahun untuk dapat berangkat. Akan tetapi lamanya menunggu, tingginya biaya penyelenggaraan ibadah haji tak melemahkan semangat masyarakat kita untuk tetap mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji. Banyak kisah yang membuktikan bahwa haji itu merupakan benar-benar panggilan dari Allah SWT untuk para tamu-Nya.

Beberapa waktu lalu jamaah yang sudah mengantri sekitar 5 tahun dan tepat pada tahun ke-enam namanya keluar sebagai calon jamaah haji, telah mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal, namun pas akan berangkat ke Arab Saudi diberitakan bahwa visanya tidak keluar yang menyebabkan tertundanya pemberangkatan. Hal seperti itu sebagai cobaan berat bagi calon jamaah haji, bahkan ada yang sampai stress, hilang akal. Beberapa tradisi yang mapan bahkan bisa dikatakan menjadi syarat sebelum berangkat ke Makkah akan diuraikan lebih jauh.

1. *Mbau Kayuq* dan Membuat Teratak

Di Lombok, tradisi masyarakat kita untuk menyambut keberangkatan calon jamaah haji cukup beragam. Di Lombok Timur misalnya, sebelum memasuki bulan Ramadhan warga sudah beramai-ramai ikut membantu mengumpulkan kayu bakar persiapan untuk acara syukuran atau *begawe* pada hari yang telah ditentukan, istilahnya *mbau kayuq*. Sebenarnya acara *mbau kayuq* ini juga biasa dilaksanakan

setiap ada orang yang akan melaksanakan *begawe*, baik itu acara pernikahan, *kbitanan*, *aqiqah (molang maliq)*, peringatan 9 hari kematian dan lainnya.

Namun berbeda dengan penyambutan keberangkatan calon jamaah haji ini, *mbau kayug* tersebut sebagai pertanda awal, masih banyak tahapan acara lain yang akan dilaksanakan sampai menjelang tibanya keberangkatan calon Haji. Selanjutnya 4 atau 5 hari setelah Ramadhan warga kembali diberitahukan melalui pengumuman dengan pengeras suara dari masjid pada hari yang telah ditentukan, warga diminta berkumpul untuk pembuatan ketaring (*teratak*) sebagai peneduh di sekitar rumah calon haji. Berbagai macam hiasan bernuansa islami pertanda akan berangkat haji salah satu dari warga di masyarakat tersebut. Bahkan dengan kecanggihan teknologi saat ini rata-rata calon jamaah haji memajang baliho/spanduk beserta fotonya disertai kata-kata doa untuk mendapatkan haji mabrur.

2. Ziarah Makam

Setelah pembuatan *teratak* di rumah calon haji sudah selesai, kembali lagi dari pengeras suara di masjid warga diberitahukan pelaksanaan acara ziarah makam bersama calon haji akan dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan, biasanya 1 atau 2 minggu setelah pembuatan *teratak* tadi. Tergantung hari baik menurut pertimbangan dari orang yang mempunyai kelebihan untuk melihat pertimbangan hari-hari pelaksanaan acara, istilahnya disebut *dimase jelo*.

Hal yang menarik dari pelaksanaan ziarah makam ini, di samping sebagai acara syukuran untuk berdoa mengunjungi maqam-maqam Auliya' - Alim yang tersebar letaknya di sekitaran Lombok,

juga merupakan acara rekreasi keagamaan bagi warga yang ikut. Karena biasanya konsumsi untuk warga yang ikut telah disediakan oleh calon haji. Maka tak jarang ketika acara ziarah makam bersama calon haji di kampung selalu ramai. Bahkan tokoh-tokoh agama dari kampung tetangga juga diundang untuk ikut memberikan doa pada acara tersebut.

Acara ziarah ke makam para alim ulama' yang ada di Lombok ini dihajatkan sebagai pelatihan bagi calon jamaah haji. Memang Ibadah haji secara substansial pelaksanaannya berisi ziarah ke tempat-tempat bersejarah dalam agama islam Maka melalui ziarah makam sebelum keberangkatan, calon haji mendapatkan pembelajaran dari rumah sebelum berziarah ke tempat-tempat bersejarah sesuai tuntunan pelaksanaan haji. Makam-makam yang diziarahi calon haji ini pun beragam, seperti yang kita ketahui di Lombok terdapat berbagai organisasi Islam, dan tiap organisasi itu pasti memiliki Tuan Guru yang ditokohkan sebagai pendiri atau pengelola Yayasan, makam Tuan Guru inilah yang diziarahi oleh calon haji untuk memanjatkan doa keselamatan dan keberkahan sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji.

Selain makam-makam Tuan Guru pendiri Yayasan, banyak pula maqam Tuan Guru atau maqam tokoh-tokoh yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Lombok yang diziarahi calon haji. Namun tetap mendahulukan ziarah ke makam Tuan Guru pendiri Yayasan atau organisasi Islam yang calon haji masuk sebagai anggota di dalamnya. Tergantung juga kedekatan lokasi makam tersebut dari rumah calon haji.

2.1. Ziarah Jamaah NW



Misalnya, Calon Haji Lombok Timur dari Ormas Nahdhatul Wathan ketika melakukan Ziarah, makam yang pertama kali diziarahi makam Tuan Guru Kiyai

Haji M. Zainuddin Abd. Majid (Hamzanwadi) di Pancor, karena seperti yang kita tahu beliau cukup besar jasanya menyebarkan Islam di tanah Lombok melalui pendidikan dengan sistem Pondok Pesantren dan Halaqah-halaqah agama. Beliau juga termasuk pejuang Kemerdekaan Indonesia dari Lombok, serta pernah terlibat langsung dalam peperangan mengusir tentara NICA di Selong (dalam buku Biografi Maulanasyaikh TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid karangan H. Hayyi Nu'man).

Setelah Selesai berdoa di Makam Hamzanwadi dilanjutkan dengan berziarah ke makam Raja-raja Selaparang di Selaparang kecamatan Suela Lombok Timur. Kerajaan Selaparang merupakan Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Lombok jauh sebelum kedatangan penjajah ke Nusantara. Di kompleks makam Selaparang ini bentuk maqam tersusun rapi dari bebatuan yang sudah melekat dan tampak alami tanpa sentuhan teknologi bahan bangunan seperti sekarang. Makam-makam bersejarah lainnya yang masih berada di kawasan Lombok Timur yang biasa diziarahi calon haji yaitu maqam TGH. Saleh Sungkar, Maqam Tuan Guru Ahmad Tretetet dan lainnya.

Usai dari maqam-maqam yang berada di kawasan Lombok Timur barulah beranjak ke maqam-maqam bersejarah lainnya, di Lombok Tengah misalnya, ada maqam Tuan Guru Haji Lopan, lalu dilanjutkan ke maqam loang baloq di Tanjung Karang dan terakhir ke maqam batu layar di kawasan batu Layar, Lombok barat. Pada maqam yang terakhir ini biasanya dilanjutkan dengan rekreasi ke pantai senggigi menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Maka tak heran perjalanan satu hari penuh untuk berziarah itu menjadi momen besar bagi calon haji.

Ada juga yang lebih antusias lagi tak cukup dengan maqam yang ada di kawasan Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, calon haji kadang mengundang tokoh-tokoh agama dengan rombongan kecil bersama keluarga berziarah ke maqam-maqam bersejarah lainnya yang tak sempat dilakukan pada saat rombongan besar, seperti maqam-maqam yang ada di bagian Jerowaru, Pujut lalu terakhir ke maqam Masjid Kuno yang ada di bayan.

2.2. Ziarah Jamaah Maraqitta'limat

Selanjutnya calon Haji yang dari Organisasi islam Maraqitta'limat, maqam yang pertama diziarahi yaitu maqam TGH. Zainuddin Arsyad sebagai pendiri Yayasan Maraqitta'limat yang terletak di Pekuburan Umum Mamben Lauk, Yayasan Maraqitta'limat ini juga sudah berusia cukup tua sebagai organisasi Islam di Lombok yang berpusat di Mamben Lauk. Setelah selesai berdoa di maqam yang ada di mamben lauk, ziarah dilanjutkan ke maqam raja-raja selaparang, maqam TGH. Saleh Sungkar, barulah beranjak ke maqam-maqam yang lain seperti yang dilakukan calon Haji dari organisasi Nahdhatul Wathan di atas.

2.3. Ziarah Jamaah Al Mukhtariyah

Adapun calon haji dari organisasi Islam Al Mukhtariyah Al Islamiyah, makam pertama yang diziarahi yaitu makam TGH.



Afifuddin Adnan sebagai pendiri, lokasi makam ini juga terletak di Mamben lauk, Pusat Yayasan ini pun berada di

Mamben lauk juga. Setelah usai berdoa di makam pendiri yayasan ini, lazimnya ziarah dilanjutkan ke makam TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid di Pancor. Karena awalnya pendiri yayasan ini merupakan anak yang diserahkan dengan istilah *Mayung sebungkul* kepada Maulanasyaikh. TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid, Pendiri yayasan Al Mukhtariyah pun dikabarkan menjadi anak angkat pendiri NW, Maulanasyaikh TGKH.M. Zainuddin. Selanjutnya Ziarah dilanjutkan ke makam-makam bersejarah lainnya seperti yang dilakukan organisasi Islam yang di atas.

Begitu pula dengan organisasi Islam Nahdhatul Ulama yang ada di Lombok Timur, makam-makam yang diziarahi juga tak jauh beda. Makam yang pertama diziarahi biasanya makam Hamzanwadi di Pancor barulah beranjak ke makam-makam yang lainnya. Karena awal terbentuknya Nahdhatul Wathan bisa disebut seiring dengan semangat perjuangan dari Ormas Nahdhatul Ulama. Tak heran Nahdhatul Ulama yang berpusat di Jawa memiliki banyak kesamaan

dalam hal *Fiqhiyah* dengan Nahdhatul Wathan yang berpusat di Lombok.

3. Ziarah Untuk Memperkokoh Persaudaraan

Beragamnya organisasi massa Islam yang berkembang di masyarakat lantas tidak langsung menyebabkan perpecahan atau renggangnya *ukhwah* dalam kehidupan sosial di masyarakat, namun itu dijadikan sebagai ajang untuk *fastabiqul khairat* karena semua organisasi Islam ini memotivasi untuk selalu *beramar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam perkembangannya selalu berinovasi dalam upaya memajukan semangat kebaikan. Acara ziarah makam ini juga merupakan sarana pemersatu masyarakat yang beragam tadi. Dalam satu kampung misalnya, ada salah satu calon haji dari beberapa organisasi tadi, maka yang mengikuti ziarah makam bukan hanya yang dari simpatisan organisasi yang dimasuki calon haji tadi. Akan tetapi semua warga di kampung tersebut yang mempunyai kesempatan untuk ikut akan disambut baik atas kehadirannya mendoakan calon haji.

Acara ziarah makam calon haji ini bisa dikatakan rekreasi atau wisata *Syariah* masyarakat yang mengharap dapat imbas berkesempatan seperti calon haji mendapat panggilan Allah SWT. Sugesti masyarakat kita yang tetap tertanam semangat *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Salah satunya melalui ziarah ke makam-makam bersejarah para alim ulama' dan peninggalan budaya Islam yang terdahulu, sebagai bentuk masih melekatnya budaya Islam dalam masyarakat.

Ziarah makam ini merupakan tradisi turun temurun bernilai ibadah, walaupun sebagian aliran *Madzhab* mengatakan tidak boleh

bertawassul (berdoa melalui perantara) di makam-makam para Ulama. Ulama fiqh dalam Mazhab Syafii yang diikuti rata-rata organisasi islam di Nusantara mengatakan itu hal yang dibolehkan, berdoa mengunjungi makam para alim-ulama untuk mendoakan mereka lebih-lebih mendoakan diri sendiri dan para jamaah yang ikut berziarah.

Di samping itu ziarah ke makam-makam bersejarah tersebut sebagai bentuk pelestarian peninggalan budaya dahulu agar tetap eksis sebagai bagian dari khazanah keragaman budaya. Jika makam-makam maupun tempat bersejarah tersebut tidak lagi dikunjungi maka tak heran tempat-tempat tersebut akan hilang dengan sendirinya. Tidak ada lagi yang mengenang dan merawatnya, jadi kontribusi penziarah juga sangat besar dalam pelestarian warisan budaya ini.

4. Acara Begawe

Prosesi selanjutnya yang diadakan oleh calon haji yaitu acara syukuran atau *begawe* Haji dengan mengundang seluruh warga untuk membantu mempersiapkan segala kebutuhannya. Acara syukuran ini pun mengundang seluruh kerabat calon haji baik yang dekat maupun yang jauh. Tamu yang diundang atau orang yang datang *begawe* ini yang perempuan biasanya membawa beras dalam wadah baskom dan nampan aluminium kecil di atasnya tempat gula pasir. Lalu tamu yang laki-laki lebih simple hanya membawa amplop yang telah diisi dan di masukkan ke kotak yang telah disediakan. Menghadiri undangan *begawe* ini istilah dalam Sasak-nya disebut *be-langar* dan barang atau amplop yang dibawa tamu itu disebut *pelangar*. Acara *begawe* syukuran calon haji ini biasanya dilaksanakan maksimal sebulan sebelum

keberangkatan calon haji, tergantung pada kesiapan calon haji dan keluarganya.

5. Berame-rame

Adapun dalam masa menunggu keberangkatan setelah diadakannya begawe, calon haji tetap mendapatkan kunjungan-kunjungan dari kerabatnya sebagai bentuk ucapan selamat atas kesempatan mendapat panggilan Allah SWT untuk melaksanakan haji. Lalu satu minggu sebelum keberangkatan diadakanlah acara Tahlilan di rumah calon haji sebagai bentuk sumbangan doa, acara tahlilan sebelum keberangkatan haji ini istilah sasaknya disebut *berame-rame*.

Ketika menghadiri acara *berame-rame* warga yang berkunjung akan melakukan salaman dengan calon haji, masih dengan harapan yang sama semoga memperoleh kesempatan berhaji seperti calon haji yang disalami. Calon Haji biasanya duduk di dekat jalan masuk sebelum ke tempat *berame-rame* yang telah disediakan agar memudahkan orang yang akan salaman kepadanya. Acara *berame-rame* ini biasanya dilaksanakan sampai 2 hari setelah keberangkatan atau setelah calon haji sampai di kota Makkah.

Acara *berame-rame* setelah diisi dengan Tahlil dan Doa, lalu diikuti dengan pembacaan hikayat-hikayat berisi perjalanan hidup Rasulullah SAW dari kitab-kitab terdahulu yang menggunakan Bahasa Sasak. Pembacaannya pun berirama seperti lagu, ada yang membaca secara termaktub dalam kitab hikayat tersebut, lalu ada yang bertugas sebagai penterjemah dan jamaah lainnya yang hadir bertugas meramaikan pada saat pembacaan Shalawat, pembacaan hikayat ini dalam bahasa sasaknya disebut *monyeb* atau *memace nya'er*.

Selanjutnya pada hari keberangkatan calon haji ke tanah suci Makkah semakin ramai yang berkunjung kepada calon haji. Warga pun tak ketinggalan ikut mengantarkan, ada yang sampai ke tempat berkumpulnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), ada yang sampai ke Asrama Haji yang ada di daerah. Keluarga dekat dan Tokoh-tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat biasanya mengantarkan sampai ke bandara atau pelabuhan, ketika perjalanan masih menggunakan kapal laut seperti yang diceritakan orang-orang tua dulu. Doa pun tetap teriring untuk jamaah haji yang telah diberangkatkan tersebut.

Ketika jamaah haji sudah kembali ke kampung halaman pun tak kalah ramainya disambut warga, salaman pun tak henti-hentinya untuk mereka. Lalu warga berkumpul kembali di rumah Haji tersebut, bukannya bermaksud mendapatkan oleh-oleh akan tetapi ingin mendengar cerita keindahan dan perjuangan selama melaksanakan ibadah haji. Untuk itu jamaah haji yang pulang juga dituntut untuk bisa bercerita dan berbagi pengalaman, motivasi, di samping gelar kegamaan yang telah tersemat dalam dirinya.

Barulah ketika koper jamaah haji telah sampai ke rumahnya 2 atau 3 hari setelah kepulangan, acara selanjutnya yaitu berbagi oleh-oleh dari Makkah seperti air Zam-zam, Kurma, Sajadah, Tasbih, Surban untuk warga yang sudah berhaji, dan mainan-mainan bernuansa Arab untuk anak-anak kecil keluarga dekat jamaah haji.

Tradisi-tradisi baik seperti ini seyogyanya tetap terjaga dalam masyarakat kita sebagai bentuk nilai solidaritas dalam membangun persatuan dan merekatkan *ukhuwah* dalam masyarakat. Untuk itu semangat untuk pelestariannya perlu ditanamkan dari sekarang

sebagai pembelajaran dalam menjaga khazanah tersebut. Akulturasi nilai agama dan budaya dalam tradisi haji ini menunjukkan dimensi sosial yang mapan dalam masyarakat Sasak merupakan proyek identitas Islam sebagai bagian dari kebudayaan (Sya'rani, 2017).

BAB III

GELAR HAJI DALAM PUSARAN KAPITAL SIMBOLIK

Pada bab ini peneliti akan mencoba menguraikan tentang konsep kapital pada gelar haji yang selama ini mapan dalam masyarakat Sasak. Salah satunya ketika gelar tersebut membentuk kelas sosial baru bagi anggota masyarakat. Di beberapa wilayah di Lombok Tengah, gelar haji bahkan disetarakan dengan gelar kebangsawanan. Seorang yang awalnya dari strata sosial Jajar Karang tanpa gelar kebangsawanan Raden, Lalu (untuk laki-laki) ketika sudah menunaikan haji akan dipanggil *mamiq*, seperti halnya seorang yang dimapankan sebagai bangsawan Sasak. Sementara untuk perempuan akan dipanggil bu Haji atau Hajjah, atau Inaq Tuan. Selain sebutan *mamiq*, biasa juga dipanggil tuan Haji dan pada acara-acara di masyarakat akan menempati tempat yang sama dengan kelompok yang bergelar bangsawan.

A. Gelar sebagai Bentuk Pemapanan Kapital Simbolik

Stratifikasi sosial yang mapan di masyarakat dulunya antara bangsawan dan jajar karang sebenarnya untuk mempertahankan status quo mereka sebagai bangsawan agar tetap menjadi elit. Sementara inferioritas jajar karang hendak dijadikan sebagai kelas kedua dalam masyarakat agar tetap menjadi pesuruh ataupun buruh bagi kelas-kelas elit tersebut. Upaya jajar karang dulunya untuk keluar dari kelas sosial sebagai masyarakat kelas kedua salah satunya dengan mengumpulkan basis ekonomi yang mapan, kemudian juga dengan menjadi seorang haji agar kedudukannya sama dengan mereka yang

dimapankan sebagai bangsawan. Hal ini juga bisa diasumsikan bahwa di dalam Islam terdapat ajaran yang menumbuhkan etos ekonomi para penganutnya, dan ajaran itu antara lain terkandung dalam kewajiban haji, yang termasuk juga sebagai upaya mengejar gengsi dan status sosial dalam dunia sosial masyarakat Lombok (Soehadha, 2018).

Di beberapa wilayah di sekitaran praya misalnya, dulu dengan Stratifikasi sosial yang masih kental, masyarakat Jajar Karang dan bangsawan dalam suatu acara hajatan atau begawe akan berbeda tempat duduknya. Bangsawan akan duduk di balai-balai seperti berugaq yang sengaja disediakan, sementara jajar karang akan duduk di bawah dengan alas seadanya. Seorang jajar karang yang sudah berhaji akan dipersilahkan menempati berugaq juga seperti halnya yang bangsawan. Perbedaan tempat duduk ini seolah untuk menghormati tamu, tetapi justru semakin menegaskan kelas sosial dalam masyarakat. Lalu ada seorang jajar karang yang walaupun ekonominya mapan tetapi dia tetap tidak dipersilahkan untuk duduk di balai-balai, sementara seorang haji yang sudah tidak lagi kaya tetapi dipersilahkan juga naik ke balai-balai. Ia pun berinisiatif untuk segera berangkat berhaji agar posisinya sama dengan yang lain. Beberapa tahun kemudian setelah ia merasa cukup banyak uang yang akan dijadikan biaya haji dan yang masih tersisa sekembali dari haji, ia pun berangkat ke tanah suci. Tetapi sekembali dari berhaji dan ia diundang kembali menghadiri acara hajatan, sudah siap dengan peci putih, surban dan aneka aksesoris haji lainnya, ternyata sudah tidak lagi ada perbedaan tempat duduk antara bangsawan dan jajar karang, tetapi duduk sama rata berjejer. Sang haji pun merasa seolah dipermainkan

dengan status-status sosial dalam masyarakat tersebut (Wawancara dengan Muthmainnah, 14 Juni 2022).

Ilustrasi di atas menjadi cerita yang terus direproduksi terkait gelar haji sebagai kelas sosial baru dalam masyarakat Sasak. Mekanisme Pemapanan gelar tersebut sebagai elit tidak terlepas dari konstruksi sosial dalam masyarakat yang menganggap haji adalah ibadah yang prestisius, tidak sembarang orang bisa menunaikannya. Bukan saja istimewa secara materi, tetapi orang yang akan berhaji juga harus mapan secara spiritual. Terlebih dengan legitimasi dalil bahwa tidak ada balasan bagi seorang yang hajinya mabrur kecuali surga. Artinya persepsi masyarakat banyak, menganggap bahwa seorang haji juga sebagai seorang alim, yang telah sempurna Islamnya. Maka upaya-upaya memapankan persepsi itu juga didukung dengan semakin memberikan ruang-ruang kepada seorang haji menjadi pemimpin agama dalam masyarakat. Misalnya dengan didahulukan sebagai Imam di masjid, memimpin zikir, tahlilan, ataupun pada prosesi-prosesi yang melibatkan banyak orang dalam masyarakat. Dari sana juga seorang haji akan dinilai kemampuan intelektualitas keagamaannya.

Seorang haji juga menjadi elit dalam masyarakat kaitannya dengan gelar-gelar yang disematkan kepadanya dan itu menjadi kapital simbolik untuk melegitimasi tindakan-tindakannya dalam masyarakat. Memang niat berhaji seorang hamba hanya dia dan Allah SWT yang tahu, akan tetapi pada praktik-praktik kehidupan sehari-hari seorang haji tercermin bagaimana tujuan menjadi haji juga menjadi bermakna. Misalnya seorang haji ketika diundang ke suatu acara melalui undangan cetak, lalu di surat undangan tidak

dicantumkan gelar hajinya, dan ia marah atas itu, bisa jadi gelar lebih bermakna daripada ibadah yang sudah dijalankan. Begitu juga atribut-atribut yang melekat pada seorang haji terutama dari sisi kostum, yakni peci putih, sorban, bahkan imamah (ikat kepala) yang dililitkan pada peci, terkadang juga jubah atau gamis menjadi pakaian sehari-hari untuk menunjukkan identitas haji tersebut (Soehadha, 2015).

Jika dulu peci putih dan sorban sangat populer menjadi ciri khas seorang haji, maka sekarang semua orang biasa yang bukan haji juga menggunakan peci putih. Bahkan dulu jika ada yang belum berhaji tetapi mengenakan peci putih akan dijadikan olok-olokkan dan dicibir, dianggap terlalu meninggikan diri padahal semua orang tahu kondisi kehidupannya yang masih kekurangan, apalagi untuk menjadi seorang haji. Akan tetapi lambat-lambat atribut-atribut yang menjadi ciri khas seorang haji tersebut mulai memudar, banyak juga seorang haji yang mengenakan peci hitam tanpa sorban, atau ada juga tanpa mengenakan peci. Seorang haji yang menjadi tokoh agama atau elit tertentu dalam masyarakat tentunya akan mempertahankan ciri khas identitas itu. Berbeda dengan masyarakat biasa yang non-haji tentu akan dianggap sebagai strategi mimikri (meniru untuk mengolok-olok) dari suatu yang dianggap hibriditas (diklaim sebagai yang asli, murni). Melalui kostum tersebut sang haji ingin menegaskan kembali perbedaan antara seorang haji dan masyarakat biasa sebagai bentuk strategi hibriditas. Begitu pula masyarakat yang terlanjur mapan menilai seorang haji dari kostum yang dikenakan dan dianggap mapan dari sisi intelektualitas keagamaan.

B. Legitimasi Kapital Seorang Haji

Kapital atau modal dalam hal ini merujuk konsepnya Bourdieu dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki nilai pada diri seorang individu dan itu dijadikan sebagai legitimasi atas posisinya di masyarakat. Modal bukan hanya basis ekonomi yang biasa dipahami secara umum, tetapi juga kaitannya dengan basis intelektual, budaya, atau posisi seseorang dalam masyarakat (Bourdieu, 1992). Dalam hal ini gelar haji juga dipahami sebagai modal simbolik pada seorang individu. Pada beberapa daerah di Lombok disamakan dengan modal Sosial berupa gelar kebangsawanan, atau gelar keagamaan lainnya dalam konteks masyarakat Islam. Gelar kebangsawanan dalam masyarakat Islam Sasak misalnya Raden, Lalu (untuk laki-laki), biasa dipanggil dengan sebutan *mamiq*, maka seorang haji juga selain dipanggil tuan haji juga dipanggil dengan sebutan tersebut.

Modal simbolik seorang haji dalam masyarakat kadang membingungkan ketika itu selalu dijadikan sebagai basis legitimasi atas posisinya dalam masyarakat. Misalnya di masyarakat desa Tembeng Putik, Wanasaba Lombok Timur, seorang haji seolah mempunyai otoritas penuh untuk urusan keagamaan. Misalnya dalam kepengurusan masjid di salah satu dusun di desa Tembeng Putik, seorang haji akan selalu didahulukan, mulai dari menjadi Imam shalat, pimpinan zikir (*tahlilan*) sampai hal-hal teknis kepengurusan masjid. Tak jarang juga seorang haji dalam masyarakat dijadikan sebagai rujukan ketika akan mengadakan acara-acara tertentu di masyarakat. Misalnya ketika mengadakan zikir, *tahlilan*, belum afdol rasanya memulai acara kalau belum hadir semua haji yang di-pesilq (*diundang*) di kampung tersebut.

Di Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba misalnya, seorang haji memiliki pengaruh yang cukup besar sebagai elit dalam masyarakat. Suatu ketika seorang kawan menceritakan pengalamannya berjamaah di masjid dekat rumahnya. Selepas adzan, cukup lama menunggu Imam shalat dengan membaca amalan-amalan sebelum memulai shalat berjamaah. Di masjid tersebut cukup mapan tradisi yang menjadi imam itu seorang haji, meskipun sudah tua dan bacaan sudah tidak terlalu jelas. Karena kelamaan menunggu belum juga ada tanda-tanda sang haji sebagai imam akan muncul, mereka pun menunjuk salah seorang pemuda di antara mereka yang masih belajar di Ma"had Pancor. Sang pemuda pun maju menjadi Imam, akan tetapi ketika akan memulai rakaat kedua, seseorang memukul mereka dengan sandal untuk membubarkan shalat berjamaah dengan menyebut mereka "Noaq"- berlagu- karena seolah dianggap melangkahi orang yang lebih tua untuk menjadi imam. Ungkapan "noaq" "Masih kodeq"-masih kecil- untuk menyebut orang lain oleh seorang haji seolah menganggap diri mereka lebih mapan dalam segala hal. Identitas ke-hajian mereka seolah menjadi legitimasi atas sempurnanya keislaman mereka (Wawancara dengan Saiful Wathan, 13 Mei 2022).

Bahkan ketika orang lain mempertanyakan tentang proses ke-hajian tersebut kadang dijawab dengan jawaban-jawaban yang semakin membuat mereka membanggakan diri. Identitas kelas sosial melalui haji ini tak ubahnya upaya branding diri melalui citra-citra kesalihan, intelektualitas keagamaan, dan cerita-cerita tentang kesusahan selama perjalanan menunaikan ibadah haji. Lalu ketika gelar haji tidak disebut atau tidak dituliskan di depan nama seorang

haji kadang akan menimbulkan ketersinggungan. Terlebih seorang haji yang memang merupakan bagian dari kelas sosial menengah ke atas yang notabene kehidupan mereka tak jauh dari upaya-upaya memapankan identitas kelas tersebut. Misalnya, seorang pejabat meski setara kepala dinas di kecamatan ketika akan mengisi sambutan namanya disebut tanpa gelar haji oleh MC yang mempersilahkan, ia pun lalu mengoreksi itu dengan menegaskan penyebutan gelar haji, bahwa ia sudah purna rukun Islamnya. Dalam masyarakat Sasak sendiri juga mapan ungkapan " capek-capek mereka ke tanah suci, jangan sampai lupa gelar haji-nya", artinya penyebutan gelar haji ini seolah sesuatu yang sensitif jika sampai diabaikan. Hal ini sama dengan penulisan gelar sarjana pada seorang sarjana ketika akan diundang melalui medium tulisan/surat undangan. Karena keduanya juga sama, menjadi legitimasi untuk suatu kelas sosial tertentu.

C. Gelar Haji Sebagai Bentuk Kontrol Individu Pada masa Kolonial.

Bagaimana awal mula gelar haji ini menjadi penanda identitas kelas?, tak cukup banyak tulisan yang mengurai itu dan disajikan data yang komprehensif. Beberapa peneliti menulis bahwa gelar haji merupakan sematan yang diberikan oleh belanda sebagai bentuk kontrol terhadap individu-individu yang menjadi pionir melawan kolonial Belanda. Sama halnya dengan konsep multikulturalisme yang dicanangkan pemerintahan Hindia-Belanda dengan memberikan kebebasan kepada kelompok atau golongan untuk mengekspresikan identitas mereka. Di satu sisi perbedaan itu dirayakan, di sisi yang lain

mereka sebenarnya tak sadar bahwa penegasan keberbedaan itu semakin menguntungkan kolonial Belanda melancarkan strategi kontrol. Maka dibuatkanlah juga kelompok-kelompok dalam masyarakat sesuai identitas etnis, suku, bahkan agama. Inilah salah satu awal munculnya nama-nama wilayah yang diisi sekelompok golongan tertentu. Misalnya kampung Melayu, diisi oleh orang Melayu tanpa ada etnis lain, begitu juga kampung Arab, Kampung Cina dan lainnya (Budiawan, 2015).

Gelar haji juga bagian dari strategi kontrol untuk membatasi gerak-gerik individu yang mencoba memelopori resistensi terhadap pemerintah kolonial. Ketika seorang individu melakukan mobilisasi massa untuk melawan kolonial Belanda, identitas mereka sebagai haji yang berbeda dengan masyarakat umum akan cepat ditelusuri. Beberapa haji yang cukup terkenal seperti Haji Oemar Said Tjokroaminoto pendiri Sarekat Islam, Haji Samanhudi pelopor Sarekat Dagang Islam, Haji Muhammad Darwis pendiri Muhammadiyah, Kiyai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU dan lainnya merupakan seorang pelopor yang menentang kolonialisme dengan spirit agama, dan itu semakin mapan ketika mereka menjadi Haji sepulang dari Makkah (Adrayamarthanino, 2021). Persentuhan mereka dengan intelektual-intelektual muslim lainnya selama berada di Makkah semakin menggugah semangat mereka melawan penindasan terhadap bangsa dan tanah air mereka. Maka tak heran upaya-upaya meredam perlawanan para Haji ini salah satunya dengan memetakan posisi mereka di masyarakatnya dan mencoba membuat keterpisahan antara seorang haji dengan masyarakat biasa.

Pemapanan gelar haji dalam masyarakat Sasak juga menunjukkan identitas budaya yang ingin ditonjolkan, bahwa seorang haji adalah manusia sempurna keislamannya, dan individu itu dianggap sudah mencapai derajat kesempurnaan sebagai seorang hamba dibandingkan dengan anggota masyarakat yang belum berhaji. Seorang Haji yang awalnya sebagai peternak yang tiap hari pergi menyabit rumput dan membawa di atas kepala karung rumput untuk ternak (istilah Sasak menyebutnya ngeson, kalau ditempatkan di pundak disebut monggoq, memanggul). Setelah menjadi haji dan memakai peci putih dan sorban, tak lagi pergi menyabit rumput, tak lagi ngeson rumput untuk ternak. Lebih banyak waktu dihabiskan di rumah, atau di masjid. Padahal tidak ada dalil yang menyatakan bahwa seorang haji perlu meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya yang dianggap rendah. Padahal yang dianjurkan yaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan syariat. Misalnya dulu sebelum haji sering keluar malam, nongkrong di tempat hiburan, setelah berhaji alangkah baiknya hal itu ditinggalkan. Sebelum berhaji seorang individu sering nongkrong main domino, atau nganggur-nganggur di jalan, sering menggunakan celana pendek kaos oblong ketika bertemu banyak orang, setelah haji mungkin lebih baik meninggalkan hal-hal sia-sia seperti itu.

Akan tetapi ketika itu pekerjaan-pekerjaan yang halal dilakukan sebelum berhaji meski itu pekerjaan rendah, setelah menjadi haji alangkah baiknya hal itu terus dilakukan jika memang belum mendapatkan pekerjaan lain yang dianggap dalam pandangan masyarakat lebih bernilai tinggi. Misalnya seorang petani, setelah berhaji maka harus tetap kembali menggarap tanahnya. Begitu juga

seorang peternak tak semestinya gengsi ketika mengenakan peci putih dan sorban menjadi penghalang untuk tidak lagi melakoni sebagai peternak. Beberapa kusir becak yang ada di pasar Apitaik, Lombok Timur cukup banyak yang mengenakan peci putih. Setelah penulis berbincang-bincang, ternyata mereka termasuk para haji yang kembali melakoni rutinitas mereka sebelum berhaji.

Akan tetapi tak semua orang akan sama persepsinya terkait gelar haji yang disandang. Ada yang merasa perlu untuk menjaga persepsi orang lain terkait identitas diri sebagai kelas elit baru dalam masyarakat. Misalnya seorang haji yang sebelumnya biasa saja membawa rumput untuk ternak di kepala, setelah menunaikan haji seolah merasa tak pantas lagi untuk itu. Hal-hal seperti ini menjadi legitimasi bahwa gelar haji sebagai pembeda kelas sosial justru dikonstruksi sendiri oleh sang haji maupun masyarakatnya.

D. Gelar Haji Sebagai Konstruksi Citra Diri Dan Kelas Sosial

Pembedaan kelas sosial antara haji dan non haji ini tidak terlepas juga dari peran tradisi yang mapan dalam masyarakat terkait ritus-ritus yang perlu dilalui seorang calon haji hingga ia mendapatkan gelar haji pasca kepulangan dari Makkah. Ritus-ritus tersebut bisa bermakna upaya mengukuhkan citra individu, bahkan bisa saja beberapa tahun sebelum ia akan berangkat haji. Misalnya seorang yang sudah mendaftar haji lalu ia diberikan informasi terkait tahun keberangkatannya, dari situ upaya-upaya membangun citra itu dimulai. Di antara ritus itu bisa berupa kesempatan diberikan tempat

dalam masyarakat sebagai seorang calon haji yang dihormati, lalu tradisi-tradisi penyambutan dengan memeriahkan rumah calon haji setiap harinya juga tak lepas dari konstruksi kelas sosial itu sendiri.

Konstruksi kelas sosial bisa berupa pilihan gaya hidup, simbol-simbol yang dikonsumsi termasuk kostum sebagai upaya mempertegas identitas kehajian seseorang dalam masyarakat. Beberapa peneliti menyebut haji sebagai kelas sosial dengan sematan gelar di depan nama mereka merupakan warisan kolonial Belanda sebagai strategi kontrol atas individu. Seorang pribumi yang pergi ke Makkah untuk berhaji pada masa Hindia-Belanda tidak semata untuk beribadah, tetapi juga mereka belajar dan di sanalah persentuhan mereka dengan pemikiran-pemikiran revolusioner dari intelektual-intelektual muslim lainnya dari negara yang senasib sebagai jajahan (Livikancasera, 2009). Pangeran Diponegoro, H.O.S Tjokroaminoto, H. Misbach, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan lainnya merupakan figur-figur haji yang diawasi Belanda termasuk disematkan gelar Haji untuk memudahkan identifikasi dalam masyarakatnya.

Kemudian karena banyaknya pribumi yang berminat pergi ke Makkah untuk berhaji, pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan ordonansi (pengetatan) jumlah pribumi yang akan pergi berhaji, karena dikhawatirkan akan semakin banyak lagi orang-orang revolusioner yang memelopori perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Strategi ordonansi untuk menekan jumlah pribumi pergi berhaji dianggap cukup berhasil untuk mewaspadaai kemunculan perlawanan-perlawanan yang dipelopori haji. Tak hanya pengetatan sebelum keberangkatan berhaji, setelah kembali dari Makkah pun

mereka dimintai bukti bahwa mereka pernah berhaji, kemudian barulah disematkan gelar haji (Sanusi, 2020).

Dalam konteks masyarakat sasak Lombok, upaya mengukuhkan gelar haji itu juga melalui serangkaian tes non-formal dalam masyarakat yang diterima secara *taken for granted* oleh seorang haji. Hal ini disebabkan banyak kasus yang terjadi dulunya seorang individu yang ingin mendapatkan kelas sosial melalui gelar haji lalu memanipulasi keberangkatannya ke Makkah.

Salah seorang yang di-hajikan dalam masyarakat Lengkok Desa Tembeng Putik misalnya, sudah bukan menjadi rahasia ketika banyak masyarakat yang mengetahui tentang status ke-hajiannya. Pak Haji AD yang juga dianggap sebagai bangsawan di masyarakat etnis Bugis, Makassar, oleh masyarakat Lengkok Lendang sering dijadikan sebagai antitesa sebuah gelar haji. Karena ia dianggap mendapat gelar haji bukan benar-benar dengan ibadah ke Makkah, tetapi seperti yang dijelaskan di atas, hanya karena mengejar status sosial sebagai haji. Ia berangkat menggunakan kapal menuju Surabaya dengan tujuan berangkat berhaji. Tetapi beberapa orang yang kemudian berangkat berhaji pada tahun yang sama dengannya bercerita bahwa ia tidak pernah sampai di Makkah. Besar dugaan bahwa ia menetap di Surabaya sampai masa kepulangan haji dari Makkah, lalu bersamaan juga membeli oleh-oleh khas jamaah haji di Surabaya (Wawancara dengan Syaofi, 16 Mei 2022).

Ketika kembali ke kampung, ia pun mengenakan atribut layaknya seorang haji, dan masyarakat juga memanggilnya dengan sebutan haji. Mekanisme tes dalam masyarakat untuk memapankan seorang haji ternyata tidak bisa dilewati oleh pak Haji AD, termasuk

ketika diminta menjadi imam di masjid, memimpin doa, tahlilan dan lainnya. Bahkan beberapa haji yang berangkat sebelumnya mencoba menelusuri desas-desus yang beredar dalam masyarakat terkait haji AD. Mereka menanyakan tentang kondisi Makkah, Ka'bah yang ditemui ketika mereka berangkat haji, apakah masih sama dengan ketika haji AD berhaji. Misalnya pertanyaan tentang sekitar Ka'bah yang ditanyakan "Apakah masih rumpun bambu yang ada di sekitar Ka'bah?", haji AD pun menjawab "masih", dengan tegasnya, padahal itu hanya pertanyaan bohongan untuk menges-tes, tetapi dijawab serius olehnya. Padahal semua haji itu tahu tak ada rumpun bambu di sekitar Ka'bah, karena itu merupakan area Masjidil Haram. Jawaban haji AD semakin meyakinkan masyarakat bahwa ke-hajiannya justru hanya manipulasi.

Mengejar gelar haji secara politis sebenarnya kerap terjadi pada masa penguasa dahulu. Mereka mencari legitimasi sebagai pemimpin kepada penguasa Haramain (dua kota suci Makkah-Madinah) yang diyakini mempunyai pengaruh untuk memberikan mereka gelar sebagai penguasa, misalnya sebutan Sultan (Putuhena, 2007). Sebagaimana diuraikan di atas bahwa keberangkatan pribumi ke tanah suci juga bukan sekedar menunaikan ibadah, tetapi mereka juga belajar, dan bertemu dengan gerakan Pan-Islamisme dari berbagai penjuru negeri hingga itu dijadikan modal untuk menggerakkan massa melawan kolonialisme sepulang dari Tanah Suci.

Sebutan Haji sebenarnya patut disematkan ketika seorang individu masih di Makkah dan dalam prosesi ibadah haji, adapun setelah selesai ibadah haji sudah tidak lagi disebut haji (Damhuri, 2020). Akan tetapi di masyarakat Sasak pun gelar haji bisa jadi justru

lebih menjadi tujuan. Hal ini tercermin dari perilaku para jamaah haji yang kadang tak menyeimbangkan dimensi kekhusyuan ibadah dengan dimensi wisata dan ajang pamer dengan selfi ataupun melakukan video call ketika berada di situs-situs suci untuk memanjatkan doa. Bahkan tak jarang juga ibadah haji tak ubahnya dilakoni sebagaimana rutinitas ketika berada di kampung halaman. Para jamaah haji yang tidak mempersiapkan mental dan bekal spiritual lebih berpotensi menjalani ritual hanya dengan hanya sekedar mengikuti arahan pembimbing, bahkan doa khusus yang seharusnya dilantunkan untuk pribadi dan keluarga malah terlupa. Kejadian seperti ini diceritakan oleh Prof. Iswandi dalam akun Facebooknya selama menjalani ibadah haji 1443 H. Ia melihat banyak sekali jamaah haji Indonesia yang mengisi waktu luangnya dengan merokok, ngobrol santai di waktu-waktu yang seharusnya diisi dengan lebih banyak bertafakur dan berdoa di tempat-tempat mustajab (Iswandi, 2022).

Persiapan ibadah haji memang bukan hanya terkait ekonomi, tetapi juga mental, spiritual, dan pengetahuan agama dalam memahami syariat haji. Ariadi (2013) dalam bukunya *Haji Sasak* misalnya menyebut ritual Haji dan behaji dalam masyarakat Sasak memiliki dimensi yang berbeda. Haji sebagai ritual syariat mensyaratkan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, sementara behaji adalah ritual tradisi yang mencakup konsep-konsep kebersamaan dalam masyarakat menyambut keberangkatan calon haji. Persiapan-persiapan terkait ritus tradisi tentunya lebih kepada simbolik atas makna-makna pra pelaksanaan ibadah haji semasih di kampung halaman. Akan tetapi konsep haji

sebagai makna penyatuan identitas sebagai muslim ketika di Makkah, kemudian akan bertransformasi menjadi identitas baru ketika sudah kembali ke kampung halaman. Bahkan tak jarang juga di balik upaya penyatuan itu juga tetap ada sisi-sisi identitas yang ditonjolkan, baik etnis, wilayah, ataupun kebangsaan.

Abdul Wahid (2020) menyebutkan identitas seorang jamaah haji juga ditampilkan melalui makanan atau kuliner khas yang dibawa dan disajikan kepada jamaah yang lain. Bukan tanpa alasan, sebab mereka berpikir beberapa hari akan meninggalkan kampung halaman tentu tak akan menemukan kuliner khas daerah mereka di tanah haram ataupun selama dalam perjalanan. Membawa bekal yang cukup banyak dan bisa dibagi-bagikan ke jamaah lain adalah satu ciri khas jamaah haji Indonesia. Hal itu juga sebagai upaya merekatkan silaturahmi antar jamaah meski berbeda latar belakang wilayah, suku, ataupun profesi. Melalui interaksi baik selama dalam perjalanan menuju Makkah ataupun ketika sedang melaksanakan ibadah Haji itulah identitas itu melebur, atau bahkan makin menguat dengan kesamaan tujuan, salah satunya kaitannya dengan nasionalisme ketika berada di wilayah yang jauh dari tempat asal.

Haji dalam pandangan Wahid (2020) juga merupakan dimensi spiritual yang hanya bisa ditemukan sekali setahun dan di tempat yang khusus untuk menguji seseorang apakah benar-benar dengan niatan ibadah atukah sekedar mengikuti persepsi mapan dalam masyarakat bahwa belum disebut kaya seseorang itu jika belum berhaji. Begitu juga dengan anggapan bahwa Haji semata semacam ziarah rekreasi mendatangi tempat-tempat bersejarah dalam tradisi Islam. Akan tetapi, makna inti haji melalui rukun-rukun yang kesemuanya

memang berziarah supaya calon haji itu sadar diri bahwa mereka mendapatkan kesempatan, dan kenikmatan yang besar hingga bisa menunaikan haji ada misi besar yang harus mereka penuhi. Yakni menjadi manusia yang kembali fitrah (kesucian) diri dari refleksi perjalanan mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS sebagai peletak dasar Haji dan perjalanan Rasulullah SAW dalam menebarkan agama Rahmat untuk alam semesta.

E. Haji Sebagai Kesatuan Umat

Di satu sisi haji dianggap sebagai upaya menyatukan umat dari berbagai penjuru bahkan yang paling jauh sekalipun, istilah Al Qur'an menyebutnya *min Kulli fajjin 'amiq* (dari semua tempat terdalam, Q.S. Al Hajj:27), tetapi ketika berangkat dari tanah air atau kampung halaman masing-masing calon haji ada perbedaan yang menonjol. Sebut saja perbedaan antara calon jamaah haji reguler dan haji plus, terdapat perbedaan dari sisi ekonomi, ongkos yang berbeda, lama perjalanan haji, bahkan akomodasi selama prosesi haji juga akan berbeda. Dari perbedaan ini pun ternyata ibadah yang khusus ini pun cukup bias kelas, baik dari persiapan maupun selama prosesinya. Akan tetapi, hal yang patut menjadi catatan bersama juga terkait dengan kuota dan daftar tunggu antara cara keberangkatan calon haji tersebut. Haji Reguler dalam konteks di Lombok atau NTB secara umum bisa disebut menduduki antrian paling lama ketika akan mendaftar sebagai calon haji. Terakhir lama daftar tunggu untuk calon jamaah haji dari propinsi NTB mencapai angka 50an tahun. Artinya, geliat masyarakat NTB untuk melaksanakan ibadah haji cukup tinggi hingga harus rela menunggu sekian tahun.

Dalam konteks masyarakat Sasak, seorang yang berhaji juga dianggap sebagai tamu agung, yang mendapatkan kesempatan mendapat panggilan Allah SWT. Tamu yang dalam hal ini mempunyai tujuan yang sama untuk menyempurnakan agama atau juga menyucikan diri sebagai hamba yang berserah. Akan tetapi di balik tujuan penyatuan umat melalui ibadah haji ini, masih juga terbersit dalam diri seseorang bahwa ia merasa perlu untuk show up, menunjukkan dirinya siapa, atau juga mengunggah foto bersama publik figur yang kerap muncul di layar kaca. Hal ini kerap menjadi semacam godaan bagi jamaah haji untuk selalu update di media sosial terkait prosesi ibadah hajinya. Mengutip kembali dari tulisan Iswandi Syahputra (2022) bahwa fenomena tersebut tak terlepas dari perkembangan teknologi maupun media yang membuat orang bisa serba cepat memproduksi informasi, baik untuk tujuan informatif maupun pamer, yang terkadang juga menjadi ruang kecepatan (dromospheric) atas terciptanya hoax atau informasi fraud.

Visi kesamaan di mata Allah SWT melalui pakaian Ihram dan prosesi di dalamnya adalah poin inti di balik pendidikan (tarbiyah) keumatan yang harus ditangkap oleh seorang haji. Tetapi tak jarang juga visi kebersamaan, kesamaan itu menjadi ironi dengan perbedaan-perbedaan yang kerap tak terhindarkan selama pelaksanaan ibadah haji. Jamaah yang tempat menginapnya jauh dari Masjidil Haram tentunya harus bersiap lebih awal supaya bisa tawaf lebih dekat dengan Ka'bah. Dari perbedaan jarak akomodasi ini saja bisa dilacak bagaimana jamaah haji pun dibedakan sedemikian rupa tergantung sejauh mana kemampuan membayar hotel untuk menginap. Biro-biro travel haji ataupun Umrah termasuk yang cukup berperan di sini

membentuk kelas-kelas dalam pelaksanaan ibadah haji. Mereka menawarkan biaya-biaya perjalanan haji dan umrah dianggap murah, yang mungkin bagi orang miskin dengan uang sebanyak itu bisa menghidupi beberapa keluarga selama beberapa bulan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk ibadah haji atau umrah akan dianggap impas dengan kepuasan yang didapatkan selama prosesi ibadah haji atau umrah.

Dalam konteks pembangunan keumatan, biaya-biaya pelaksanaan ibadah haji yang dikumpulkan negara seharusnya bisa mempunyai dampak yang lebih besar untuk masyarakat. Misalnya saja dari sekian tahun sejumlah jutaan calon jamaah haji mengantri, berapa ratus milyar uang yang dikelola, daripada disimpan di Bank yang hanya menguntungkan elit. Akan lebih baik dana itu diputar untuk diberikan bantuan usaha kepada rakyat kecil dengan mekanisme hutang yang harus disepakati bersama tenggat pelunasannya. Isu terakhir bahwa dana haji juga akan digunakan untuk pembangunan Ibu kota Negara yang baru cukup beralasan untuk ditolak. Sebab itu hanya akan dinikmati segelintir elit, yang juga manfaatnya untuk umat belum bisa dipastikan.

Dalam konteks masyarakat Sasak, pelaksanaan ibadah haji tidak melulu persoalan ibadah dan kesalihan individu, tetapi juga sarat dengan kesalihan kolektif. Misalnya saja dalam persiapan sebelum keberangkatan, calon jamaah haji tak akan bisa mengadakan syukuran sendiri tanpa bantuan orang lain. Doa-doa keselamatan, wirid yang dilantunkan bersama adalah bagian dari kesalihan sosial yang terwujud dari antusiasme masyarakat mendukung keberangkatan calon jamaah haji dengan bergembira.

Bukan tanpa alasan masyarakat Sasak, terutama dari Lombok Timur ketika mengantar calon jamaah haji akan berlomba-lomba untuk mengiringinya sampai keberangkatan di bandara. Bahkan mereka rela menginap dengan membangun tenda terpal di pinggir jalan raya sekitar asrama haji di Mataram tempat calon jamaah haji menginap. Mereka tak peduli berapa biaya dan non-materil yang mereka habiskan dengan keikhlasan mengiring calon jamaah haji. Setiap tahun ketika pemberangkatan calon jamaah haji dari NTB selalu penuh sesak dengan geliat masyarakat Sasak turut mengantar. Mestinya ini juga menjadi catatan bagi pengelola asrama haji terkait selalu membludaknya jamaah pengantar calon haji hingga menimbulkan kemacetan bekilo-kilo di jalan sekitar asrama Haji NTB. misalnya dibuatkan saja lapangan khusus untuk masyarakat yang ingin berziarah dengan calon haji sehingga mereka juga tidak perlu menginap di pinggir jalan yang hanya ditutupi terpal dan di-tabengi mobil mereka.

Perjalanan spiritual seorang calon haji sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum keberangkatan. Ketika seseorang sudah tahu bahwa ia ditetapkan sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun itu, berbagai macam persiapan akan ia persiapkan untuk membangun citra sebagai calon haji. Mulai dari rutinitas yang berubah, bahkan simbol-simbol melalui kostum yang dikenakan juga mulai berubah. Seperti halnya paparan pembukaan dari Abdul Mu'ti pada pengajian tentang haji dan pembaruan Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah pada 18 Juli 2022, ia menguraikan bahwa seorang haji cukup potensial sebagai agen perubahan sosial keagamaan di masyarakatnya, terutama sekali ketika mereka

bersentuhan dengan beragam pemikiran selama di Makkah. Umat yang terpusat di Makkah untuk prosesi haji sangat memungkinkan juga sebagai ajang bertukar pikiran tentang kondisi umat Islam dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di berbagai negara asal jamaah haji. Abdul Wahid dan Atun Wardatun menceritakan pengalaman mereka selama berhaji di tahun 2019, dan mereka juga menjadi pembicara pada forum intelektual dari berbagai macam negara yang membicarakan tentang haji dari beragam sudut pandang keilmuan. Mereka mendapat kesempatan berbicara tentang haji dalam konteks di Indonesia sebagai sebuah ibadah yang juga membentuk kelas sosial. Kelas sosial yang dimaksud sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa ibadah haji adalah kesempatan yang tidak mudah dan tidak semua orang berkesempatan melaksanakannya bahkan meski orang di Arab Saudi sekalipun. Momentum dan kesempatan itu yang menjadikan seorang yang beribadah haji akan disamakan dengan orang suci yang sudah sempurna (kaffah) islamnya dibanding yang lain yang belum berhaji (Wahid, 2020).

Bahkan tak jarang juga haji dijadikan sebagai tameng untuk mendapatkan legitimasi atas kuasa-kuasa yang diperoleh dalam masyarakat. Misalnya seorang tokoh masyarakat yang sudah berhaji akan semakin disegani daripada sebelum dia berhaji. Calon-calon penguasa tingkat paling rendah pun akan menggunakan gelar haji ini untuk kepercayaan diri mereka ketika mencalonkan diri agar dipilih. Akan tetapi tak semua haji akan berpikiran seperti itu, ada individu-individu tertentu yang juga seorang haji dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai penggerak dalam masyarakat, juga tampil sederhana sebagaimana masyarakat biasanya. Gelar haji bukan

mereka anggap sebagai hal yang prestisius, tetapi hanya sebagai penanda bahwa mereka pernah mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah tersebut.

Beberapa haji dalam konteks masyarakat sasak juga banyak yang menjadikan gelar sebagai legitimasi atas kedudukannya dalam masyarakat. Misalnya, seorang haji seolah mempunyai otoritas penuh dalam mengelola masjid ataupun dalam konteks keagamaan yang lainnya. Dalam beberapa konteks masyarakat Sasak, gelar haji sebagai kapital simbolik masih cukup mapan membentuk kelas sosial baru yang sebelumnya masyarakat Jajarkarang, kemudian termasuk juga menjadi bagian dari elit di masyarakat.

F. Meningkatnya Tren Umrah pasca panjangnya Antrian Haji.

Pasca dua tahun tertundanya pelaksanaan ibadah haji pada 2020 dan 2021 karena Pandemi Covid-19 semakin memperpanjang antrian untuk bisa menjadi calon jamaah haji. Begitu juga untuk daftar tunggu jamaah NTB yang sudah mendaftar belasan tahun lalu. Beberapa orang yang keberangkatannya di tahun 2020 akhirnya ditunda ke 2022, tetapi di tahun 2022 pun ada peraturan bahwa batas usia calon jamaah haji tidak boleh melebihi 65 tahun, akhirnya tidak jadi juga berangkat. Begitu juga yang rencana keberangkatannya di tahun 2021 akhirnya dimundurkan lagi ke dua tahun berikutnya. Terkait aturan batas usia untuk calon jamaah haji yang boleh berangkat sebenarnya cukup dilematis bahkan diskriminatif. Mereka yang sudah sekian tahun menunggu malah gagal juga karena batas usia, padahal merujuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada aturan seperti itu. Bahkan bisa jadi mereka yang menemui ajal ketika prosesi

ibadah haji akan dianggap mendapatkan keberkahan yang lebih, meninggal di tanah suci.

Tak sedikit juga jamaah yang tahun keberangkatannya semakin lama karena dimundurkan akhirnya menarik porsi dan tabungan hajinya, lalu digunakan untuk berangkat umrah. Dengan alasan salah satunya kekhawatiran bahwa ajal bisa saja tidak sampai pada tahun tersebut. Trend keberangkatan umrah karena lamanya antrian haji ini juga menjadi fenomena menarik di masyarakat muslim Sasak Lombok. Segala motif ekonomi yang dilakoni masyarakat hampir selalu ada misi untuk berangkat haji dari modal-modal ekonomi yang dikumpulkan. Seiring dengan semakin mudahnya jalan menuju ka'bah seperti yang diiklankan biro perjalanan (travel) haji ataupun umrah, maka geliat itupun beralih ke perjalanan umrah. Salah satu warga Desa Tembeng Putik yang sudah berusia di atas 65 tahun dan tahun keberangkatannya ditunda di tahun 2022, sempat berniat juga untuk mengambil tabungan hajinya untuk digunakan umrah. Tetapi beberapa warga memberikan pandangan berbeda terkait ibadah haji yang walaupun belum pasti keberangkatannya kapan, tetapi yang jelas niatnya berhaji juga jangan sampai diubah. Inaq SH misalnya di awal tahun 2022 lalu sudah mengukur baju dan persiapan lainnya untuk berangkat haji. Batas usia justru menjadi penghalang ia tak jadi berangkat, tetapi sebagai orang Sasak yang yakin dengan terminologi bahwa yang bisa berhaji itu adalah tamu yang dipanggil Allah SWT, maka ia pun tidak terlalu mempermasalahkannya itu (Wawancara 2 Mei 2022).

Konteks haji sebagai ibadah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, tentu definisi mampu ini juga menjadi ambigu di tengah

geliat masyarakat yang ingin berhaji semakin tinggi. Travel umrah pun semakin gencar mempromosikan bahwa umrah juga tak jauh beda dengan haji, makanya disebut haji kecil. Travel umrah yang semakin menjamur seolah mendapatkan peluang, menjadi pilihan masyarakat untuk bisa ke Makkah dengan lamanya daftar tunggu haji. Komodifikasi agama yang terjadi dalam konteks ibadah ke tanah suci Makkah ini semakin menunjukkan bahwa agama juga bisa menjadi sumber profit dengan logika kapitalisme yang mengeruk keuntungan di balik legitimasi dalil ibadah dan upaya menunjukkan kesalihan.

Beberapa orang dengan ekonomi yang mapan misalnya menunjukkan kesalihan dengan berulang kali berangkat umrah, bahkan bisa tiap bulan. Lalu dia menjadi buah bibir di kampungnya karena ibadah tersebut. Perlakuan masyarakat kepada pelaku umrah juga tak jauh beda dengan subyek haji. Di dusun Langgalawe desa Mas-Mas, kecamatan Batukliang Utara, orang yang melaksanakan umrah disamakan dengan yang berangkat haji. Jika calon haji mengadakan begawe (hajatan) syukuran haji dengan secara besar-besaran, begitu juga dengan calon umrah, mereka juga mengadakan begawe besar tergantung kemapanan ekonominya. Seminggu sebelum keberangkatan calon umrah, mereka juga mengadakan doa setiap malam sampai satu malam terakhir sebelum keberangkatan. Jika jamaah umrah di kampung itu lebih dari tiga, maka akan digelar acara zikran dan secara kolektif mendoakan mereka yang akan berangkat. Hampir tidak jauh beda tradisi menyambut calon haji dan umrah. Sakralitas Makkah sebagai tujuan menjadikan mereka yang menuju ke sana dianggap individu yang akan menyempurnakan keislaman mereka dan sepulangnya akan menjadi manusia baru. Jika

pada calon haji akan didoakan semoga mendapatkan haji mabrur, maka pada umrah juga didoakan semoga mendapatkan umrah yang mabrur.

Keinginan masyarakat untuk melaksanakan umrah bisa dikatakan sebagai wisata religi yang dibalut ibadah. Banyak jug yang menjadi peminat umrah adalah para haji yang sudah lama menunaikan ibadah haji. Mereka berangkat melalui umrah seolah ingin bernostalgia dengan masa-masa perjalanan haji dahulu. Pada tahun-tahun di bawah 2000an siapa yang mempunyai kapital ekonomi yang mapan akan dengan mudah berangkat berhaji. Bahkan bisa setiap tahun jika mampu membayar ONH. Tersebutlah yang cukup terkenal yakni Haji Zainuddin Kamal yang setiap tahun berangkat ke makkah untuk berhaji. Setiap selesai lebaran menjadi momen penting bagi orang-orang untuk mendatangi haji Zainuddin, berziarah pada calon haji, sekaligus meminta doa agar bisa seperti beliau, dapat berangkat berhaji. Setiap tahun keberangkatannya ke Makkah ternyata sekaligus juga menjenguk anaknya yang sedang belajar di Madrasah Shaulatiyyah. Tetapi dengan keberangkatannya setiap tahun tersebut menjadikan ia dianggap sebagai orang paling kaya di Lombok. Karena memang betul jika ditelusuri dari usaha-usaha yang dimiliki. Mulai dari hasil pertanian, toko-toko perlengkapan, jualan di pasar, hingga bisnis dalam skala besar lainnya. Setiap tahun keberangkatannya ke Makkah masyarakat selalu antusias untuk menyambutnya.

Fenomena pengulangan haji ataupun umrah oleh individu-individu yang mempunyai kapital ekonomi yang mapan selain untuk mengukuhkan posisi subyek tersebut di masyarakat, bisa jadi juga

sebagai upaya mengejar religiusitas, kesalihan yang ingin ditampilkan melalui ibadah haji. Akan tetapi sebenarnya, dengan berhaji sekali saja sudah cukup mengukuhkan identitas subyek haji, bahwa mereka mau mengulang haji berapa kali pun tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sama dengan ketika pertama kali berhaji. Tetapi persepsi masyarakat bisa saja akan menganggap bahwa subyek haji yang sekian kali berhaji atau mengulang berhaji adalah individu dengan religiusitas yang tinggi, kapital ekonomi yang mapan, serta kelas sosial yang berbeda dengan haji-haji lainnya.

Dalam penelusuran peneliti maupun observasi yang telah dilakukan, sebenarnya tidak ada perlakuan khusus pada subyek haji yang melakukan pengulangan haji. Mereka tetap hanya akan disematkan gelar satu huruf H. di depan namanya, atau dipanggil Tuan Aji (pak Haji). Tetapi terkait tradisi berhaji maupun proses sebelum keberangkatan dan pasca kepulangan hampir sama dengan penyambutan calon-calon haji seperti biasanya. Tahun-tahun belakangan dengan panjangnya antrian untuk mendapatkan porsi haji, pengulangan haji tidak bisa dilakukan dengan mudah seperti tahun-tahun terdahulu. Bahkan Badan penyelenggara Haji akan memberikan sanksi bagi individu yang sudah berhaji dan mau melakukan pengulangan haji secara reguler. Tetapi melalui haji plus atau haji Furoda mungkin tidak dibatasi. Haji Furoda, ONH Plus juga turut menyumbang bentuk-bentuk pembedaan kelas sosial dalam pelaksanaan haji, terutama dikaitkan dengan basis-basis ekonomi. Haji Furoda dianggap sebagai haji tamu dengan undangan. Biayanya bisa 10 kali lipat dari haji reguler yang menunggu sekian puluh tahun. Haji dengan ONH Plus lebih murah dari haji furoda, tetapi tetap saja

bahwa upaya pembedaan keberangkatan jamaah dengan biaya-biaya tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji juga tidak terlepas dari akumulasi kapital yang kadang juga menjadi incaran para pengelola travel ONH Plus. Dalam hal ini haji juga menjadi arena kontestasi perebutan basis-basis ekonomi dari pemodal, yakni pemilik travel. Kontestasi yang terjadi bukan hanya persaingan mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga upaya membangun legitimasi dengan mewacanakan kesempurnaan ibadah haji, kepuasan jamaah melalui travel mereka dibimbing secara maksimal oleh para tuan guru yang menjadi pembimbing manasik.

G. Kapital Simbolik Haji perempuan.

Perempuan Sasak yang mendapatkan kesempatan untuk berhaji dalam penelusuran peneliti tetap mendapatkan posisi yang berbeda di masyarakat sesama perempuan daripada yang belum berhaji. Mereka juga kadang mengkonstruksi identitas sesama haji perempuan melalui simbol-simbol atau kostum yang digunakan. Di kota Mataram misalnya pengajian untuk komunitas haji perempuan biasanya diinisiasi oleh perempuan-perempuan muslim yang mempunyai modal intelektual keagamaan yang mapan. Begitu juga ketika seorang perempuan sudah berhaji, seolah menjadi legitimasi posisinya dalam masyarakat. Kapital simbolik dengan panggilan Bu Hajjah atau dalam konteks Sasak Inaq Tuan Aji, di dalamnya ada kelas sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat ataupun oleh subyek haji itu sendiri.

Sebutan Inaq Tuan biasanya disematkan pada perempuan dari kalangan masyarakat biasa atau jajarkarang, baik dengan tidak adanya

gelar kebangsawanan, tidak adanya gelar pendidikan, ataupun bukan suami dari elit di masyarakat. Sementara perempuan dari kalangan bangsawan, atau yang tingkat pendidikannya tinggi (minimal sarjana), berprofesi sebagai guru, atau istri dari suami yang mempunyai kedudukan di masyarakat, biasanya akan dipanggil dengan sebutan Ummi. Akan tetapi legitimasi seorang perempuan yang sudah berhaji tetap mendapatkan tempat yang berbeda di masyarakat dari pada yang belum berhaji. Jika dalam beberapa tradisi masyarakat bahwa seorang istri kyai atau nyai dianggap juga mewarisi kharisma seorang kyai, tuan guru, maka ketika dia sudah berhaji, legitimasi itu akan semakin mapan. Bahkan ia akan dianggap sebagai seorang perempuan suci, dengan kapital simbolik yang dimunculkan melalui konsepsi lembaga tempatnya bernaung, atau juga disebut-sebut oleh suaminya ketika pengajian atau tokoh-tokoh agama di sekitarnya.

Kapital simbolik seorang hajjah dalam masyarakat bisa diidentifikasi melalui simbol-simbol, baik itu kostum ataupun melalui panggilan sehari-hari di masyarakat. Melalui kostum biasanya seorang hajjah akan menggunakan gamis, lalu kerudung ataupun penutup kepala seperti topi berbentuk bundar dan di luarnya akan ditutup dengan kerudung. Tutup kepala yang menjadi ciri khas hajjah dalam masyarakat Sasak disebut "sorpot" mirip seperti topi haji yang berfungsi sebagai penutup kepala dan rambut yang dimasukkan di dalamnya.

Akan tetapi meski seorang perempuan sudah berhaji, legitimasi kapital simboliknya tidak se-mapan seorang haji laki-laki. Seorang tokoh agama (guru ngaji, penceramah) yang awalnya dipanggil ustadz, ketika sudah berhaji gelarnya di masyarakat bisa saja kemudian

menjadi Tuan Guru Haji. Tetapi pada perempuan, meski intelektualitas atau gelar kesarjanaannya di bidang ilmu agama cukup tinggi, dan meski sudah berhaji juga, tidak serta merta kemudian akan ditokohkan di masyarakat. Jika seorang haji laki-laki mendapatkan legitimasi kapital dengan diberikan kesempatan sebagai imam, memimpin acara tahlilan atau acara-acara keagamaan lainnya, pada subyek haji perempuan hal itu tidak berlaku. Dalam konteks ketokohan agama patriarki masih cukup mapan dalam masyarakat Sasak. Tokoh agama selalu laki-laki dan disebut Tuan Guru, tidak ada Puan Guru atau nyai guru. Seorang laki-laki yang menempuh pendidikan di timur tengah, selesai studi dan kembali ke masyarakatnya langsung disematkan gelar Tuan Guru Haji (TGH), sementara pada perempuan tidak ada. Jika bisa disebut bias gender sebenarnya hal ini lebih ke pada konstruksi sosial masyarakat Sasak yang masih memposisikan perempuan sebagai kelas kedua dalam masyarakat. Meski ulama-ulama perempuan sudah banyak dimunculkan gaungnya, dan dijadikan sebagai konsep representasi kesamarataan (equity) terhadap laki-laki, tetapi dalam masyarakat Sasak masih cukup mapan dominasi sudut pandang laki-laki (male gaze) dalam pelaksanaan ritus-ritus tradisi.

H. Haji dalam Konteks Dunia Melayu

Penyematan gelar haji atau disingkat H. (Haji) untuk laki-laki, dan Hj. (Hajjah) untuk perempuan di depan nama pada masyarakat Indonesia banyak disebut merupakan warisan kolonial Belanda sebagai strategi kontrol pada subyek haji. Akan tetapi catatan Snouck Hurgronje (2006) misalnya dalam *Mekka in The Later Part of Ninetenth*

Century menyebut bahwa tidak ada sebenarnya legitimasi dari pemerintah Saudi ataupun Imigrasi yang mewajibkan seseorang dicap gelar haji sepulang dari Makkah. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi kontrol melalui gelar haji yang dimaksud sebenarnya lebih spesifik diberikan kepada subyek-subyek tertentu yang sudah disinyalir oleh pemerintah kolonial akan menjadi pemicu tindakan revolusioner. Akan tetapi semakin banyak yang berminat ke tanah suci, akhirnya kebijakan itu pun berlaku untuk semua, bahwa mereka yang akan ataupun yang kembali dari Makkah harus dilaporkan sebagai haji baru. Itulah salah satu upaya kontrol untuk mengimbangi gerakan-gerakan para haji yang dikhawatirkan membahayakan pemerintahan kolonial Belanda.

Sementara pada masyarakat Melayu (Khususnya Malaysia, Singapore) gelar Hj. itu diberikan pada Haji laki-laki, dan haji perempuan (Hajjah) disematkan gelar HjH. Upaya membedakan sematan gelar haji ini bisa ditelisik pada perbedaan tata kebahasaan antara Melayu dan Indonesia. Pada tata bahasa Arab singkatan gelar haji juga digunakan hj. (huruf Ha' dan Jim lalu tanda titik). Sementara untuk perempuan menggunakan Hajjatun (huruf Ha', jim, dan ta' marbutah) sehingga dibaca Hajjah. Penulisan transliterasi Arab ke melayu bisa jadi diakomodasi oleh masyarakat melayu dalam penulisan gelar haji ini. Dalam masyarakat Sasak yang juga mapan menggunakan aksara Arab-Melayu dalam tulisan, gelar haji tetap ditulis seperti pada umumnya menggunakan huruf latin. Haji untuk laki-laki tetap disingkat dengan huruf Ha' lalu tanda titik, dan untuk perempuan yakni huruf Ha' dan Jim lalu tanda titik. Kosepsi tentang perbedaan bangsa kolonial yang menjajah dunia melayu dengan

Indonesia sehingga berbeda penyematan gelar haji tentu saja hal spekulatif dalam pengambilan kesimpulan. Belum ada kajian cukup relevan yang membahas tentang itu. Tetapi dari sisi kajian linguistik hal ini bisa ditarik pada perbedaan kata serapan yang digunakan. Dalam tulisan Snouck ketika dia menulis nama seorang haji maka disingkat dengan H. , maka bisa jadi pemapanan yang dilakukan oleh Snouck diikuti oleh pemerintah kolonial kala itu untuk penyematan gelar haji pada orang-orang Nusantara.

Sementara pada masyarakat Melayu (Malaysia) yang di bawah kolonialisme Inggris transliterasi Arab ke latin biasanya cukup condong tanpa mengubah sistem fonetis. Seperti yang dicontohkan di atas, huruf ha' dan jim dalam bahasa Arab untuk gelar haji laki-laki, ditransliterasi ke huruf latin dengan huruf 'H' dan 'J' (Hj.). Begitu juga pada gelar Hajjah yakni Ha', Jim, dan ta' marbutah yang ketika dibaca di akhir kata menjadi huruf Ha mati, sehingga ditransliterasi ke huruf latin menjadi huruf 'H', 'J', dan 'H' (Hjh.). Akan tetapi perbedaan simbolisasi haji pada dua entitas Melayu bukan sesuatu yang penting untuk dipersoalkan, tetapi sebatas penelusuran historis bagaimana haji dimapankan dalam konteks masyarakat Melayu yang cukup mapan keberislamannya.

Haji di Malaysia dari beberapa penelusuran kawan peneliti yang sedang studi di sana, menyebutkan justru ketika sudah berhaji simbolisasi gelar tersebut hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia. Para haji banyak yang sering menggunakan jubah (gamis) putih, peci kadang hitam juga, dan surban yang tak boleh tertinggal. Dari sisi intensitas ibadah, bahkan cenderung para haji cukup intens di tempat-tempat ibadah, menjadi Imam, khatib, atau mengisi kajian-

kajian pendek setelah shalat (Riswan Hadi, Wawancara, 22 Agustus, 2022).

Hal lainnya yang cukup penting ditonjolkan juga terkait sisi filantropi seorang haji yang semakin tinggi setelah kembali ke masyarakat. Para haji kaya di Malaysia akan menjadi donatur yang cukup intens menyumbangkan hal-hal materil untuk kepentingan masyarakat muslim di lingkungannya. Hal ini menunjukkan spirit religiusitas yang dibangun selama pelaksanaan ibadah haji cukup mapan ditarik ke konteks pasca haji di masyarakatnya. Meski motif atau niatan individu hanya dia dan Tuhan yang tahu, tetapi dengan geliat filantropi yang cukup mapan digaungkan bisa menjadi titik mulai untuk melihat peran-peran para haji pasca kembali ke kampung halaman mereka.

BAB IV

PERAN SUBYEK HAJI DALAM MASYARAKAT SASAK

Meneroka tentang peran haji dalam konteks lokal Sasak pada masa-masa kolonial Bali ataupun bangsa asing (Belanda, Jepang) tidak terlepas dari sisi historis mereka sebagai pengajar agama Islam di masyarakat. Mereka yang awalnya mendapat sematan Guru Ngaji kemudian setelah berhaji menjadi Tuan Aji (Tuan Haji), ustadz, dan yang terakhir lebih populer Tuan Guru Haji (TGH). Para Haji yang cukup populer dengan peran sebagai pelopor melawan penjajahan dalam konteks Nusantara yakni Haji Samanhudi, Haji Misbach, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan, Haji Wahab Chasbullah, dan lainnya merupakan manusia-manusia haji yang banyak bersentuhan dengan pemikir-pemikir muslim lainnya selama berada di tanah suci Makkah, dan pemikiran-pemikiran itu dijadikan sebagai dasar untuk membangunkan masyarakat yang tertindas baik secara kultural, ekonomi, maupun intelektual.

Dalam konteks Sasak ada beberapa Haji yang cukup populer sebagai tokoh sentral melawan penjajahan Jepang di kota kabupaten, misalnya di Lombok Timur. Guru Mukminah atau Haji Abdul Madjid, bapak dari TGH. Zainuddin Abd. Madjid merupakan pelopor pengajar Agama di Selong kala itu. Nama-nama lain yang belakangan lebih familiar dengan sebutan Tuan Guru merupakan para haji awal di masyarakat Sasak yang berkesempatan menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu di Makkah. Sebut saja Tuan Guru Umar Kelayu, Tuan Guru Amin Sesela, Tuan Guru Rais Sekarbela dan

beberapa tokoh-tokoh Agama yang mapan dengan intelektualitas mereka juga merupakan seorang haji pada masa-masa awal geliat Islam yang mapan secara syariat. Para haji yang kemudian secara kultural dijadikan sebagai pusat (center) pengetahuan keislaman, menjadikan seorang haji mendapatkan tempat yang mapan dalam masyarakat Sasak. Haji Khalil cukup terkenal pada masyarakat Mamben dengan keilmuan agamanya meski pada masa-masa ia muda belum menjadi haji, tetapi sudah bertugas di masyarakat sebagai pengajar manasik haji. Sebenarnya cukup ironis, tetapi karena tak banyak yang bisa membaca tulisan arab, dan di kitab-kitab itu menjadi rujukan pokok bagi masyarakat yang akan pergi berhaji. Setelah sekian tahun menjadi pengajar manasik haji bagi yang akan berhaji, akhirnya ia pun mendapatkan kesempatan untuk berhaji dengan dibiayai oleh kepala desa, sekaligus menjadi pembimbingnya. (Wawancara dengan Hafiz, generasi ke-3 keturunan H. Khalil).

Menjalankan ibadah haji adalah proses menjadi (becoming), tentunya menjadi lebih baik, baik dalam tataran pribadi ataupun menjadikan orang lain dan lingkungannya berubah ke arah lebih baik dengan kehadirannya. Tak semua peran bisa diampu oleh seorang haji, akan tetapi proses menjadi itu juga bukan sekali jadi setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Tetapi itu adalah proses sepanjang manusia haji itu sadar apa yang harus ia transformasikan dalam kehidupan pasca pelaksanaan ibadah Haji (Wahid, 2020). Dalam masyarakat Sasak, pandangan bahwa seorang haji adalah manusia sempurna, salah satunya sempurna keislamannya, tidak serta merta harus diamini oleh semua, terlebih bahwa mereka akan dianggap tanpa cela dan bisa menjadi elit baru dengan status tersebut. Akan

tetapi banyak hal yang perlu direfleksikan oleh seorang haji terkait posisinya dalam masyarakat sebagai manusia baru (jika bisa disebut demikian), termasuk jika dikaitkan dengan perannya di lingkungan tempat tinggal.

A. Peran Haji Dalam Tindakan Sosial

Peran seorang haji dalam masyarakat jika dikaitkan dengan konsep tindakan sosial (social act) merujuk konsepnya Max Weber (1961) tidak terlepas dari tiga dimensi yang menjadi poin penting dari konsep tersebut. Tindakan Tradisional kaitannya dengan tradisi turun temurun yang dilakoni dalam prosesi perjalanan ibadah haji baik sebelum berada di Makkah bahkan sampai kepulangannya. Kesemuanya merupakan kesatuan tindakan dalam praktik kebudayaan masyarakat Sasak sebagai rangkaian tradisi Behaji. Sementara tindakan afektif berkaitan dengan emosi, spiritualitas manusia haji yang menjadikan ibadah haji sebagai pembuktian dari ekspresi keimanan dan keislaman. Karena jika bukan karena iman, keyakinan atas syariat yang diperintahkan tentu ibadah haji ini akan menjadi berat. Tetapi dengan spiritualitas, emosional manusia haji terpupuk dengan tujuan menghadap sebagai seorang hamba.

Tindakan afektif dari prosesi haji ini juga bisa dihubungkan dengan fetishism (kepuasan) dari manusia haji dengan adanya spiritual, emosional tersebut. Tidak bisa dibandingkan kebahagiaan manusia haji ketika berada di Makkah dengan kebahagiaan duniawi yang selama ini diukur melalui kepemilikan materi. Bahkan mereka rela mengeluarkan materi sedemikian mahal untuk merebut kebahagiaan emosional tersebut dengan dasar perintah syariat yang

diyakini. Manusia haji adalah manusia yang rela menghadapi rintangan bahkan meski dengan menunggu sekian puluh tahun untuk bisa menjalani ibadah tersebut.

Sementara konsep lainnya dari Weber yakni tindakan rasionalitas nilai, hal ini bisa dikaitkan dengan banyak sekali tercantum nilai-nilai kebaikan yang bisa direfleksikan dari prosesi haji bahkan sebelum berada di Makkah. Tradisi menyambut keberangkatan calon haji pun merupakan tindakan berbasis rasionalitas nilai dari masyarakat Sasak. Nilai pendidikan, religiusitas, kesatuan dan kebersamaan, moralitas, juga toleransi merupakan nilai-nilai yang bisa direfleksikan dari tradisi behaji masyarakat Sasak.

Rasionalitas nilai ini juga tidak terlepas dari makna-makna simbolik yang diekspresikan oleh masyarakat dalam menyambut calon haji. Seperti yang diulas pada bab sebelumnya bahwa momen ziarah makam wali-wali atau tokoh Islam dengan mengelilingi Lombok itu pun sebagai simbolik bahwa ibadah haji di Makkah-Madinah pun sedemikian rupa mengunjungi tempat-tempat bersejarah sebagai napak tilas perjalanan Rasulullah SAW dalam menebarkan Islam. Sementara nilai-nilai dalam tradisi behaji juga cukup sarat dengan hal-hal baik yang menjadi upaya pembelajaran bagi calon haji untuk selalu bertindak dalam kebaikan. Dasar nilai yang secara rasional diyakini dan menjadi tujuan inilah yang diekspresikan oleh masyarakat dan calon haji melalui tindakan-tindakan yang merepresentasikan nilai-nilai kebaikan agar menjadi habitus.

B. Haji dan Proses Menemukan Fethisism

Kembali ke bahasan fethisism, ritual haji tentu mempunyai efek yang berbeda-beda bagi masing-masing manusia haji. Orang awam yang dengan intelektualitas sederhana seringkali lebih mudah untuk mendapatkan kepuasan bathin di balik makna ritual haji yang mereka jalani. Mereka dengan keyakinan yang mapan atas syariat, perintah berhaji dan menjalani kaifiyat haji secara benar sesuai anjuran dan bimbingan dari muthowif haji, akan lebih cepat menemukan fethis (kepuasan) tersebut. Manusia haji yang awam tidak akan banyak bertanya, memikirkan ataupun merenungkan mengapa prosesi ibadah haji harus seperti itu, dan makna apa di balik rangkaian-rangkaian ibadah seperti itu. Sementara manusia haji lainnya yang diberikan kelebihan ilmu, pemahaman yang mapan dengan cara berpikirkannya tentu kepuasan dalam prosesi ritual haji akan berbeda cara atau jalan menemukannya. Kepuasan itu justru akan muncul seiring pencarian dan perenungan di balik makna-makna simbolik ritual haji. Mereka tidak sekedar menjalani rukun, syarat sebatas tunai kewajiban, tetapi memikirkan kembali refleksi kehidupan sebelumnya yang pernah dijalani dan apa dampaknya dari perenungan kembali tersebut dalam prosesi mereka berhaji. Bahkan tak jarang pula masyarakat Indonesia ingin mengulang kembali haji atau Umrah karena kepuasan tersebut belum mereka dapatkan ketika berkesempatan menjalani ibadah haji (Faatin, 2019). Hal itu bisa dipicu karena pelayanan haji atau umrah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan iming-iming dari travel ketika mereka mendaftar, ataupun memang karena hasrat itu muncul untuk pencarian makna bagaimana mendapatkan kepuasan (fethisism)

itu dalam ritual haji (Wawancara dengan TGH. Aziz, Penujak 8 Juli 2022).

Sementara kaitannya dengan dahaga spiritualitas, tentu dengan tingginya minat berhaji orang Indonesia hingga muncul pembatasan kuota tiap provinsi sampai harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat Haji. Terlebih dengan penundaan selama dua tahun masa pandemi covid-19 semakin membuat jamaah resah kapan akan berangkat, terutama yang tahun keberangkatannya di dua tahun penundaan tersebut. Bahkan dengan keputusan penundaan tersebut, pemerintah Arab Saudi juga sempat mewacanakan pelaksanaan ibadah haji secara virtual melalui metaverse. Metaverse besutan pendiri facebook merupakan ruang virtual secara interface seperti realitasnya menjelajahi apa yang diinginkan oleh pengguna. Ka'bah sebagai center pelaksanaan ibadah haji dibuat sedemikian rupa menyerupai aslinya dalam ruang metaverse, sehingga memberikan pengalaman seperti kenyataannya berada di Makkah dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Kontroversi wacana pelaksanaan haji melalui metaverse karena adanya pandemi juga turut menghebohkan di Indonesia, hingga akhirnya fatwa MUI sebagai otoritas menyatakan ketidakbolehan berhaji selain dengan mendatangi langsung ka'bah dan wukuf di Arafah.

Kembali ke konteks peran subyek haji dalam masyarakat akan lebih banyak lagi dirujuk pada tindakan-tindakan sosialnya baik sebelum keberangkatan maupun pasa kepulangan ke kampung halaman. Haji HW misalnya selepas dari Ma'had di Anjani kemudian mengikuti jejak pamannya untuk menjadi TKI ke Arab Saudi, selama menjadi TKI ia memegang visa atau identitas (Ighomah) sebagai

penduduk mukim sementara, hingga akhirnya ia bisa menjadi santri di Madrasah Shaulatiyyah. Dengan jaringan sebagai alumni Ma'had dan santri di Shaulatiyyah ia pun kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai pendamping haji dari KBIH (kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang dikelola yayasan tempatnya sekolah dulu. Sekembali dari Makkah, meski tidak tamat di Shaulatiyyah tetapi ia tetap disematkan gelar sebagai haji atau dipanggil dengan sebutan tuan. Terlebih sebagai alumni Ma'had, ia juga mendapatkan tempat di masyarakat sebagai khatib Jumat, sesekali pada waktu tertentu juga mengisi pengajian di masjid.

Peran itu tidak hanya dalam konteks keagamaan, tetapi secara sosial pun subyek haji akan mendapatkan tempat yang lebih dari pada yang belum berhaji. Salah satunya ketika ada gotong royong, begawe dalam masyarakat Sasak, seorang haji tidak akan dibiarkan untuk mengerjakan hal-hal berat, bahkan mereka kadang diminta untuk duduk-duduk saja memantau. Tetapi banyak haji-haji yang masih merasa tenaganya cukup kuat untuk kerja-kerja berat akan merasa tidak nyaman dengan berpangku tangan. Peran-peran dari para haji di masyarakat juga tidak terlepas dari habitus sebelumnya dari subyek haji yang memang mapan terlibat dalam banyak hal di masyarakat. Hingga ketika dengan peci putihnya dianggap sebagai kelas sosial baru tidak menjadi tameng baginya untuk terlibat dalam masyarakat untuk kerja-kerja kolektif.

C. Haji dan Transformasi Nilai Pada Diri Subyek Haji.

Jika berbicara tujuan haji yang dikaitkan dengan perannya dalam masyarakat pasca ibadah haji, hal ini bisa dirujuk dari aktivitas-

aktivitas subyek haji sekembali di kampung halaman. Jika sebelum berhaji ia banyak terlibat dalam aktivitas yang dilihat dari sudut pandang moralitas masyarakat bahwa itu tidak baik, maka setelah berhaji ia harus mampu menunjukkan bahwa hajinya itu bisa mentransformasikan dirinya menjadi lebih baik. Dari sisi nama, tampilan juga bisa dilacak bahwa apakah haji seseorang di masyarakat Sasak itu minimal memiliki dampak untuk subyek haji itu sendiri, terlebih untuk orang lain. Misalnya sebelum berhaji, subyek haji biasa saja mengenakan celana pendek, singlet, bahkan dengan rambut yang diwarnai. Tetapi selepas menunaikan ibadah haji ketika ia mampu merubah pola-pola tersebut ke arah yang lebih bermoral dari pandangan masyarakat, tentu itu menjadi pemaparan atas kehajian subyek haji tersebut.

Penggalian lebih jauh terkait peran para haji dalam konteks postmodernitas sekarang bisa ditelusik melalui konsep Van Genep tentang Liminalitas (via Soehadha, 2015). Bahwa subyek haji di satu sisi sebagai kelas sosial baru, pada sisi yang lain ia juga harus menunjukkan ketertundukannya pada sistem moralitas yang berlaku dalam masyarakat bahwa seorang haji harus lebih bisa menjaga diri baik dalam penampilan, perbuatan, dan perkataan. Keterpinggiran subyek haji juga bisa saja terjadi jika ia justeru lebih merasa perlu untuk dihargai dengan status kehajian tersebut. Hal ini seperti ini semakin menegaskan bahwa tujuan hajinya bisa saja dianggap hanya mengejar status sosial, alih-alih akan semakin dihormati di masyarakatnya, malah akan dikucilkan dari pergaulan sosial keseharian.

Haji sebagaimana yang dikonsepsikan dalam masyarakat Sasak tentang ritual ibadah di Makkah, sementara tradisi behaji adalah konsep kebudayaan yang dikonstruksi dalam masyarakat melalui prosesi-prosesi yang lekat dengan kolektifitas masyarakat sebagai satu komunitas. Dua dekade terakhir antusias masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji memunculkan daftar tunggu yang cukup panjang dengan kemudahan membayar nomor porsi di awal lalu dilunasi nanti ketika sudah mendapatkan jadwal untuk keberangkatan. Artinya, pada waktu mendaftar kursi untuk porsi haji, sebenarnya mereka belum mempunyai cukup biaya untuk pergi haji, tetapi selama masa tunggu itu mereka akan mengumpulkan biaya-biaya tersebut sampai tercukupi. Arskal Salim dalam tulisannya menyatakan rekontekstualisasi konsep *istitha'ah* (mampu) itu perlu untuk dilakukan terutama dalam hal kemampuan secara ekonomi untuk biaya berangkat dan juga harta yang ditinggalkan untuk keluarga selama dalam perjalanan ibadah haji. Dalam pandangan Arskal Salim *istitho'ah* merupakan pra-syarat untuk menjadi jamaah haji karena dengan hal itu calon jamaah haji sebenarnya sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi tamu Allah SWT. Akan tetapi pada masa sekarang konsep tersebut lebih dominan dikaitkan dengan ekonomi, maka sistem yang ada di Indonesia terkait haji yang membuat antrian semakin panjang disebabkan karena pada waktu mendaftar porsi haji sebenarnya pendaftar belum termasuk kategori *Istitho'ah*, akan tetapi diberikan kemudahan dengan mendaftar dahulu dengan biaya untuk kursi (porsi) lalu biaya keseluruhan akan dilunasi ketika sudah mendapatkan jadwal keberangkatan.

Di satu sisi penumpukkan daftar tunggu tersebut juga dibarengi dengan penumpukkan dana-dana jamaah yang digunakan untuk mensubsidi jamaah yang akan berangkat. Dana tersebut diputar sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan pada sampai waktu tertentu akan habis digunakan untuk mensubsidi jamaah yang akan berangkat lebih dulu, sementara yang belakangan justru akan semakin dinaikkan biaya-biayanya. Kekhawatiran tersebut tentunya cukup berdasar karena semakin panjang antrian untuk berangkat, akan semakin banyak juga yang baru mendaftar. Tentunya dana jamaah yang belum berangkat itu bisa juga akan habis, sementara jutaan yang belum berangkat juga tentunya harus disiapkan dana karena uang mereka untuk biaya porsi sudah lebih dahulu masuk, maka tinggal menunggu jadwal keberangkatan dan dilunasi.

Maka salah satu yang dianggap solusi yakni dengan beralih menjadi jamaah umrah yang pada beberapa masyarakat Sasak disamakan juga dengan berhaji. Mereka yang kembali dari menunaikan ibadah umrah akan dipanggil haji juga di depan namanya, yang perempuan dipanggil bu Hajjah atau Inaq Tuan. Meningkatnya antusias masyarakat untuk melaksanakan umrah tentunya tidak terlepas juga dari peran media, biro travel, yang mempromosikan slogan kemudahan mencapai tanah suci Makkah meski dengan biaya yang hampir sama dengan biaya haji bahkan lebih besar, tetapi mereka tidak perlu menunggu antrian sampai bertahun-tahun. Konsep kapital simbolik pada gelar haji ini tentunya lebih masif lagi terjadi pada pelaku umrah. Karena dengan misi berwisata ke dua kota suci juga sudah termasuk ibadah. Konsep wisata religi dalam pelaksanaan umrah cukup mapan menjadi daya tarik untuk melakukan perjalanan

ke tanah suci dibarengi dengan kemudahan akses, fasilitas yang nyaman, sampai dengan bimbingan ibadah yang lengkap.

Di satu sisi menjamurnya travel umrah menjadi jalan untuk menjembatani minat ibadah masyarakat, di sisi yang lain terjadi komodifikasi ibadah haji menjadi ajang untuk akumulasi kapital/profit. Dampaknya banyak travel-travel yang menjanjikan kemudahan umrah dengan biaya murah dan fasilitas memadai membuat masyarakat tergiur untuk mendaftarkan, tetapi yang terjadi justru tidak jadi berangkat dengan modal yang diputar untuk membiayai jamaah yang sudah lebih dulu mendaftar, sementara sisanya tidak cukup untuk membiayai jamaah yang akan berangkat belakangan. Bentuk komodifikasi yang terjadi dalam ibadah haji ini juga dengan menyasar masyarakat yang dalam lingkungannya selalu memproyeksikan kesempurnaan keberagamaan atau keislaman itu dikaitkan dengan ibadah ke Makkah. Tidak kita pungkiri istilah *Las Vegasisasi Makkah* seperti yang dikemukakan Syafaatun Al Mirzanah adalah bentuk komodifikasi ibadah ke kedua kota suci dalam Islam dijadikan sebagai basis untuk meraup profit.

Sudut pandang masyarakat Sasak memproyeksikan ibadah ke tanah suci sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun kesalihan dan status sosial melalui gelar haji. Ibadah umrah yang biasa juga disebut haji kecil merupakan upaya untuk memperoleh status tersebut dengan menjadikan agenda wisata sekaligus sebagai agenda ibadah. Tak heran kemudian biro-biro perjalanan ibadah ke Tanah suci berlomba-lomba mengiklankan travel mereka dengan berbagai macam kemudahan dan keunggulan untuk menarik minat masyarakat agar berangkat melalui mereka. Di sisi yang lain upaya memupuk

kesadaran masyarakat tentang haji sebagai rukun islam terakhir dan penyempurna keberagamaan seorang muslim juga perlu ditanamkan dalam bentuk jika benar-benar mampu, bukan hal yang dipaksakan. Sehingga masyarakat muslim tidak terjebak pada kesadaran palsu ingin beribadah tetapi malah dengan berhutang atau menjual harta berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih urgent dan prioritas. Misalnya memberikan pinjaman untuk usaha bagi yang terlilit rentenir, menyekolahkan anak yatim, ataupun menyisihkan untuk amal-amal sosial di sekitarnya daripada dihabiskan untuk ibadah yang sebenarnya pernah dilakukan. Konsep keadilan dalam bentuk ibadah ghairu mahdah bisa menjadi catatan kritis bagi pelaku umrah yang tiap tahun berangkat pada bulan Ramadhan misalnya dengan mereka menyisihkan biaya-biaya umrah tersebut untuk kepedulian yang lebih besar secara sosial kepada umat muslim yang membutuhkan.

Haji dan Umrah ke tanah suci Makkah mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat muslim dengan kultur keagamaan yang kuat, terutama masyarakat yang berada di pinggiran, jauh dari gemerlap modernitas. Status sosial melalui gelar haji bagi pelaku haji maupun Umrah sudah cukup kuat legitimasi modal simbolik yang menjadi tujuan bagi seorang subjek haji. maka tak heran ketika gelar hajinya tidak disebut atau ditulis dalam suatu undangan atau acara, seorang subjek haji akan merasa tersinggung. Sama halnya dengan seorang sarjana yang seolah-olah tidak dihargai perjuangan kuliah selama 4 tahun atau lebih ketika gelar kesarjanaannya tidak dicantumkan. Obsesi masyarakat muslim tentang kesalihan melalui status sebagai haji tak hanya dilakoni masyarakat pinggiran dengan

kultur agraris atau bahkan marginal, tetapi kelompok-kelompok elit kelas borjuasi muslim pun juga menjadikan gelar haji sebagai upaya membangun identitas sebagai bagian dari umat. Sebagai contoh, ketika momentum-momentum pemilihan umum baik kepala daerah maupun legislatif, beberapa kontestan akan menampilkan deretan gelar pencapaian baik akademik maupun yang dilegitimasi dalam masyarakat, salah satunya gelar haji. Melalui gelar haji tersebut para kontestan dalam kontestasi politik biasanya akan mencantumkan gelar haji nya sebagai legitimasi bahwa mereka merepresentasikan masyarakat Muslim yang taat sehingga layak untuk dipilih.

Akan tetapi tentu saja tidak semua gelar haji yang disandang individu dalam masyarakat semuanya sama legitimasi pencantuman gelar tersebut. Ada juga yang memang benar-benar layak secara intelektualitas dan sikap untuk menyandang gelar haji tersebut disandingkan dengan gelar keagamaan lainnya, misalnya kyai haji, tuan guru haji, ustadz haji, dan lainnya. Sehingga pada hal tertentu memang gelar haji tersebut juga bisa dianalogikan sebagai identitas kealiman seorang individu di masyarakat.

Kemudahan akses menuju tanah suci Makkah saat ini tidak terlepas juga dari upaya negara Arab Saudi untuk mengukuhkan pengaruhnya sebagai negara kaya adikuasa baik melalui minyak maupun melalui wisata religi pada ibadah haji. Tak jarang hal itu juga menjadikan negara-negara miskin yang menjadi anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) terutama negara-negara muslim merasa perlu untuk berbagi keuntungan dari Arab Saudi dari penyelenggaraan ibadah haji. Iran misalnya pernah mencetuskan ide sosialis tentang dana-dana haji yang didapatkan Arab Saudi dikelola

bersama oleh OKI, tetapi usulan itu pun dimentalkan, bahkan beberapa priode ibadah haji Iran diblacklist tidak diberikan kuota jamaah haji. Yaman, Qatar juga termasuk negara yang diembargo oleh Arab Saudi dengan tidak diberikan kuota jamaah haji pada tahun-tahun ketika konflik di negara-negara teluk sedang memanas.

Dalam konteks Lokalitas di Lombok, Masyarakat Sasak mengkonsepsikan tentang haji dalam bentuk ritus-ritus yang tidak hanya dilakukan ketika pelaksanaan haji di Makkah, tetapi juga ritus di daerah masing-masing yang harus dilalui sebagai sebuah konsepsi adat di masyarakat. Maka istilah tradisi behaji seperti yang diuraikan di awal merujuk pada prosesi-prosesi adat dalam masyarakat Sasak sebelum berangkat ke tanah suci Makkah sebagai sebuah awal untuk pelatihan di tanah suci nantinya. Bentuk-bentuk ritus adat tersebut dimapankan untuk menunjukkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah kolektif yang melibatkan banyak orang dalam masyarakat sekitar tempat tinggal si calon haji. Kolektifitas tersebut terlihat pada persiapan-persiapan yang dilakukan bersama di masyarakat si calon haji yang ikut membantu dalam setiap prosesi tradisi behaji seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam proses pembuatan ketaring, ziarah makam, begawe, tahlilan berame-rame, pengantaran, hingga penjemputan kembali.

Kelekatan haji sebagai tradisi sekaligus kewajiban dalam islam tentu saja dilegitimasi juga dengan dalil-dalil nash bahwa penyempurnaan keislaman seseorang melalui haji adalah bentuk finalitas keberagamaan seorang muslim. Meski haji membutuhkan dana besar dalam ukuran masyarakat pinggiran, tetapi tidak menyurutkan minat mereka untuk tetap menggapai kesempurnaan

keislaman tersebut melalui kerja-kerja dengan motif ekonomi yang beragam. Melalui Umrah sekaligus wisata pun gelar tersebut bisa tercapai dengan akumulasi kapital yang menjadi tujuan. Bahkan dengan menjamurnya Umrah pun masyarakat merasa beruntung tidak perlu mengantri sekian puluh tahun untuk bisa mencapai tanah suci, sekembalinya pun sudah mendapatkan gelar haji juga.

Bagaimana genealogi umrah bisa menjadi gelar haji dalam tiap masyarakat tentu berbeda. Tidak semua masyarakat Sasak yang ada di Lombok sama persepsi tentang gelar haji bagi pelaku umrah. Di wilayah penulis sendiri di dusun Lengkok Lendang, desa Tembeng Putik, tidak menjadi sematan gelar haji bagi pelaku umrah, tetapi pada masyarakat yang lain hal itu bisa berlaku, misalnya di wilayah Lombok Tengah yang menyamakan ibadah haji dengan umrah, yakni sama-sama di Makkah. Untuk membedakan gelar haji yang benar-benar didapat dari prosesi ibadah haji maka sekembalinya dari Makkah jamaah haji juga mendapatkan sertifikat sebagai haji, sementara pada pelaku umrah tidak ada. Bahkan pada haji badal(pengganti) pun sertifikat badal haji juga didapatkan. Padahal jika kita mau lebih sosialis, dana-dana untuk umrah ke sekian kali, badal haji bisa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan keumatan. Salah satunya yakni untuk pembangunan literasi keagamaan maupun untuk memutus rantai kemiskinan dengan dijadikan modal usaha yang dikelola baitul mal milik masjid.

Umrah saat ini tak ubahnya wisata yang dibalut nuansa religius dengan konsepsi tentang kesalihan setelah bisa mencapai Makkah. Haji sebagai penyempurna rukun Islam merupakan ritual ziarah di dua kota suci yang menjadi napak tilas perjalanan Rasulullah SAW

dalam menyebarkan Islam. Dalam konsepsi masyarakat Sasak, ritual ziarah itu pun dilakoni sebelum berangkat ibadah haji dengan mendatangi makam-makam ulama, wali yang dianggap berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Sasak (Lombok). Pada bab sebelumnya sudah diuraikan beberapa makam wali di Lombok yang biasa diziarahi calon jamaah haji beramai-ramai bersama warga. Namun ketika seseorang akan melaksanakan ibadah umrah, tradisi ziarah makam para wali tidak dilakukan, hanya saja begawe (hajatan) sebelum keberangkatan tetap dilakukan.

Haji sebagai tujuan dalam masyarakat Sasak juga tak lepas dari konstruksi sosial yang dimapankan terkait dengan posisi seseorang di masyarakatnya. Bahkan seseorang yang sudah meninggal pun yang suatu ketika pernah berniat untuk melakukan ibadah haji dengan lama menabung, tetapi ajalnya tidak sampai keberangkatan untuk ibadah haji, mereka dibadalkan (digantikan) hajinya melalui jasa badal haji. Setelah hajinya dibadalkan, mereka pun mendapatkan sertifikat gelar sebagai haji. Padahal dengan niat berhaji dari awal lalu berupaya untuk memenuhinya karena ajal tidak sampai sudah mendapatkan pahala haji, dan uang yang dikumpulkan untuk berhaji bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat muslim dengan dimasukkan ke baitul mal ataupun masjid, lembaga pendidikan, maupun panti asuhan. Dengan begitu, nilai ibadah dapat, nilai sadakah yang lebih sosial juga didapatkan yang justru bisa lebih memapankan status sosial keluarga seorang haji yang dibadalkan.

Dalam pelaksanaan ibadah haji juga setelah selesai prosesi ritual ibadah haji, jamaah haji Indonesia juga mendapatkan sertifikat sebagai seorang haji. Hal ini juga yang membedakan antara Ibadah

haji dan umrah. Bahkan tahun-tahun ke depan pelaksanaan haji, pemerintah menetapkan selain istitho'ah dalam bentuk finansial, istitho'ah kesehatan juga menjadi perhatian. Karena dikhawatirkan banyak jamaah yang tidak mampu secara fisik berkaitan dengan masalah kesehatan tetapi karena sudah lama menunggu untuk bisa berhaji akhirnya dipaksakan juga berangkat. Kekhawatiran pemerintah dengan syarat istitho'ah kesehatan tersebut agar pelaksanaan haji tidak terkendala dalam rombongan jamaah haji dalam satu kloter. Slogan haji ramah lansia juga merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji.

Haji dalam masyarakat Sasak tak ubahnya upaya untuk menggapai sisi konstruksi sosial sekaligus meraih sisi religiusitas sebagai seorang muslim. Maka tak heran berapapun biaya-biaya yang dikeluarkan tidak menjadi permasalahan bagi seorang calon haji. Seperti yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa biaya-biaya untuk syukuran sebelum keberangkatan haji bisa jadi dua kali lipat lebih besar dari biaya haji itu sendiri. Tetapi karena tradisi bahwa haji adalah suatu kebudayaan besar yang tidak hanya dilakoni oleh masyarakat muslim, tetapi juga oleh masyarakat-masyarakat sebelum kedatangan Islam. Sehingga cukup memungkinkan bahwa tradisi haji adalah konsep ibadah yang memadukan banyak sisi kehidupan manusia. Bahkan tradisi haji sebelum kedatangan Islam sangat kental dengan nuansa adu kemahiran dalam membuat syair dan puji-pujian kepada Tuhan. Masyarakat Arab yang gemar membuat syair merasa cukup terhormat ketika banyak masyarakat dari berbagai penjuru datang ke Ka'bah untuk melaksanakan haji mengikuti jejak yang

ditinggalkan Nabi Ibrahim sebagai peletak dasar fondasi pelaksanaan ibadah haji hingga menjadi ibadah wajib bagi seorang muslim.

Retorika tentang haji sebagai ibadah penyempurna keberagaman seorang muslim menurut Ali Syariaty tak ubahnya sebagai pra-syarat untuk menuju gelar ketakwaan yang menjadi tumpuan penilaian diri seorang muslim, meski takwa itu sendiri hanya Tuhan yang mempunyai otoritas untuk menilai derajat siapa yang takwa, kurang takwa, bahkan tidak bertakwa. Seorang haji dengan prosesi ritual yang dijalankan selama di tanah suci bisa saja akan meningkat derajat ketakwaan tersebut dengan sisi spiritualitas yang dialami. Banyak kisah bagaimana yang dialami jamaah haji tentang terpampangnya amal-amal perbuatan yang telah dilalui sebelum berhaji hingga menjadikan mereka bertaubat atas perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan proyeksi-proyeksi tentang hal buruk pun seorang jamaah haji dilarang untuk memunculkan itu meski hanya sekedar bercanda. Dalam Al Qur'an larangan untuk berkata kotor, fasik, dan berprasangka tidak baik selama melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan sanksi yang langsung ditemui jika dilanggar. Sakralitas haji tentu tidak hanya karena prosesinya di tanah suci, tanah haram, tetapi karena haji juga merupakan ibadah spesial yang berjalankelindan dengan napak tilas kemanusiaan, profetik, sosial, hingga simulasi berkumpulnya manusia nanti ketika tiba hari akhir. Bahwa tidak ada pembeda antara kaya miskin, orang besar kecil, orang terhormat maupun orang hina ketika akan digiring untuk pengadilan di hadapan Tuhan.

Jika merujuk dalil-dalil tentang haji baik dalam Al Qur'an maupun hadits Nabi SAW. banyak hal yang menjadi dasar

pelaksanaan haji merupakan simbolisasi dari keterikatan manusia sebagai hamba dengan Tuhan yang direpresentasikan melalui ritus-ritus selama di kota suci berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Haji pra kedatangan Islam juga mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim AS yang dilakukan pada bulan yang juga termasuk bulan haram, karena beberapa larangan yang harus dihindari pada bulan tersebut, termasuk larangan berperang.

Gelar Haji dalam beberapa kondisi mestinya menjadikan seorang individu menunjukkan sisi religiusitas yang lebih daripada yang belum berhaji. Konstruksi ini tentunya juga berkaitan dengan kapital simbolik yang dikukuhkan atas gelar tersebut. Dalam beberapa kondisi, gelar haji juga bisa menjadi rem untuk tidak melakukan hal-hal yang dari pandangan masyarakat menunjukkan kerendahan moral. Termasuk juga dalam hal kostum yang ditunjukkan sebagai representasi dari moralitas tersebut. Misalnya seorang yang sebelum berhaji masih biasa menggunakan celana pendek, biasa belum berjilbab, maka setelah berhaji kemudian mulai merubah tampilan dengan kostum yang lebih sopan, tutur kata yang lebih terjaga, sampai tingkah laku keseharian yang lebih sesuai dengan sisi moralitas yang dimapankan dalam masyarakat.

Sementara konsep Fethisme, tentu saja pemenuhan hasrat-hasrat tentang kedekatan dengan Tuhan dalam pelaksanaan ibadah haji menjadi tujuan yang bisa dianggap sebagai kepuasan dalam beragama. Kepuasan dalam konsep Fethisme yang disebutkan marx dalam hal ini berbeda dengan ungkapannya tentang agama sebagai candu masyarakat, bahwa agama yang seharusnya menjadi basis emansipasi untuk menentang ketimpangan sosial malah menjadi agen

yang melenakan masyarakat dengan menerima keadaan dengan ketimpangan tersebut. Haji dalam hal ini seharusnya memberikan peran yang lebih besar untuk melawan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Peran-peran tersebut akan sejalan dengan misi bahwa haji juga bisa menjadi basis untuk perubahan dalam masyarakat. Baik perubahan moral, sosial ekonomi, hingga politik. Bahwa seorang haji dengan kehajiannya seharusnya bisa mencegah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, yang melanggar hukum, ataupun tindakan yang kaitannya dengan sisi moralitas dalam masyarakat.

Haji dalam konsep tindakan sosial menurut Weber berada pada tindakan rasional instrumental yang berbasis nilai, yakni nilai kesalihan yang ingin dicapai maupun status sosial dalam masyarakat alat legitimasi atas kapital simbolik yang disematkan pada gelar haji.

Dalam upaya mencapai kapital simbolik tersebut tentu saja banyak modal-modal lainnya juga yang terakumulasi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Misalnya modal ekonomi, bahwa seorang haji tentu seorang yang mapan secara ekonomi hingga mampu membayar ongkos-ongkos haji. Termasuk juga modal sosial, budaya, bahwa seorang haji adalah subjek yang mempunyai posisi, pengaruh di masyarakatnya. Sebenarnya sebelum sematan gelar haji tersebut didapatkan, subjek haji telah lebih dulu mendapatkan kapital simbolik lalu dikuatkan dengan gelar haji tersebut.

Akan tetapi dalam konteks realitas sekarang yang semua orang bisa berhaji tentu saja legitimasi atas kapital simbolik gelar haji tersebut tidak sekuat pada masa-masa sebelumnya. Hari ini, dengan

berangkat umrah pun seorang sudah disematkan gelar haji oleh masyarakatnya, maka bagian dari sisi sosial masyarakat yang mengukuhkan gelar haji semacam mengalami peyorasi (penyempitan makna). Bahwa dulunya haji adalah gelar sakral, tidak semua boleh meniru gaya berpakaian seorang haji jika belum berhaji. Misalnya peci putih dan sorban, seorang yang belum berhaji lalu menggunakan peci putih dan sorban tentu akan dicemooh oleh orang-orang di masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya, seorang haji yang tidak berpakaian sebagaimana haji pada umumnya tentu akan dipertanyakan juga kehajiannya. Misalnya seorang haji atau tuan guru yang diundang untuk mengisi ceramah, tetapi berpakaian biasa saja seperti bukan seorang haji, maka kemudian akan dipertanyakan status kehajiannya.

Kuatnya legitimasi status sosial haji dalam masyarakat inilah yang kemudian menjadikan haji banyak mengalami komodifikasi dalam banyak sisi. Begitu juga dengan ibadah umrah yang justru lebih terang bahwa kapitalisme berbasis muslim telah begitu kuat menancap dalam lini kehidupan masyarakat muslim. Kesadaran semu atas itu tentu saja membutuhkan kesadaran kritis dari masyarakat muslim supaya tidak terjebak pada kepuasan semu (*false fetishism*) dalam upaya meraih nilai-nilai kesalihan dengan sebutan kesempurnaan dalam keberagamaan.

D. Status dan Nama Baru Sebagai Tradisi

Meski tak ada aturan syariat yang mengkhususkan bahwa subyek haji harus mengganti nama setelah berhaji, tetapi dalam konteks Sasak merasa perlu, dan seolah menjadi syarat bahwa

sekembali ke kampung halaman akan menyandang status dan nama baru. Nama bukan hanya sekedar sebutan, tetapi di baliknya ada makna yang ingin dimapankan. Bisa saja itu berupa doa, ataupun juga untuk semakin memapankan status sosial tersebut. Misalnya saja subyek haji yang semula menggunakan nama Sasak atau sebutan Amaq/inaq kemudian diikuti nama anak pertama, maka selepas berhaji ia kemudian mengukuhkan nama baru yang akan dipakai sekembali ke kampung halaman. Proses penamaan ini bisa menjadi buah bibir, bahkan cibiran dengan nama baru yang bisa saja dianggap ketinggian dalam lingkungan masyarakat yang rata-rata menggunakan nama Sasak yang sederhana. Selama proses peralihan nama dari sebelum dan sesudah berhaji ini masyarakat juga akan menyesuaikan dengan panggilan baru tersebut. Biasanya juga akan diiringi dengan syukuran atas kembalinya dari Makkah. Menyembelih kambing setelah dari perjalanan ke Makkah ini dirujuk dari konsep Al Naqiah, bahwa nabi sekembali dari Makkah biasanya akan memotong kambing untuk dimakan bersama. Tetapi dalam masyarakat Sasak istilah begawe haji sebelum keberangkatan juga cukup mapan, dari kalangan kelas sosial menengah ke atas tentu beda pula penyebutannya, misalnya yang populer walimatussafar.

Penyebutan-penyebutan acara hajatan tersebut juga tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat tempat subyek haji bermukim. Calon haji yang bermukim di perumahan dengan masyarakat yang beragam tidak semua Sasak, tentu memilih sebutan lain untuk acara hajatnya dari pada begawe. Sementara begawe dalam konteks masyarakat Sasak pun banyak jenisnya, kegiatannya pun akan berbeda. Antara begawe haji dan begawe lainnya berbeda pula prosesi

perayaannya. Tetapi dalam hal ini begawe dalam penyambutan keberangkatan calon haji merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dari prosesi berhaji masyarakat Sasak. Sama halnya dengan perubahan nama, begawe ini pun bukan menjadi rukun atau syariat dalam prosesi haji, tetapi menjadi tradisi untuk meminta doa demi kelancaran ibadah haji, juga sebagai ajang untuk saling mendoakan agar yang lain yang belum diberikan kesempatan untuk berhaji segera mendapatkan rizki.

Subyek haji di desa Bandok misalnya yang tidak banyak masyarakatnya yang sudah berhaji tentu berbeda peran haji dibandingkan dengan desa yang banyak warganya sudah berhaji. Peran itu bisa saja dalam bentuk keterlibatan subyek haji dalam masyarakat secara baik seperti halnya sebelum menjadi haji, ataukah justeru ada yang berubah, atau bisa jadi sebaliknya. Poin penting untuk melihat keterlibatan subyek haji yakni ketika ada acara-acara dalam masyarakat yang melibatkan banyak orang, apakah seorang haji akan banyak ikut terlibat ataukah hanya menganggap diri menjadi tamu undangan dengan tidak banyak mengambil bagian dalam kerja-kerja bersama masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap haji baru bisa jadi merupakan upaya penilaian (judgement) atas kehajian seorang anggota masyarakat, apakah ada efek dari kehajiannya tersebut dalam perubahan perilaku baik individu haji itu sendiri, keluarganya ataupun terhadap masyarakat sekitar.

Sebenarnya tak ada aturan yang baku dalam masyarakat bahwa seorang haji harus bersikap seperti pandangan moralitas bersama. Misalnya, dalam masyarakat Tembung Putik, jika ia seorang haji maka harus menunjukkan wibawa dalam masyarakat minimal bisa menjadi

Imam di masjid atau menjadi pemimpin acara-acara tahlilan di masyarakat. Padahal tidak semua haji merupakan lulusan pesantren ataupun lembaga-lembaga keagamaan yang mapan pengetahuan agamanya. Tetapi dalam masyarakat sudah terlanjur mapan upaya-upaya legitimasi seperti itu, maka seorang haji baru mau tidak mau harus menerima proses tersebut.

Haji HM di Dusun Lengkok Lendang Desa Tembeng Putik menceritakan ketika ia pulang haji di tahun 2019, waktu itu masuk waktu shubuh ia sampai di kampung halaman setelah dijemput dari Bandara. Sesampainya di kampung langsung disambut di masjid dan seperti biasanya penyambutan calon haji akan banyak dialami seolah meminta berkah dari orang yang baru pulang dari Makkah, selesai shalat sunnah qabliyah, dan Iqamah ia yang dipersilahkan menjadi imam padahal banyak sekali tokoh agama yang hadir waktu itu juga, akhirnya setelah sekian lama terjadi negosiasi saling persilahkan, ia pun dibimbing langsung menuju ke tempat imam. Selesai shalat ia merasa beruntung sebelum berangkat haji cukup sering berjamaah juga di masjid dan masih dihapal bacaan-bacaan wirid selepas shalat. Sampai pada pembacaan doa, ia mempersilahkan lagi tokoh agama yang lebih tua untuk memimpin, tapi tetap dikembalikan kepadanya. Ia pun berdoa sebanyak yang ia hapalkan doa-doa umum, ditambah dengan doa-doa yang ia hapalkan selama prosesi haji diajarkan pembimbing. Ia yang bahkan tidak tamat Madrasah Ibtidaiyah tetapi dengan kehajiannya justeru diposisikan setara dengan tokoh-tokoh agama lainnya. Bahkan selepas shalat pun ia lagi diminta berceramah atau ia menyebutnya lebih tepat bercerita pengalaman melaksanakan ibadah haji. Ia pun berbicara juga di depan jamaah shalat shubuh

tersebut, meski sebenarnya ia merasa harus segera istirahat karena sudah perjalanan jauh. Tetapi karena di masyarakat sudah menjadi tradisi dalam penyambutan kepulangan haji, maka ia ikuti juga.

Barulah setelah sehari kepulangan, ia juga melaksanakan acara syukuran atas selesainya prosesi behaji dan selamat kembali ke kampung halaman dengan mengundang tetangga-tetangga dekat terutama jamaah pria untuk acara zikiran. Hal itu juga sekaligus penutupan dari tradisi behaji di masyarakat lalu diikuti dengan pembagian oleh-oleh berupa air zam-zam, kurma, sajadah, tasbih, surban bagi yang sudah haji, jilbab, dan aneka oleh-oleh lainnya. Ia menceritakan untuk membeli oleh-oleh tersebut hampir mencapai 6.000 real, atau sekitar 15 juta lebih. Meski tidak ada kewajiban harus membeli oleh-oleh, tetapi ia harus tetap menyediakan agar tidak dinilai sebagai haji yang pelit karena tradisi di masyarakat juga begitu yang berlaku. Jika tidak membawa oleh-oleh, atau mungkin ada masyarakat yang tidak kebagian, tentu ia akan malu dan akan menjadi bahan pembicaraan sebagai sanksi sosial dalam masyarakat. (Wawancara dengan Haji HM, 21 Mei 2022).

Begitu juga yang terjadi di masyarakat Mamben Daya hampir serupa dengan di atas, penilaian terhadap kehajian anggota masyarakatnya yang baru pulang dari Makkah akan diuji secara publik di masjid. Pertama, biasanya akan diminta menjadi imam shalat berjamaah, kemudian menjadi pemimpin acara zikir/tahlilan, dan yang agak berat bisa saja diminta menyampaikan ceramah atau menjadi khatib jumat. Kesemuanya sebenarnya bukan kompetensi wajib yang harus ada pada seorang haji, tetapi karena di masyarakat sudah mapan konstruksi sosial bahwa seorang haji adalah elit agama,

maka mau tidak mau seorang haji harus bersiap dengan konsekuensi atas gelar haji yang disandangnya. Ketika seorang haji tidak mampu memenuhi syarat-syarat tak tertulis tersebut, bisa jadi akan menjadi bahan pembicaraan, ataupun muncul dugaan-dugaan yang mengarah kepadanya tentang bagaimana proses kejadiannya. Tidak semua haji sepulang dari Makkah akan langsung mapan keilmuan agamanya, tetapi di masyarakat Sasak sudah terlanjur mapan penilaian seperti itu, maka seorang haji juga harus mengikuti alur. Hal ini sebenarnya cukup bagus untuk melihat dampak atas kejadiannya individu yang tidak hanya akan menjadi ibadah pribadi, tetapi juga membawa dampak atau perubahan sosial di lingkungannya. Salah satunya ketika anggota masyarakat yang sudah berhaji, lalu ia juga menimba keilmuan agama selama proses berhaji, tentu akan memiliki dampak baik untuk masyarakat sekembalinya nanti.

E. Pembaharuan Islam di Nusantara Melalui Haji

Di sinilah peran-peran yang bisa diisi oleh seorang haji ketika mereka juga bisa fokus pada pemaknaan apakah ibadah haji hanya untuk pribadi ataukah ada yang bisa ditransformasikan untuk masyarakatnya. Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya pada acara pengajian Muhammadiyah yang disiarkan secara virtual membahas tentang Haji dan Pembaharuan Islam di Indonesia. Paparan dari Azyumardi Azra misalnya yang merujuk pada penelitiannya tentang jaringan Ulama-ulama Nusantara dengan Haramain, bahwa santri-santri Nusantara atau yang juga disebut santri Jawi merupakan agen-agen pembaharu Islam di Nusantara yang jaringan keilmuannya bisa sampai ke Nusantara karena mereka

berangkat berhaji. Lalu sebagian ada yang menetap bahkan menjadi ulama juga di Makkah, atau ada juga yang bermukim lama dan belajar di ulama-ulama Makkah sembari menunggu bulan haji, setelah merasa cukup, mereka pun akan diperintahkan oleh gurunya untuk kembali ke asal masing-masing dan menjadi agen penganjur agama (ustadz, kyai, Tuan Guru).

Jaringan ulama Nusantara yang dimaksudkan Azyumardi Azra yakni santri-santri Jawi yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara dan menjadi tokoh besar sebagai penyebar Islam yang semula-mula di daerah asalnya, kemudian juga menyebar ke berbagai wilayah lainnya. Jejak-jejak perjalanan mereka banyak diketahui dari silsilah murid-murid mereka yang juga banyak mengembangkan tarekat. Sementara santri-santri Jawi yang menetap di Makkah ada yang menjadi pengajar di Madrasah Shaulatiyyah seperti Syaikh Yasin Isa Al Fadani, ada juga yang mendirikan madrasah sendiri seperti Darul 'Ulum yang dipelopori Syaikh Nawawi Al Bantani. Ulama-ulama Nusantara yang berada di Makkah ini juga menjadi guru dari ulama-ulama nusantara yang datang belakangan belajar ke Makkah. Mereka juga banyak bertukar informasi terkait kondisi dunia Islam yang ada di Indonesia dan negara Islam lainnya. Persentuhan pemikiran dengan pemikir-pemikir muslim dari negara Islam lainnya seperti Mesir, Iran, Iraq membentuk gerakan Pan Islamisme yang dibawa ke Nusantara oleh haji-haji tersebut menjadi dasar untuk membebaskan masyarakat dari ketertindasan kolonialisme. Pembaharuan islam yang pernah terjadi seperti ini yang dibawa oleh haji-haji dari nusantara ingin digaungkan kembali oleh Muhammadiyah melalui pengajian tersebut.

Pembaharuan yang dimaksud tidak seperti ketika masa kolonialisme, tetapi dalam konteks realitas hari ini bisa saja terkait pemahaman keagamaan yang lebih moderat yang bisa digaungkan oleh haji-haji yang baru pulang. Mereka banyak menemukan perbedaan cara ibadah selama prosesi haji, hal itu bisa direfleksikan ketika sampai di kampung halaman dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakatnya. Tetapi juga bisa berpegang pada keyakinan madzhab yang sudah biasa diikuti, misalnya di Indonesia mayoritas Madzhab Syafi'i ketika kembali ke kampung halamannya harus tetap syafi'iyah. Peran para haji sebagai pembaharu Islam dalam realitas hari ini bisa juga sebagai pelopor geliat ibadah baik *mahdhab* maupun *ghairu mahdhab* (sosial) dengan mereka sebagai percontohan manusia baru yang sudah menuntaskan kesempurnaan rukun Islam. Misalnya dengan intesitas berjamaah di masjid setiap waktu, dalam konteks sosial bisa dicontohkan dengan mencontohkan penyeimbangan antara kerja-kerja duniawi dengan kebutuhan Ibadah untuk rohani. Solidaritas sosial para haji juga bisa ditonjolkan dengan menjadi dermawan, menunjukkan sisi-sisi filantropisme mereka untuk membantu orang-orang yang kesusahan di sekitarnya.

Hal-hal sederhana yang bisa dipelopori oleh mereka akan semakin menegaskan bahwa ibadah haji ke Makkah itu bukan hanya untuk pribadi, kepuasan sendiri, tetapi juga harus memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Pada konteks masyarakat Wetu Telu di Bayan misalnya, melalui perubahan nama pasca menunaikan ibadah haji, seorang haji bahkan akan diposisikan melebihi tokoh-tokoh adat yang selama ini mapan sebagai pimpinan dalam acara-

acara di masyarakat. Melalui itu, seorang haji tentu bisa membangun peran yang lebih banyak untuk perubahan dalam masyarakat. Misalnya dengan menyisipkan sisi-sisi Islami di setiap acara-acara adat di komunitas Wetu Telu tersebut. Acara-acara selamatan yang biasa diisi hanya dua orang yang berdoa, itupun dengan doa-doa bahasa Sasak yang diajarkan turun-temurun ke tokoh adat, bisa diiringi juga dengan acara zikir dan tahlil kemudian melantunkan doa-doa yang disarikan dari Al Qur'an. Dengan posisinya yang mapan dalam masyarakat, tentu keberterimaan masyarakat akan lebih cepat daripada langsung dihakimi sebagai Bid'ah, syirik, tidak ada tuntunan dalam Al-Qur'an ataupun Hadis, seperti yang dilakukan komunitas Wahabi di Bayan yang juga cukup berkembang. Justeru semakin membuat masyarakat Wetu Telu seolah tidak simpati dengan pemahaman keagamaan yang digaungkan oleh komunitas Wahabi di sana. Akan tetapi dengan pemahaman yang lebih moderat, menghargai tradisi dalam masyarakat dengan ditransformasikan juga ke arah sisi-sisi islami, masyarakat akan menilai mana yang lebih akomodatif pemahaman keagamaan dengan tetap menghargai tradisi yang mapan dalam masyarakat. Hal seperti ini yang dilakoni haji MA yang bermukim di Bayan, Ia menjadi elit dengan kehajiannya, dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin ketika ada acara-acara adat, selamatan hari-hari besar Islam, acara kematian, syukuran kelahiran dan lainnya. Jika dulu setiap ada acara, hanya dua orang yang bertugas berdoa, satu membaca doa, satunya lagi meng-aminkan, sementara yang lainnya yang hadir sibuk ngobrol, merokok, mempersiapkan sajian, bahkan hanya menonton sambil menunggu sajian makanan. Maka oleh Haji MA polanya diubah, bahwa semua

harus ikut zikir dan tahlil, doa dahulu, baru setelah itu silahkan dipersiapkan sajian, ataupun mulai ngobrol, merokok dan lainnya. Akan tetapi satu hal yang cukup sulit untuk ditinggalkan yaitu meski sudah diiringi dengan sisi-sisi Islami, bahwa tradisi sajian Tuak juga tetap ada setelah acara-acara zikir & tahlilan tersebut (Wawancara dengan Haji MA, 22 Juni 2022).

Sajian tuak tetap ada jika empunya hajatan orang biasa yang memang terbiasa juga disuguhkan tuak ketika ada acara-acara hajatan di masyarakat. Berbeda halnya ketika empunya hajatan seorang tokoh, yang juga seorang haji. Peneliti berkesempatan mengikuti acara syukuran di rumah Haji Maryadi, S.Ag, yang juga seorang anggota Dewan Tingkat II di kabupaten. Sajian makanan justeru lebih dahulu disantap sebelum zikir dan tahlil. Jadi ketika ada tamu datang langsung diarahkan ke tempat meja prasmanan, dan ketika dilihat sudah tidak ada lagi tamu yang datang maka zikir dan tahlil baru dimulai. Peneliti juga termasuk yang terlambat datang, dan langsung diarahkan ke tempat Prasmanan, tetapi karena zikir dan tahlil sedang berlangsung maka peneliti ikut duduk di tempat zikir dan tahlil. Barulah selesai berdoa lalu ke tempat sajian, dan ternyata yang menikmati sajian selanjutnya adalah para jamaah perempuan yang hadir. Tidak ada tuak yang disajikan setelah itu, acara dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol santai sembari menikmati rokok yang juga disajikan di piring.

Seorang haji dalam komunitas Wetu Telu di Bayan juga akan menjadi tempat masyarakat untuk bertanya terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik kaitannya dengan keagamaan ataupun interaksi dalam konteks sosial, muamalah lainnya. Karena itu

cukup berat juga posisi seorang haji selain melaksanakan prosesi haji, juga harus betul-betul belajar agama agar keilmuan mereka yang mapan bisa menghadapi masyarakat yang mengukuhkan mereka sebagai elit. Haji Akhyar menuturkan cukup beruntung ia dulunya belajar di Pancor sampai Aliyah, lalu dilanjutkan ke Ma'had meski tidak sampai tamat, jadi ada basis keilmuan agama yang masih diingat ketika ada masyarakat yang bertanya kepadanya terkait hukum waris, ataupun ketika ada selisih paham di masyarakat. Sebelum berhaji ia berprofesi sebagai peternak dan penjaga Kantor Desa, ia merupakan pendatang di Bayan, asalnya dari Mamben. Ketika sudah berhaji, tetap melakoni sebagai peternak, pagi pergi menyabit rumput untuk sapi dan kambing, lalu malam harinya ada anak-anak mengaji di Teras rumahnya. Setelah berhaji, ia mendapatkan tempat di masyarakat sebagai tokoh agama yang dituakan. Banyak hal yang terjadi di masyarakat diminta rujukan kepadanya. Misalnya orang-orang menanyakan kepadanya tentang penghitungan hari baik untuk mengadakan acara hajatan ritus kehidupan (gawe urip) seperti nikah, Aqiqah, sunatan dan lainnya. Begitu juga ia akan diminta pendapat tentang hari baik untuk memulai membangun rumah, mulai menanam dalam hal pertanian disertai juga dengan bacaan-bacaan doa yang harus dihapalkan oleh si empunya hajatan. Melalui pengukuhan tersebut Haji Akhyar seolah menjadi Belian (untuk menyebut orang pintar dalam bahasa Sasak) terkait dengan hal-hal mistis yang ia rumuskan dan diikuti oleh orang yang meminta pendapat kepadanya. (Wawancara dengan Haji Akhyar, 22 Juni 2022).

Potensi yang dimiliki seorang haji di tengah masyarakat bisa diaplikasikan melalui peran-peran mereka dalam membina kerekatan

sosial ataupun melalui tingkah laku yang mencontohkan sikap moderat menyikapi perbedaan. Di masyarakat Desa Lenek misalnya yang lebih mapan tradisi daripada teks-teks keagamaan, ketika seorang haji bisa tampil untuk memberikan pemahaman kepada mereka sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, tentu akan lebih diterima daripada mendatangkan orang luar untuk menceramahi masyarakat tentang ketimpangan antara adat dan syariat. Dalam pembacaan naskah-naskah lontar yang mereka simpan, selalu diiringi dulu dengan ritual-ritual penghormatan berupa penyembelihan kerbau, kambing untuk membuka naskah tersebut dan dianggap lebih bernilai daripada teks-teks yang lain. Sementara Al Qur'an yang lebih suci tak ada penghormatan apapun bahkan jarang disentuh, begitu juga tetua adat mereka menyatakan naskah tersebut lebih dulu ada daripada Al Qur'an. Meski tak banyak yang paham makna dari naskah tersebut, haji Khalid misalnya mencoba menjembatani pemahaman atas naskah tersebut dan keterhubungannya dengan sisi-sisi filosofis ayat-ayat al Qur'an tentang kehidupan, penciptaan manusia dan alam semesta. Tidak serta merta langsung dipertentangkan, tetapi di balik upaya penggalian makna atas naskah tersebut juga diselipkan sisi islami yang dikaitkan dengan Al Qur'an sehingga masyarakat tidak merasa dikekang untuk memberikan penghormatan pada naskah. Haji Khalid juga tidak mencemooh ketika masyarakat menyembelih kerbau atau kambing sebelum memulai membuka dan membaca naskah. Tetapi sebelum menyantap sajian tersebut mereka tahlilan dan zikir lebih dulu yang diniatkan untuk para pendahulu dan diniatkan juga untuk kesehatan dan keberkahan di tanah mereka. Jadi, perlahan niat mereka memotong kerbau atau kambing untuk

penghormatan pada naskah, kemudian bergeser kepada niat untuk bersama memohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa, dan sebagai bentuk syukur atas rizki yang mereka dapatkan. Adapun sajian itu pun akan disantap bersama dan dianggap sebagai sedekah makanan (ith'amū tha'am) untuk masyarakat yang hadir, tidak dibatasi siapapun boleh hadir meski bukan warga yang bermukim di sana. (Wawancara dengan H. Khalid, 15 Juni 2022).

Dalam konteks masyarakat Sasak lainnya di Dusun Langgalawe di desa Aiq Bukaq, seorang haji juga akan tampil sekaligus sebagai pemuka agama. Mulai dari dipercayakan mengelola masjid, baik ketika pembangunan ataupun menjadi pengurus. Di samping itu seorang haji juga akan bertugas mengorganisir pengajian-pengajian keagamaan baik di masjid, mushalla, atau bahkan di rumah warga yang bersedia. Haji Afdal misalnya dengan usia yang belum menginjak 50 mempunyai peran penting di dusun Langgalawe karena tidak banyak warga yang bisa berangkat haji juga. Ia yang lulusan D2 dan Ma'had di Anjani sempat menjadi guru MI dan sebelumnya menjalankan berbagai macam usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada tahun 2012 kemudian berniat untuk mendaftar sebagai TKI ke Arab Saudi dengan niat agar bisa berhaji. Proses yang dijalani cukup panjang selama tahun 2012, termasuk seleksi untuk pekerja yang akan diberangkatkan. Beruntung sebagai alumni Ma'had ia mempunyai basic bahasa Arab yang bagus, hingga pertengahan tahun diberangkatkan juga ke Arab Saudi. Pekerjaan pertama yang dilakoni tidak langsung di tempat orang yang butuh pekerja, tetapi ditampung sebagai cleaning service di areal Masjidil Haram. Dari sanalah banyak pertemuannya dengan alumni Ma'had ataupun kawan seangkatannya

yang melanjutkan menempuh studi di Madrasah Shaulatiyyah. Melalui mereka pula ia berkesempatan juga untuk sit in (ikut mengikuti kuliah tetapi tidak terdaftar) di madrasah Shaulatiyyah, dan pada tahun itu juga mendapatkan izin untuk ibadah haji seperti yang ia niatkan dari awal.

Sekembali dari Makkah setelah beberapa tahun sebagai pekerja pendamping jamaah haji, ia pun melakoni peran sebagai tokoh agama di kampung halaman. Karena tak banyak haji di kampungnya maka ia pun diberikan tempat di masyarakat sebagai pengurus masjid, jadwal tetap sebagai imam dan khatib. Selain itu juga menjadi koordinator pengajian untuk muballigh muda yang dinaungi salah satu ormas keagamaan di Lombok. Ia bertugas membuat jadwal pengajian sekaligus mendatangkan Tuan Guru untuk mengisi, di samping ada Tuan Guru yang menjadi pengisi tetap. Ia tidak pernah menyangka akan semudah itu jalan hidupnya setelah berhaji. Mulai dari peningkatan taraf ekonomi yang membaik, lalu kemudahan-kemudahan usaha yang dikelola, salah satunya menjadi biro agen travel haji dan umrah. Banyak masyarakat dusun langgalawe yang mendaftar umrah melalui dia. (Wawancara dengan H. Afdal, 12 Mei 2022).

Di masyarakat Langgalawe yang sudah melaksanakan umrah akan disamakan juga dengan orang yang sudah berhaji. Ada perubahan nama disematkan, begitu juga panggilannya. Yang laki-laki dipanggil Tuan Aji, yang perempuan dipanggil Inaq Tuan. Masyarakat biasa yang dipanggil Amaq (panggilan untuk bapak) ketika sudah berhaji atau umrah kemudian dipanggil dengan sebutan bapak. Perubahan nama itu merepresentasikan kelas sosial dari subyek haji

yang dibarengi juga dengan perubahan cara hidup di masyarakat, baik melalui simbol, pakaian, pembawaan diri ketika bergaul, hingga pilihan-pilihan cara berusaha atau mencukupi kebutuhan hidup. Begitu juga peran dari pelaku umrah hampir disamakan dengan subyek haji di masyarakat, yang berbeda yakni pada proses penyambutannya sebelum keberangkatan maupun kepulangan. Pada calon haji, masyarakat akan mempersiapkan banyak hal untuk menyambut keberangkatannya, sementara pada pelaku umrah tidak semeriah atau se-rame itu. Cukup dengan undangan zikir kecil-kecilan mengundang tetangga dekat sekitar rumah, itu pun hanya sekali, beberapa hari sebelum keberangkatan menunaikan ibadah Umrah.

Pelaku Umrah ataupun subyek haji di masyarakat tak ubahnya sebagai aktor yang bisa menjadi pelopor banyak perubahan dalam masyarakat. Baik itu dalam hal keagamaan, sosial, bahkan ekonomi. Dalam hal keagamaan seorang haji tentu bisa diandalkan di masyarakat kaitannya dengan keilmuan agamanya yang mapan. Dalam hal sosial bisa dimanifestasikan dengan kerja-kerja kolektif di masyarakat ataupun bisa menjadi penggerak untuk kebaikan bersama di tengah masyarakat. Sementara dalam konteks pembangunan ekonomi, tentu seorang haji juga dianggap sebagai elit dengan kapital ekonominya yang mapan hingga bisa berangkat haji, dan biasanya seorang haji juga dicitrakan sebagai orang yang dermawan, yang gemar memberi, atau minimal sering mempekerjakan orang dan memberi upah yang layak.

Di masyarakat Mamben Daya, rata-rata subyek haji sekaligus pengusaha. Mereka yang mempunyai toko di deretan jalan raya, atau usaha-usaha besar lainnya adalah para haji yang dengan itu

menjadikan mereka sebagai kelompok elit dengan kapital ekonomi yang mapan. Bahkan dari hasil usaha itu bisa membuat mereka sampai beberapa kali berangkat berhaji dulu sebelum adanya pembatasan kuota. Haji SM misalnya menceritakan pertama kalinya naik haji dulu dari hasil usahanya menyewa lahan pertanian, lalu ditanami bawang. Sekali panen kala itu memang sedang bagus harga, hasilnya ia bisa gunakan untuk mendaftar berangkat haji bersama Istrinya. Tahun ia mendaftar di tahun itu juga ia melunasi biaya-biaya dan berangkat berdua bersama istrinya. Selain untuk ongkos haji, ia gunakan lagi sisanya untuk modal dengan mencari lahan yang lain untuk disewa, dan semakin banyak yang bekerja padanya. Di tahun selanjutnya ia pun dapat lagi berangkat haji dari hasil panen tersebut. Setelah dua kali haji itulah dia baru berpikir bahwa perjalanan hajinya yang menghabiskan sekian banyak dana meski dengan niatan ibadah karena Allah, tetapi hanya ia nikmati sendiri. Ia pun terpikir untuk membuka usaha agar semakin banyak orang yang bekerja dan mendapatkan pemasukan. Mulailah ia juga membuka lapangan atau biasa masyarakat Sasak menyebutnya *Len* (asal katanya *Land*) tempat menjemur padi, jagung atau hasil panen lainnya. Lalu ia membeli mesin heler padi dan jagung. Lapangannya selalu penuh dengan hasil pertanian yang siap digiling. Semakin banyak yang bekerja kepadanya semakin besar pula keuntungan yang ia peroleh. Ia pun merasa bahwa doa-doanya selama di Tanah suci dulunya cepat sekali terkabul. Hingga sekarang ia menjadi tokoh di Masyarakat dan setiap pembangunan masjid selalu terdepan mengumpulkan dana. Begitu pun dengan ia dipercayakan juga sebagai pengurus yayasan pondok pesantren. (Wawancara dengan H. SM, 11 Juni 2022).

Konsep peran, tindakan sosial, maupun solidaritas sosial subyek haji dalam penelitian ini dibaca melalui keterlibatannya sebagai aktor dalam struktur masyarakat. Aktor dalam hal ini yakni tindakannya dalam masyarakat sebagai subyek-subyek yang mempunyai kuasa untuk mendominasi. Melalui pengetahuan agama, status sosial, tentu akan lebih diterima ucapan maupun tindakannya di masyarakat. Oleh karena itu subyek haji sebagai agen yang mentransformasikan perubahan dalam masyarakat tidak terlepas juga dari struktur sosial masyarakat yang mengukuhkan posisi subyek haji. Keterhubungan subyek haji sebagai pihak yang dinaikkan posisinya merupakan hal yang berjaln kelindan dengan relasi sosialnya dengan masyarakat. Karena itu mengkaji tentang subyek haji tentunya juga harus mengeksplorasi konteks sosial di masyarakatnya. Dalam Penelitian ini peneliti akui bisa saja butuh tambahan data dan analisis yang lebih komprehensif untuk menyajikan lebih detail terkait itu, tetapi melalui preliminary studi ini peneliti mencoba memetakan bagaimana sistem sosial itu juga bekerja pada subyek-subyek yang dikonstruksi atas status sosialnya melalui gelar dan rangkaian ritual-ritual yang dijalani. Ibadah Haji termasuk salah satunya.

BAB V

Haji Sebagai Sebuah Tinjauan Reflektif

A. Refleksi Kritis pengkajian Haji

Membaca secara kritis fenomena terkait subyek haji pada masyarakat Sasak tidak terlepas dari sistem sosial yang juga mapan dalam hal stratifikasi sosial. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa dulunya kelas sosial dalam masyarakat itu pernah mapan. Subyek-subyek yang ada gelar di depan namanya dianggap sebagai representasi kelas sosial bangsawan, sementara masyarakat biasa atau jajarkarang tidak memiliki itu. Resistensi atas dominasi bangsawan sebagai elit yakni melalui gelar keagamaan salah satunya gelar haji yang disamakan dengan gelar kebangsawanan (menak).

Konteks haji dalam masyarakat Sasak sebagai kelas sosial belum ada detail kapan orang Sasak pertama kali naik haji, tetapi dari ungkapan-ungkapan tentang penyucian diri dengan menepi untuk mencari ketenangan di pegunungan Rinjani, hal itu kemudian memunculkan mitos tentang Rinjani sebagai teleportasi menuju Makkah. Makkah dan Rinjani dalam pemaknaan masyarakat Sasak dulu direpresentasikan dengan pencarian-pencarian tempat khusus untuk melatih kekhusu'an ibadah, mencari legitimasi dan keilmuan, serta upaya meneguhkan diri. Motif perhajian masyarakat Sasak awal untuk mencari keilmuan ditandai dengan peran haji-haji awal tersebut dalam penyebaran Islam di Lombok. Pertanyaan pertama dalam penelitian ini tentang genealogi haji dalam masyarakat Sasak terjawab dengan kisah-kisah tentang syarif dan syarifa pertama yang juga mengenalkan Islam. Mereka sampai di Lombok kemudian menikah

juga dengan bangsawan Sasak bernama Dende Aminah (Dende itu sendiri gelar untuk perempuan bangsawan Sasak, dianggap lebih tinggi dari gelar Baiq, sementara Laki-laki yakni Raden, yang dipersepsikan juga lebih tinggi dari gelar Lalu). Dende Aminah dibawa berangkat haji oleh suaminya yang keturunan Hadhramaut, kemudian menetap beberapa tahun di Makkah. Dalam beberapa tuturan lisan diceritakan ia juga sering menampung orang-orang Sasak yang berhaji dan juga belajar di Makkah.

Genealogi haji dalam masyarakat Sasak sejauh ini referensi utama masih merujuk pada naskah-naskah lontar tentang kisah-kisah perjalanan haji Rasulullah SAW pada saat haji wada' (terakhir). Naskah-naskah tersebut sampai sekarang masih sering dibaca pada malam hari selepas tahlilan sebelum keberangkatan haji. Keberadaan Tuan Guru Abdul Ghafur banyak disebut oleh beberapa peneliti kajian Islam di Sasak sebagai pioneer yang juga banyak membantu murid-muridnya diberangkatkan menuju makkah untuk belajar dan berhaji. Sebenarnya dalam penelitian ini peneliti membatasi bahasan tak cukup perlu untuk memperdebatkan terkait subyek atau individu mana yang pertama kali berhaji dalam masyarakat Sasak. Kajian-kajian secara historis terkait itu bisa menjadi bahasan pada penelitian lebih lanjut dengan relevansi penyebaran Islam di masa dulu serta jalur-jalur penyebaran seperti apa yang dilakukan oleh para haji tersebut. Dalam pembahasan yang peneliti sajikan di bagian bab ini memang tidak cukup mendetail terkait itu, dan itu bisa menjadi refleksi kritis bagi peneliti sendiri maupun peneliti lain yang tertarik mengkaji secara historis tentang haji dalam masyarakat Sasak.

Sementara itu terkait kapital simbolik pada gelar haji memang penting untuk diungkap sebagai refleksi bagi peneliti, masyarakat yang berniat untuk berhaji agar benar-benar mempersiapkan niat yang betul-betul penyerahan diri. Karena banyak kejadian terkait gelar haji yang disamakan dengan gelar kebangsawanan kemudian seolah merubah motif berhaji masyarakat Sasak. Haji dijadikan sebagai perjalanan untuk mencari legitimasi, pengukuhan diri untuk menjadi elit. Tak heran sebutan haji Surabaya dulunya cukup banyak menjadi desas-desus, bahwa ada subyek-subyek haji yang mengklaim diri sudah berhaji, tetapi hanya sampai Surabaya, karena dulunya penerbangan internasional untuk wilayah Bali-Nusra di Bandara Surabaya. Kemudian menjelang kepulangan jamaah lain yang juga berhaji, mereka membeli oleh-oleh serupa di pasar Surabaya untuk dibawa pulang ke Lombok untuk dibagikan ke tetangganya. Begitu juga dengan sebutan untuk haji Saudi, bagi subyek haji yang awalnya berangkat ke Arab Saudi menjadi TKI, kemudian mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi dalam masyarakat Sasak ada saja yang meragukan kehajiannya, desas-desus tentang sematan gelar haji juga tidak sedikit yang mencibir. Bahwa bisa saja individu tersebut hanya menceritakan bahwa dirinya sudah berhaji agar masyarakat juga memapankan gelar hajinya. Tetapi kemudian tidak ada bukti yang bisa dijadikan legitimasi atas kehajiannya tersebut. Banyaknya kasus orang-orang yang mengklaim diri sudah berhaji meski berada di Arab Saudi, ini juga yang memunculkan kebijakan bahwa mereka yang mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji kemudian diberikan sertifikat, keterangan bahwa individu tersebut benar-benar sudah melaksanakan ibadah haji.

Permasalahan yang sering menjadi pergunjungan di masyarakat juga yakni Jika memang ia mendapatkan kesempatan berhaji, kenapa keluarganya tidak mengadakan syukuran sebagaimana halnya tradisi yang mapan di masyarakat Sasak meski ia tidak berada di kampung halamannya. Hal ini juga kadang menjadi sanksi sosial di masyarakat, bahwa ia mampu berhaji, tetapi tidak mau sekedar mengadakan zikir dan tahlil mengundang tetangga untuk syukuran di rumahnya. Seperti halnya proses berhaji yang dijalani H. Afdal, H. Jalaluddin, H. Muhammad Iqbal, H. Heru Wardiman dan lainnya selama menjadi TKI di Arab Saudi. Mereka meminta keluarga yang ada di kampung halaman untuk mengadakan zikir dan doa mengundang tetangga untuk memohon kemudahan agar proses menjalani ibadah haji berjalan lancar. Dengan begitu tidak ada yang meragukan kehajiannya karena sudah ada syiar di masyarakatnya bahwa orang yang didoakan benar-benar berhaji.

Kapital simbolik pada gelar haji juga melekat pada pelaksana ibadah Umrah, mereka juga dipanggil haji sekembali ke kampung halaman. Pada tahun-tahun 2010 awal ketika haji menjadi ibadah yang cukup panjang proses keberangkatan dan mengantri sekian tahun, maka umrah menjadi pilihan untuk dapat menuju Makkah secara cepat. Haji dan umrah sebagai ibadah khusus tak jarang juga dipersepsikan sebagai wisata religi. Perjalanan dengan biaya yang tidak sedikit tersebut menempatkan Makkah sebagai pusat turisme terbesar dunia, bukan hanya untuk masyarakat Muslim, tetapi banyak juga non-muslim yang mengkaji tentang haji atau dunia muslim (muslim world) yang direpresentasikan melalui haji atau umrah di Makkah. Peziarahan haji pun awalnya bukan hanya untuk agama

Islam yang diikuti melalui Syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tetapi menyangkut tiga Nabi yang lainnya juga yakni Nabi Adam A.S, Ibrahim A.S, dan Ismail A.S. Karena itu sebelum hadirnya Islam pun para peziarah pada bulan-bulan tertentu sudah ramai mengunjungi Makkah, karena di sana juga diadakan lomba syair. Syair-syair terbaik sebagai pemenang kemudian digantung di dinding Ka'bah.

Sudah tentu subyek-subyek haji yang dianggap pergi ke Makkah untuk mendapatkan gelar semata akan merasa tersinggung, tetapi begitulah realitas yang pernah terjadi. Hal ini ditelisik dari upaya-upaya subyek haji meninggikan gelar haji yang ada padanya, meski itu bukan suatu hal yang patut untuk diagung-agungkan. Melalui itulah kapital simbolik pada gelar haji itu terlihat. Salah satu contohnya, subyek haji akan merasa tersinggung jika gelar haji di depan namanya tidak disebut, atau tidak ditulis gelar hajinya ketika orang lain menuliskan undangan. Begitu juga dengan upaya-upaya legitimasi yang lain melalui gelar haji, termasuk pada pencalonan sebagai kepala dusun, Kepala Desa, atau elit-elit lainnya, gelar haji mesti muncul pada poster-posternya. Begitu juga dengan penyematan papan nama pada pintu, lengkap dengan gelar hajinya.

Kapital simbolik pada gelar haji dalam hal ini bekerja karena pemapanan dari masyarakat juga terkait subyek haji yang dianggap sebagai orang suci, yang sudah sempurna keislamannya. Tentu tidak semua haji seperti itu, tetapi melalui perubahan simbol, perilaku, gaya berpakaian, adalah bentuk transformasi dari gelar itu untuk menegaskan identitas kehajiannya. Upaya-upaya kritis menyadarkan bahwa haji adalah proses berkelanjutan, bukan hanya selesai ketika

sudah tidak di Makkah, tetapi menunjukkan kehajian yang mabrur dengan perubahan perilaku ke arah lebih baik juga menjadi bagian dari tradisi behaji pada masyarakat Sasak.

Masyarakat Sasak tentu perlu mengkonstruksi habitus baru terkait tradisi dalam behaji ataupun umrah, terutama niat untuk berhaji semata karena Allah, bukan mencari gelar atau niat untuk jalan-jalan berwisata. Karena banyak juga kita temukan promosi-promosi perjalanan umrah yang menawarkan perjalanan selanjutnya ke negara-negara Eropa, ke Turkey, Francis, dan lainnya. Artinya mungkin iya niat awal untuk ke Makkah, akan tetapi bisa saja mereka yang sudah pernah berhaji atau umrah kemudian tertarik dengan promosi tersebut dengan tujuan untuk bisa ke Turkey jalan-jalan wisata. Untuk itulah niat-niat perjalanan haji atau umrah sudah sepantasnya menjadi niat utama tanpa ada embel-embel niatan apapun.

Jangan sampai niatan berhaji untuk mencari Tuhan ke Makkah malah berubah tanpa ada ghiroh selama menjalani haji dan umroh disebabkan adanya tujuan lain selain ibadah tersebut. Konsep False Fethisism (kepuasan semu) bisa saja terjadi dari subyek-subyek haji yang merasa hatinya belum mapan untuk menjalani ibadah haji, tetapi berhaji semata untuk menuntaskan cibiran-cibiran dari orang lain, bahwa ia cukup mapan secara ekonomi tetapi tidak mau pergi berhaji. Tentu anggapan-anggapan seperti ini banyak terjadi, hingga membuat subyek haji yang merasa tersindir kemudian menunjukkan bahwa mereka bisa pergi berhaji. Namun tidak sedikit juga yang kemudian berdalih bahwa mereka belum mendapatkan panggilan sebagai tamu Allah SWT.

Konsep fetishisme (kepuasan) dalam konteks haji ataupun umrah tentu akan berbeda-beda antara subyek haji yang satu dengan yang lain. Tetapi dari beberapa data yang peneliti sempat telusuri bahwa bentuk kepuasan menjalankan ibadah haji tidak bisa diukur dari ungkapan ekspresi ataupun tindakan, tetapi itu hanya bisa dirasakan dalam hati. Penuturan dari subyek-subyek haji bagaimana ketenangan-ketenangan jiwa yang muncul itu menjadikan mereka menjadi hamba yang rela, berpasrah, tidak peduli dengan dunia yang terlalu kecil jika dibandingkan dengan nikmat dari Tuhan yang sudah mereka dapatkan. Karena itu kepuasan yang sebenarnya justru terdapat pada hati subyek-subyek haji yang secara pasrah juga mengikuti tuntunan-tuntunan ibadah haji tanpa banyak pertanyaan terkait rukun-rukun ataupun syarat haji yang mereka jalani sebenarnya bermakna apa. Tetapi bagi seorang intelektual mungkin upaya pencarian ketenangan jiwa itu justru berlaku melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan begitu barulah mereka bisa memaknai dan merefleksikan ibadah yang mereka jalani adalah bagian dari kepasrahan itu.

B. Refleksi Sosial Pada Fenomena Haji

Pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya tentu banyak juga menyisakan pertanyaan-pertanyaan terutama kaitannya dengan impact sosial apa yang bisa dimunculkan dari tradisi berhaji tersebut. Begitu juga dengan dampak haji terhadap pembaharuan Islam di Indonesia juga menjadi catatan yang sedang mulai menggaung dari beberapa akademisi tanah air. Hal itu direfleksikan dengan kajian historis para haji di masa dulu yang menjadi pioneer penyebaran

Islam di nusantara. Dalam konteks hari ini tentu hal itu juga bisa digaungkan terutama dalam hal pembangunan toleransi, moderasi beragama, atau upaya demokratisasi dalam pemahaman keagamaan yang mulai mencuat ketika pemahaman keagamaan yang satu dianggap paling ideal, lalu menganggap yang lainnya sudah menyimpang, bid'ah bahkan dianggap tidak ada dasar.

Begitu juga dengan dampak kesalihan sosial, dan ekonomi, apakah haji selama ini akan terus mapan dengan kesalihan individu sebagai ibadah mahdhoh, ataukah juga ibadah haji bisa ditarik pada tataran sosial, ekonomi untuk semakin membantu banyak orang yang kesusahan, kelaparan yang bisa tertolong daripada hanya untuk ambisi kesalihan individu. Dana-dana haji yang begitu besar yang disimpan negara tentunya bisa menjadi dana abadi umat untuk membantu sektor-sektor penting untuk pembangunan keumatan. Supaya tidak ada lagi kisah-kisah pilu bahwa tetangga-tetangga yang lapar, kesusahan, terlilit hutang, anak-anak tidak dapat sekolah, tetapi tetangganya yang kaya justeru asyik menjalani perjalanan haji. Tentunya hal baik juga bisa diwujudkan melalui dana-dana haji tersebut, hingga bisa dipadankan dengan semangat berhaji yang dicontohkan dalam kisah-kisah hikmah perhajian Abdullah bin Mubarak.

Daftar Pustaka

- Ariadi, L. M. 2013. *Haji Sasak : Sebuah Potret Dialektika Haji dan Kebudayaan Lokal*. Jakarta : Impresa.
- Atkison, P., dan Hammersley, M. 2007. *Ethnography, Third Edition*. London : Routledge.
- Azra, Azyumardi. 1999. Konteks Berteologi di Indonesia : Pengalaman Islam. Jakarta : Paramadina.
- Bourdieu, Pierre. 1992. *Outline of The Theory of Practice*. New York : Cambridge University Press.
- . 1979. *Outline of Theory of Practice*, Translated Richard Nice. USA : Cambridge University Press.
- . 1984. *Distinction : A Social Critique of the Judgement of Taste*. Translated Richard Nice. UK : Routledge & Kegan Paul.
- Bourdieu, Pierre. 2005. *Di balik Panggung Dominasi, Sosiologi A la Pierre Boudieu*, dalam Philippe Cabin & Jean Francois Dortier (ed.). 2005. *Sosiologi : Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, terjemahan Ninik Rochani Sjams. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Budiawan. 2016. Living In The "Veranda of Mecca" Political Contestation and Religious Tolerance In Kelantan, Malaysia. *Jurnal Kajian Wilayah* 2(2), 156-171.
- Faatin, Salmah. 2019. Haji Dua Kali : Kajian Terhadap Motif Pengulangan Haji Masyarakat Muslim di Kudus. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 7(1), 43-72.
- Fahrurrozi. 2015. *Ritual Haji Masyarakat Sasak Lombok : Ranah Sosiologis- Antropologis*. *Ibda'*, *Jurnal Kebudayaan Islam* : Vol. 13. No.2,

- Haryatmoko.2016. *Membongkar Rezim Kepastian : Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta : PT. Kanisius.
- Hassan Fattah, "The Profane Crowding out Sacred in Mecca", The New York Times, 10 Maret 2007.
- Hurgronje, C. S. 2006. *Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning. The Moslims of the East-Indian Archipelago*. Brill.
- Kusuma, Mirza Tirta (ed.). 2014. *Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Laffan, Michael F. 2011. *The Makings of Indonesian Islam : Orientalism and the Narration of Sufi Past*. USA : Princeton University Press.
- Loir, Henri Chambert. 2013. *Naik Haji Di Masa Silam : Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1964 (Jilid II 1900-1950)*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lukman, H. Lalu. 2004. Lombok. Mataram : Pokja.
- Madjid, M. Dien. 2008. *Berhaji Di Masa Kolonial*. Jakarta : CV. Sejahtera.
- Putuhena, M. Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta : LKiS
- Raffles, Thomas Stampord. 2014. *The History of Java*. Jakarta : Narasi.
- Saukko, Paula. 2003. *Doing Research In Cultural Studies : An Introduction to Classical and New Methodological Approaches*. USA : Sage Publications Inc.
- Sochadha, Moh. 2016. *Ritus Tuan Berpeci Putih : Haji dan Lokalitas Orang Sasak di Tanah Merah*. Yogyakarta : Diandra dan Label UIN Sunan Kalijaga.

Soehadha, Moh. 2018. "Struggle For Identity and Social Image of Haji: Study on Life History of Social Construction of Haji in Sasak Community, Lombok, NTB." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18.1: 1-12.

Sya'rani, M. 2017. HAJI DALAM LOKALITAS MASYARAKAT SASAK. doc. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 2(1), 1-12.

Vredendregt, Jacob. 1997. *Indonesia dan Haji*. Jakarta : INIS.

Wahid, Abdul. 2020. Dua Suara Tuhan: Pergumulan Etos & Budaya di Ruang Publik. Mataram : Alamtara Institute

Weber, Max. 1961. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. New York : Charles Scribner's and Sons.

Sumber Website :

Adryamarthanino, Verelladevanka. 2021. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/30/120000079/asal-usul-gelar-haji-di-indonesia?page=all>.

Ahsan, Ivan Aulia. 2017. <https://tirto.id/taktik-belanda-mengendalikan-islam-melalui-gelar-haji-cvHX>

Damhuri, Elba. 2020, dikutip dari <https://ihram.co.id/berita/q79yj5440/makna-jadi-haji>
<https://lombokbaratkab.go.id/tokoh-islam-sasak-pada-masa-penjajahan-2/amp/>

Khadafi Ahmad. 2017. <https://tirto.id/mekah-mekah-di-nusantara-cj4l>

Livikancasera, Setyanavidita. 2009.

<https://www.republika.co.id/berita/96661/arti-gelar-haji>

Said, Muhammad. 2020. Dikutip dari <https://tarbiyahislamiyah.id/para-inyik-dan-tuan-guru-jaringan-ulama-minang-dan-lombok/>

Sanusi, Didi G. 2020, dikutip dari <https://jejakrekam.com/2020/07/17/sejarah-urang-banjar-naik-haji-kontroversi-gelar-dan-ujian-era-kolonial-1/>

Tentang Penulis



Abdul Rahim, Lahir 4 September 1991 di Lengkok Lendang, Lombok Timur. Menyelesaikan S1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram, kemudian melanjutkan Master dengan bantuan biaya studi dari LPDP di program Media & Cultural Studies, UGM, Yogyakarta. Pada tahun 2014 pernah menggagas Komunitas Pemuda Kreatif (KOMPAK), Rumah Belajar dan Taman Baca KOMPAK (2015), juga sebagai pembina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) PA Pondok Pesantren Mikrajussibyan NW Lengkok. Sempat terlibat Penelitian di antaranya, Survey Akses Jasa Keuangan di Desa Perigi Lombok Timur (2018, Lembaga Penelitian Surveymeter, Yogyakarta), *Innovative Investment for Sustainable Economic Development* (ISED) terkait kebutuhan Industri Pariwisata (2019, Kerjasama The Development Cafe, didanai GIZ, Jerman). Buku yang sudah diterbitkan lainnya, *Dari Desain Kebaya Hingga Masyarakat Adat Raja Ampat-et Al.* (Ombak, 2019), *Menuju Pendidikan Yang Memerdekakan* (Sanabil, 2020), *Benih Padi Terakhir*-Kumpulan Cerpen (Kunfayakun, 2020), *Aku Takut Jadi Sarjana*-Novel (Megalitera, 2020) *Runtuhnya Kezuhudan Beragama* (Sanabil, 2020), *Gendang Beleg Yang Adilubung Kecimol Yang Rendahan* (KunFayakun, 2021), *Antropologi Sasak Islam: Dialektika Antara Mitos dan Tradisi* (Pustaka Egaliter, 2022), dan *Relasi Kuasa Adat dalam Konteks Keagamaan di Lombok*-BookChapter dalam *Relasi Agama dan Adat di Indonesia*-ed. Sumanto Al Qurtuby

(ElsaPress, 2023), Serta menulis di beberapa Jurnal Nasional sinta 2, dan 1 Internasional (scopus). Saat ini sebagai pengajar tetap di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram.